

R P J M D

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 - 2029



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR .3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan yang dituangkan dalam visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahun melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih, maka diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Capaian Kinerja Tahunan adalah capaian target kinerja yang terealisasi setiap tahunnya.
18. Capaian Kinerja Akhir RPJMD adalah akumulasi capaian target kinerja tahunan yang terealisasi sampai dengan masa akhir RPJMD.
19. Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran umum Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup

Pasal 4

Penjabaran sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RPJMD melalui:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sebelum ditetapkan RPJMD tahun 2030-2034 yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih periode selanjutnya, RPJMD tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2030.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR .3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3-91/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR .3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik, salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 70



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
	1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 9
	1.4 Maksud Dan Tujuan	I - 15
	1.5 Sistematika Penulisan	I - 16
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 44
	2.1.3 Aspek Daya Saing	II - 68
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II - 82
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II - 128
	2.2.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 128
	2.2.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030	II - 140
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II - 146
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 146
	2.3.2 Isu Strategis Daerah	II - 156
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III - 1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III - 1



3.1.1	Visi	III	-	1
3.1.2	Misi	III	-	3
3.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III	-	5
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	-	17
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau	III	-	17
3.2.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	-	37
3.2.3	Arahan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan	III	-	133
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV	-	1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV	-	1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV	-	93
BAB V	PENUTUP	V	-	1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V	-	1
5.2	Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	V	-	2
5.3	Perubahan RPJMD	V	-	3
5.4	Pedoman Transisi	V	-	3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau	II - 2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau	II - 3
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II - 3
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau	II - 4
Tabel 2.5	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	II - 5
Tabel 2.6	Rata-Rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota	II - 6
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	II - 7
Tabel 2.8	Daftar DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Riau	II - 10
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun	II - 12
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II - 33
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 34
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II - 35
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II - 36
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II - 36
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 37
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II - 38
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 38
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau	II - 39



Tabel 2.19	Penurunan Intensitas Emisi GRK di Provinsi Kepulauan Riau	II -	39
Tabel 2.20	Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024	II -	40
Tabel 2.21	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II -	41
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekawinan, 2024	II -	42
Tabel 2.23	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2024	II -	42
Tabel 2.24	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II -	43
Tabel 2.25	Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 (/km ²)	II -	44
Tabel 2.26	Proyeksi penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 (Ribuan jiwa)	II -	44
Tabel 2.27	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II -	48
Tabel 2.28	Usia Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun)	II -	52
Tabel 2.29	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022– 2024	II -	54
Tabel 2.30	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2024	II -	55
Tabel 2.31	Harapan Lama Sekolah Per Jenis Kelamin	II -	58
Tabel 2.32	Rata-rata Lama Sekolah Per Jenis Kelamin	II -	59
Tabel 2.33	Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	II -	60



Tabel 2.34	Rata-Rata Pengeluaran Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2024	II -	66
Tabel 2.35	Jumlah Anggota DPRD di Prov. Kepri Menurut Partai Politik, 2024 Sebanyak 13% anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Berjenis Kelamin Perempuan	II -	67
Tabel 2.36	Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau	II -	79
Tabel 2.37	Pemenuhan Atas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024	II -	80
Tabel 2.38	Predikat Penilaian SPBE	II -	83
Tabel 2.39	Rincian Indikator Daya Saing Daerah Oleh Badan Riset Inovasi Nasional Untuk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	II -	87
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024	II -	89
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024	II -	91
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II -	94
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II -	96
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II -	98
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024	II -	99



Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II -	101
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	II -	102
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan	II -	103
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024	II -	104
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II -	105
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	II -	106
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	II -	107
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	II -	107
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024	II -	108
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024	II -	109
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun 2020-2024	II -	111
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024	II -	112
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020-2024	II -	113



Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024	II -	114
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024	II -	115
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024	II -	115
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024	II -	116
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024	II -	117
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024	II -	118
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024	II -	119
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024	II -	120
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024	II -	121
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024	II -	121
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024	II -	123
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024	II -	124
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2020-2024	II -	126
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024	II -	127



Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Kunci Transparansi dan Partisipasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	II -	128
Tabel 2.74	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II -	131
Tabel 2.75	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	132
Tabel 2.76	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II -	134
Tabel 2.77	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	135
Tabel 2.78	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II -	137
Tabel 2.79	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II -	149
Tabel 2.80	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)	II -	142
Tabel 2.81	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2025-2045	II -	156
Tabel 2.82	Keterkaitan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Dengan Permasalahan Pembangunan, Isu Regional, Isu Nasional, dan Isu Global	II -	177
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	III -	9
Tabel 3.2	Strategi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	III -	20



Tabel 3.3	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	III -	29
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III -	39
Tabel 3.5	Rencana Implementasi Program Kepala Daerah Tahun 2025-2030	III -	67
Tabel 3.6	Arahan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan RPJMN	III -	133
Tabel 3.7	Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas	III -	141
Tabel 3.8	Intervensi Program Unggulan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas	III -	142
Tabel 3.9	Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang	III -	149
Tabel 3.10	Intervensi Program Unggulan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang	III -	151
Tabel 3.11	Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga	III -	158
Tabel 3.12	Intervensi Program Unggulan Klaster wilayah Lingga	III -	159
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	IV -	13
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV -	93
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV -	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I - 10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	II - 2
Gambar 2.2	Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	II - 4
Gambar 2.3	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	II - 24
Gambar 2.4	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 25
Gambar 2.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 26
Gambar 2.6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 27
Gambar 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	II - 28
Gambar 2.8	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2020-2024	II - 29
Gambar 2.9	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024	II - 31
Gambar 2.10	Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 -2024	II - 32
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	II - 41
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 2024 (%)	II - 45
Gambar 2.13	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	II - 46
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024 (Maret dan September) (%)	II - 47
Gambar 2.15	TPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (%)	II - 49
Gambar 2.16	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	II - 49



Gambar 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 50
Gambar 2.18	Usia Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 2029	II - 51
Gambar 2.19	Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 52
Gambar 2.20	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	II - 56
Gambar 2.21	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, 2024	II - 57
Gambar 2.22	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 57
Gambar 2.23	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (Tahun)	II - 59
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 60
Gambar 2.25	Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (%)	II - 61
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024	II - 63
Gambar 2.27	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024	II - 64
Gambar 2.28	Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 65
Gambar 2.29	Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2023	II - 67
Gambar 2.30	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu jiwa)	II - 69
Gambar 2.31	Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 70



Gambar 2.32	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 70
Gambar 2.33	Kinerja Indikator Rasio Kewirausahaan Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	II - 71
Gambar 2.34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 72
Gambar 2.35	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2024	II - 73
Gambar 2.36	Perkembangan Kinerja Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	II - 73
Gambar 2.37	Pencapaian Komponen Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	II - 76
Gambar 2.38	Persentase PMTB terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 78
Gambar 2.39	Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 82
Gambar 2.40	Perkembangan Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	II - 84
Gambar 2.41	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	II - 86
Gambar 2.42	Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 130
Gambar 2.43	Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 133
Gambar 2.44	Perkembangan Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 136



Gambar 2.45	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024 (%)	II - 183
Gambar 2.46	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2024	II - 183
Gambar 2.47	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024	II - 185
Gambar 2.48	Posisi Relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024	II - 186
Gambar 3.1	Pentahapan Pembangunan Tahunan	III - 35
Gambar 3.2	Klaster Natuna Anambas	III - 140
Gambar 3.3	Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang	III - 148
Gambar 3.4	Klaster Lingga	III - 157



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan dokumen lainnya.

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029, Tahun 2030-2034, Tahun 2035-2039, dan Tahun 2040-2045. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, yang selaras dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029.

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu,



di dalam perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini meliputi: (1) Persiapan Penyusunan RPJMD; (2) Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik; (3) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD; (4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD; (5) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD; (6) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; (7) Konsultasi Ranwal RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri; (8) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah; (9) Penyusunan Rancangan RPJMD; (10) Musrenbang RPJMD; (11) Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD; (12) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD; (13) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD kepada DPRD; (14) Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 bersama DPRD; (15) Evaluasi Ranperda RPJMD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan (16) Penetapan Ranperda RPJMD.



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum merupakan landasan penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dasar hukum menjadi acuan yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum ini akan memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan jangka menengah daerah. Adapun dasar hukum utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



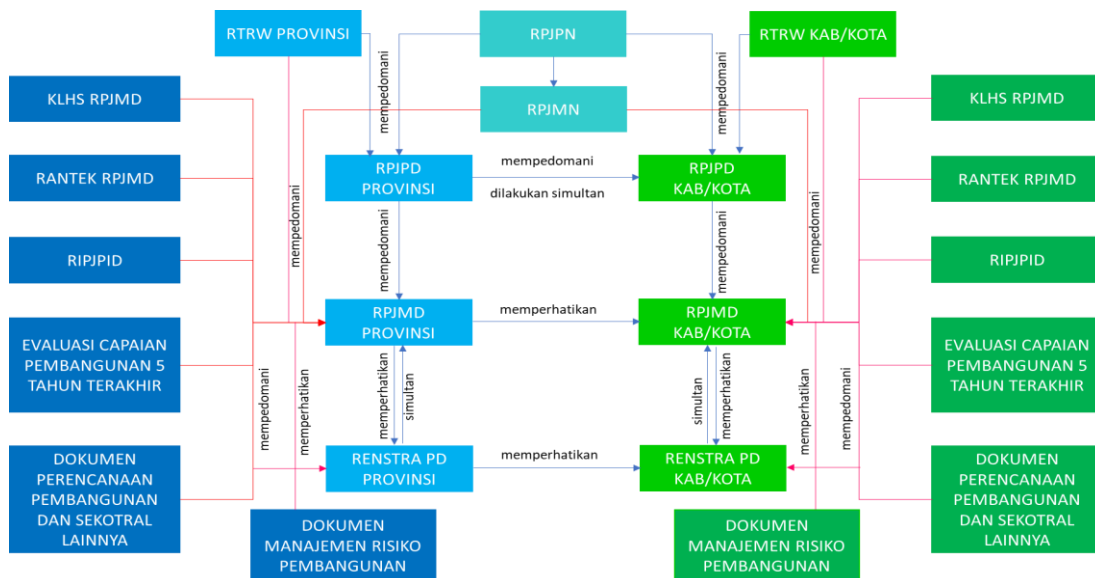
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Oleh karena itu, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD selanjutnya akan dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN

Tahun 2025-2029. Selain itu, pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW, sehingga RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Penyelarasan RPJMD dengan RTRW mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan sebagainya.

Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Penjelasan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya dijelaskan berikut ini.

1. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 terutama pada bagian visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. RPJMD 2025-2029



merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045. Sehingga, penyusunan RPJMD memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 dan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 terutama pada periode pertama Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang telah disusun, diarahkan untuk mencapai visi **KEPRI PERMATA BIRU 2045: “PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM, BERBUDAYA MELAYU, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**. Untuk mendukung pencapaian visi ini terdapat 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif;
2. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern;
3. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substantif yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah;
4. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu;
5. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*;
6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif; dan
7. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah.



Arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 mendukung arah kebijakan tahap pertama Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045. Arah kebijakan tahap pertama yaitu Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dengan Fokus pada penguatan fondasi pembangunan yang meliputi akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah dan Sumber Daya Manusia didukung oleh kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel, pengembangan potensi perekonomian daerah dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter, didukung oleh pelayanan publik yang bermutu, penguatan potensi perekonomian daerah dan daya saing Sumber Daya Manusia, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, pemantapan perekonomian daerah dan Sumber Daya Manusia yang unggul, didukung oleh infrastruktur wilayah yang berkualitas, dan perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta Sumber Daya Manusia yang produktif dan berbudaya.

2. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, bahwa RPJMN Tahun 2025-2029 diselaraskan ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

3. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2037. Penuangan keselarasan RPJMD dengan RTRW Provinsi dalam dokumen RPJMD telah melalui proses penelaahan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW Provinsi dan indikasi program yang terdapat dalam dokumen RTRW Provinsi diharapkan tidak hanya menjadi dasar perumusan RPJMD, namun juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 agar sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program

dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran setiap urusan bidang dan/fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RIPJPID Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID). Sinergi RPJMD dan RIPJPID dilakukan untuk memastikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, yang memuat peta jalan riset dan inovasi untuk mendukung penyelesaian isu strategis serta pengembangan potensi daerah, dapat diturunkan secara efektif ke dalam program dan kegiatan di RPJMD. Dipastikan program-program pembangunan dan program yang mengakomodasi kegiatan kajian berbasis data dan bukti (data and evidence-based studies) telah

tercantum dalam RPJMD untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan daerah yang tepat sasaran.

7. Hubungan RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota serta Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten/Kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional maupun provinsi. Beberapa dokumen tersebut adalah: (a) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's); (b) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (c) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); (d) Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI); (e) Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); (f) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD; dan (g) Rencana Penanggulangan Bencana daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke-depan, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra, RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program



untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program pembangunan;
3. Memberikan arah pengembangan wilayah bagi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada sistematika yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu juga menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis.



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Selain itu juga menjelaskan strategi dan arah kebijakan daerah, program-program prioritas daerah, rencana implementasi program kepala daerah serta arah pengembangan wilayah pusat pertumbuhan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan program perangkat daerah, indikator program, target, dan pagu indikatif program, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 0°29' Lintang Selatan (LS) dan 4°40' Lintang Utara (LU) dan 103°22' Bujur Timur (BT) - 109°40' Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.269,708 Km². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai Provinsi ke 32 (tiga puluh dua) di Indonesia dengan 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Natuna. Berkenaan dengan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

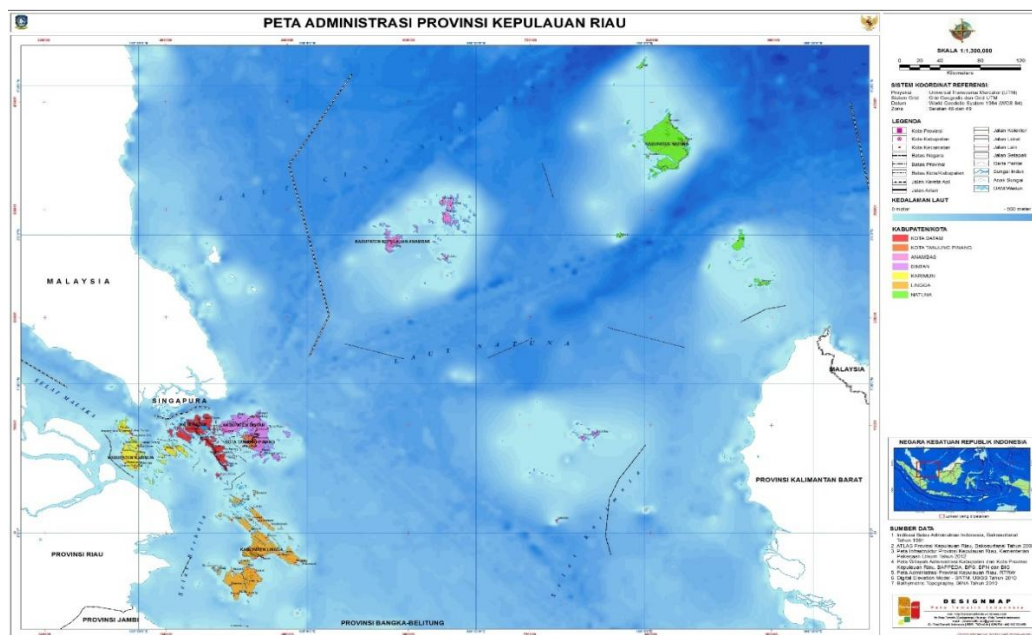
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan (saat ini Laut Natuna Utara)

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan (saat ini Provinsi Bangka Belitung) dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2894 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km². Rincian luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1	Kota Tanjungpinang	149,634
2	Kabupaten Bintan	1.311,868
3	Kota Batam	1.020,280
4	Kabupaten Karimun	916,331
5	Kabupaten Lingga	2.173,630
6	Kabupaten Natuna	1.978,010
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	620,622
Total		8.170,375

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Pada wilayah laut, menurut perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 (tanpa memperhitungkan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), Provinsi Kepulauan Riau memiliki laut seluas 417.012,97 km². Rincian lebih lanjut mengenai luas laut masing-masing kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Laut (km ²)
1	Kota Tanjungpinang	149,13
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kota Batam	3.675,25
4	Kabupaten Karimun	4.698,09
5	Kabupaten Lingga	43.339
6	Kabupaten Natuna	216.113,42
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.074
Total		417.012,97

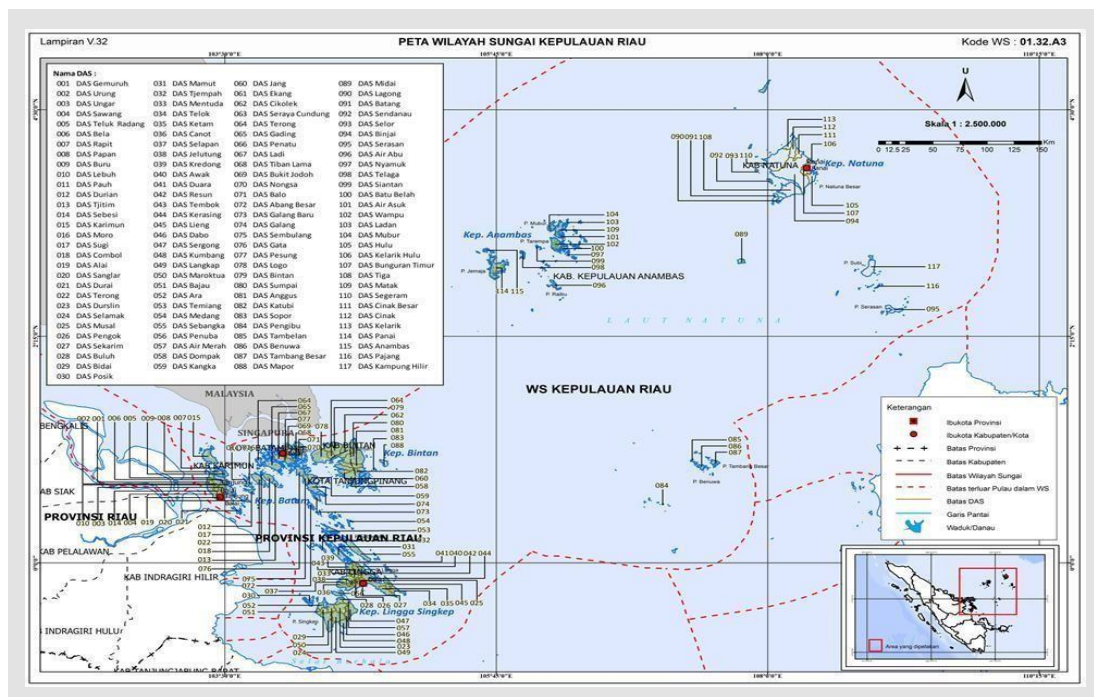
Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal (2007)

Berlandaskan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, melalui interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000, letak kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis sebagai berikut.

Tabel 2.3 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1	Kota Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT
2	Kabupaten Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3	Kota Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
4	Kabupaten Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
5	Kabupaten Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
6	Kabupaten Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (2016)



Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2 Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
0	Provinsi Kepulauan Riau	14	1
1	Kota Tanjungpinang	8	3
2	Kabupaten Bintan	263	32
3	Kota Batam	454	80
4	Kabupaten Karimun	248	45
5	Kabupaten Lingga	630	82
6	Kabupaten Natuna	172	30
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	239	21
Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau		2.028	294

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun, Pulau Sentut
2	Kota Batam	4	Pulau Batu Berantai, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Putri
3	Kabupaten Karimun	2	Pulau Karimun Anak, Pulau Tokong Hiu Kecil
4	Kabupaten Natuna	7	Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Boro
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Pada aspek topografi, wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-50 m dpl, 50-200 m (paling dominan), dan di atas 200 m, dengan puncak tertinggi di Gunung Daik Lingga dengan ketinggian 1.272 m dpl. Kemiringan lereng yang dominan adalah 15-25% pada wilayah perbukitan, serta 25-40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di Sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau tersebut terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng

wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan.

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, ketinggian wilayah kabupaten/kota melalui interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000 diperoleh rincian berikut :

Tabel 2.6 Rata-Rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m dpl)
1	Kota Tanjungpinang	6,5
2	Kabupaten Bintan	6
3	Kota Batam	8
4	Kabupaten Karimun	5
5	Kabupaten Lingga	6
6	Kabupaten Natuna	14
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	6

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024)

Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah 15 gunung dengan ketinggian yang bervariasi; gunung tertinggi adalah Gunung Daik yang terletak di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, disusul oleh Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, serta Gunung Sepincan

di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya berikut.

Tabel 2.7 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Kabupaten Bintan	Gunung Bintan	380
2	Kabupaten Karimun	Gunung Jantan	478
3	Kabupaten Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
4	Kabupaten Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	433
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024)

Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari kontinental yang dikenal dengan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis dan meta batulanau; batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian timur Provinsi Kepulauan Riau; batuan terobosan seperti granit muskovit yang dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur; serta batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Buru. Selain itu, terdapat pula batuan aluvium tua yang terdiri dari lempung dan pasir kerikil, serta batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut.

Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Daik Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemaja. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit,

granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. Jenis tanah organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung bahan organik paling sedikit 30% bila liat, atau 20% bila berpasir. Kepadatan kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah organosol tersebar di beberapa pulau Moro Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang Kota Batam.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

Provinsi Kepulauan Riau dengan kondisi hidrologinya dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Pemenuhan kebutuhan air bersih, bersumber dari air permukaan berupa air

sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) diperoleh dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih serta kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Daftar DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit	0,51	58.	DAS Lebu	0,10	98.	DAS Siantan	0,10



No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
	Jodoh							
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekan	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 36,8°C sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 31,5°C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm³ dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm³.

Secara umum wilayah Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba, Suhu rata-rata tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 28,1⁰C, sedangkan rata-rata terendah ada di Kota Tanjungpinang 27,2⁰C, Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 88,40%, sedangkan rata-rata terendah di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 81,80%, jumlah hari hujan tertinggi berada di Dabo (Kabupaten Lingga) dengan sebanyak 230 hari, sedangkan hari hujan terendah berada di Tarempa (Kabupaten Kepulauan Anambas) yakni sejumlah 155 hari, tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Kota Batam) sebesar 1,011,70 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Kota Tanjungpinang sebesar 1,009,00 mb, kecepatan angin tertinggi di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 4,10 knot, terendah di Kabupaten Karimun sebesar 1,3 knot, penyinaran matahari tertinggi di Kabupaten Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 65,0 %, terendah di Kabupaten Karimun dengan sebesar 38,9 %. Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun

No	Uraian	Tanjungpinang	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Tarempa (Kepulauan Anambas)
1	Suhu (°C)						
	Maksimum	34,10	34,80	34,60	33,80	24,90	34,40
	Minimum	21,20	21,00	22,20	18,40	25,70	22,90
	Rata-Rata	27,20	27,80	28,00	27,50	27,80	28,10
2	Kelembaban Udara (%)						
	Maksimum	100,00	100,00	96,00	100,00	95,00	97,20
	Minimum	72,20	45,00	70,00	50,00	82,10	59,20
	Rata-Rata	86,30	83,00	82,30	84,00	88,40	81,80
3	Tekanan Udara (mb)	1009,00	1011,70	1009,80	1010,50	1010,70	1009,90
4	Kecepatan Angin (knot)	2,60	2,60	1,30	4,00	3,00	4,10

No	Uraian	Tanjungpinang	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Tarempa (Kepulauan Anambas)
5	Jumlah Hari Hujan (hari)	215,00	193,00	187,00	230,00	213,00	155,00
6	Penyinaran Matahari (%)	54,20	41,00	38,90	52,00	65,00	50,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau dalam angka 2024)

Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan, secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor maritim. Potensi maritim ini dapat menjadi penopang pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai aspek, sehingga berbagai upaya pembangunan wilayah perlu menempatkan maritim sebagai fokusnya. Dalam RPJPN tahun 2025-2045 disebutkan bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan strategis industri maritim dan pengembangan kawasan strategis pariwisata karena memiliki atraksi yang menarik, amenities, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi lokus pengembangan ekonomi biru, karena memiliki potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya, dan potensi blue energi.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang ada di Kepulauan Riau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 207,569$ Hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas $\pm 60,299$ hektar dan perubahan bukan kawasan

hutan menjadi kawasan hutan seluas $\pm$ 536 hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian kawasan hutan produksi terbagi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79,259 hektar. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120,490 hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74,367 hektar.

Namun pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor: SK,272/MENLHK/SETJEN/PLA,0/6/2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm$ 330 hektar dan perubahan fungsi kawasan hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas $\pm$ 7,560 hektar menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK,272/MENLHK/SETJEN/PLA,0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi seluas 81,927 ha, selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16,012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK,272/MENLHK/SETJEN/PLA,0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221,707 hektar. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan mendasarkan pada kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan meliputi lahan basah dan lahan kering dimana pengairan diperoleh secara alamiah maupun teknis. Kawasan lahan kering diperuntukan bagi tanaman palawija dan holtikultura. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai potensi dan sistem irigasi dengan ketinggian <1.000 m dpl dan kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm.

b) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak, pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan.

Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap

yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 hektar, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

d. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Berek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat

Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 hektar. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di :

- a) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang)
- b) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)

- c) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
- d) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
- e) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
- f) Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
- g) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataaan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;

- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadukan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana

kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (*Anchorage Area*),

kawasan alih muat muatan kapal *Ship to Ship* (STS), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Alur laut

Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

C. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

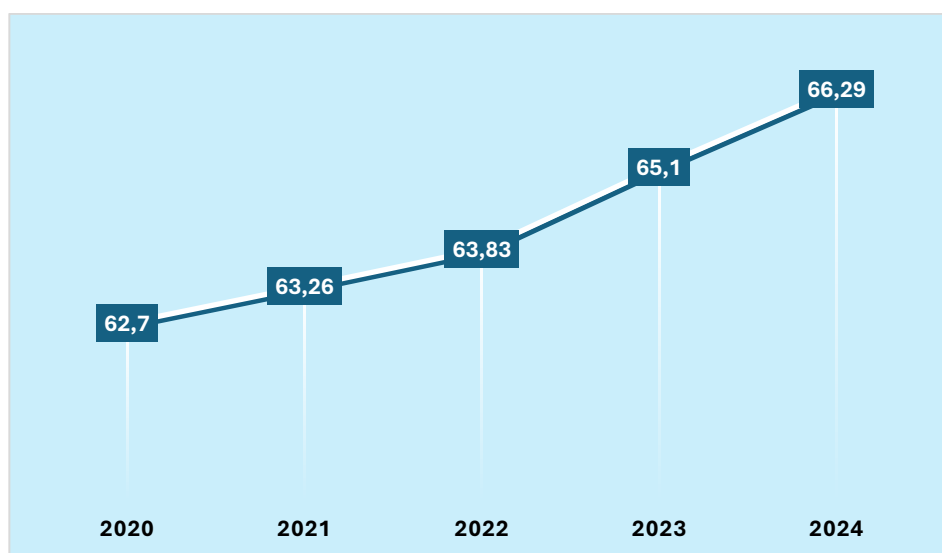
Ketahanan pangan menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan kondisi ketika setiap individu mempunyai akses fisik atau ekonomi terhadap pangan yang cukup, bergizi, serta aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan preferensi masing-masing. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan sampai di tingkat individu masyarakat melalui tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya secara aman, bergizi, beragam, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan budaya dan keyakinan masyarakat agar dapat hidup secara sehat, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah beserta faktor pendukung dan penghambatnya, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dikembangkan untuk mengevaluasi pemenuhan gizi dan ketahanan pangan serta sebagai ukuran capaian pembangunan pemerintah di suatu wilayah. Pengukuran pada IKP penting dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM di suatu wilayah.



Sumber: Data Bapanas (2022)

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Hasil perhitungan IKP berfungsi untuk memberikan gambaran ranking dari tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terdapat 3 aspek ketahanan pangan yang dijadikan acuan untuk mengukur IKP, yaitu pemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Tiga aspek tersebut diturunkan menjadi 9 indikator yang mencakup: a) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, b) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, c) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, d) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, e) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, f) persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, g) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, i) persentase balita stunting, dan j) angka harapan hidup saat lahir. Skor IKP dengan rentang 0-100 yang dihasilkan setiap wilayah akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang termasuk kelompok 1 cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan di atasnya, sedangkan wilayah yang termasuk kelompok 6 memiliki ketahanan pangan yang paling baik.



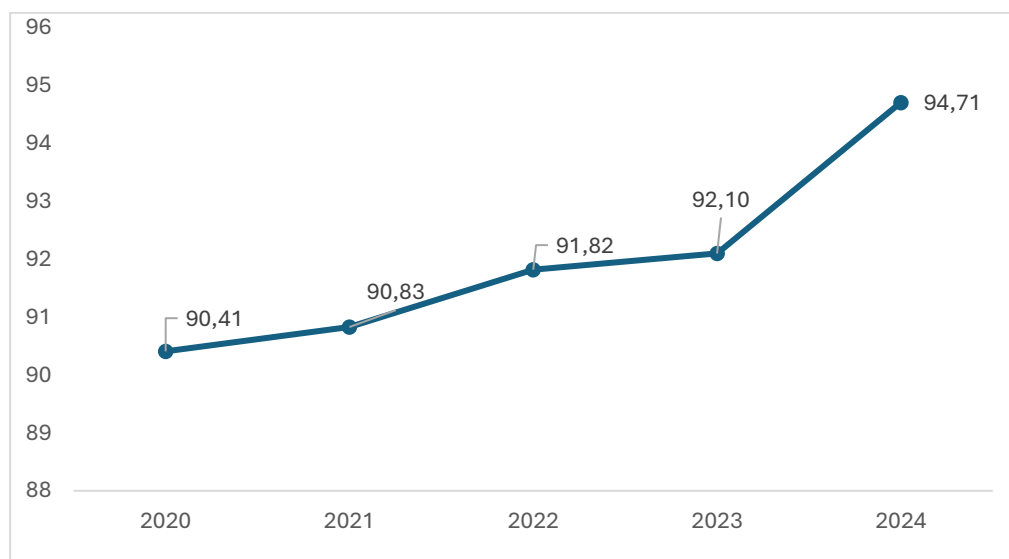
Sumber: Badan Pangan Nasional 2024

Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Capaian IKP Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 capaian IKP sebesar 66,29 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 65,1. Peningkatan tersebut perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan perubahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum

Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar 90,41% pada tahun 2020 menjadi sebesar 94,71% pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

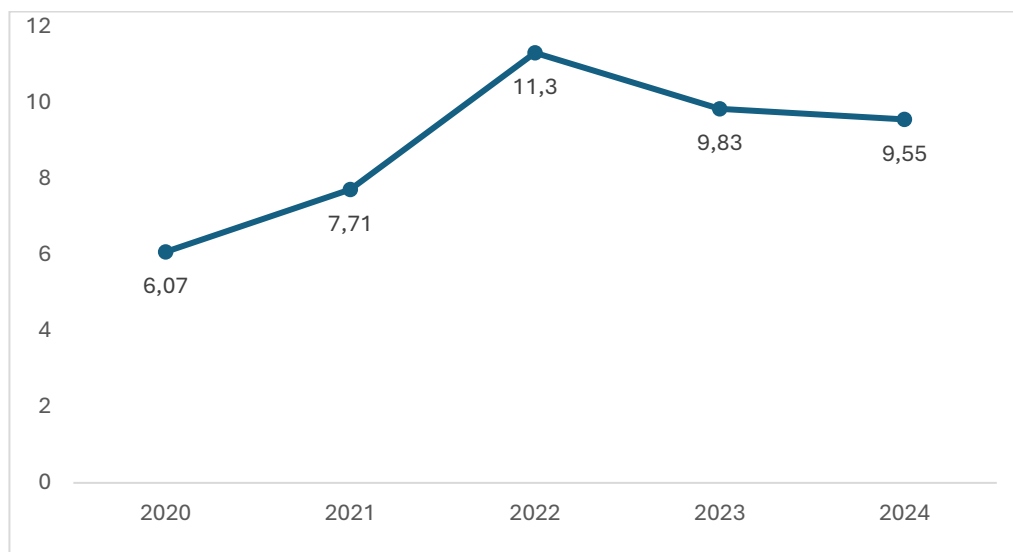


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

3. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Prevalensi ketidacukupan pangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 6,07% pada tahun 2020 menjadi 9,55% pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

4. Konsumsi Listrik Perkapita

Ketahanan energi dapat diukur dari konsumsi listrik perkapita. Konsumsi listrik per kapita menunjukkan jumlah listrik yang digunakan per orang dalam satu periode waktu, biasanya satu tahun. Angka ini merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi di suatu daerah. Konsumsi listrik perkapita di Provinsi menunjukkan peningkatan dari sebesar 2530 kwh/kapita pada tahun 2022 menjadi sebesar 2834 kwh/kapita pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan ada kenaikan konsumsi listrik perkapita di Provinsi Kepulauan Riau.

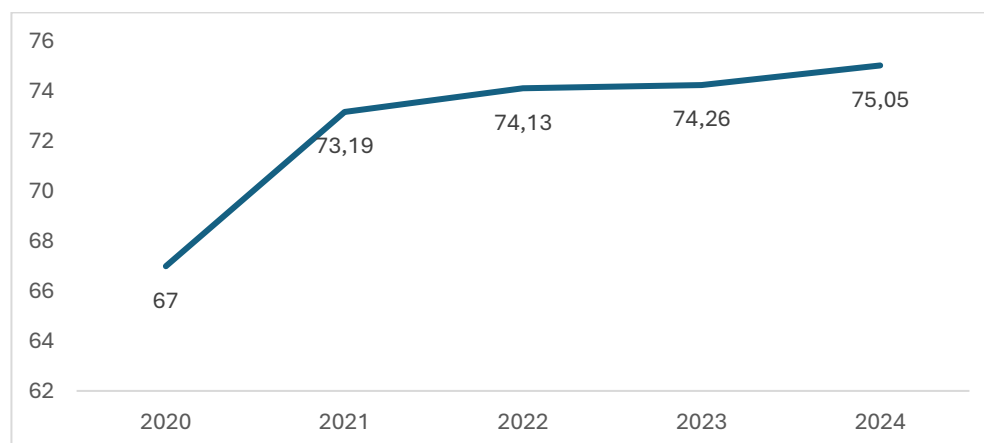
D. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengukur daya dukung lingkungan dan intervensi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan/mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang

baik. Lebih lanjut, IKLH digunakan untuk menciptakan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini menurut *United Nation*, pembangunan lingkungan yang baik dengan mengusung konsep keberlanjutan penting untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan potensi lingkungan yang ada dengan meminimalisir risiko yang terjadi.

IKLH merupakan perpaduan dari konsep *Environmental Quality Indeks* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan empat komponen penilaian, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Indeks kualitas air merupakan indeks yang menilai kualitas air terhadap pencemaran polutan berbahaya. Indeks ini dihitung menggunakan korelasi negatif dengan Indeks Pencemaran (IP). Kemudian, indeks kualitas udara merupakan indeks yang mengukur seberapa banyak kandungan polutan berupa nitrogen dioksida (NO_2) dan sulfur dioksida (SO_2) terkandung. Indeks kualitas lahan mengukur sejauh mana tutupan vegetasi yang disandingkan dengan proporsi wilayah ideal. Lebih lanjut, indeks kualitas air laut merupakan indeks yang mengukur seberapa banyak TSS (*Total Suspended Solid*), DO (*Oxygen Demand*), minyak lemak, amonia total, dan orto fosfat yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas air laut.



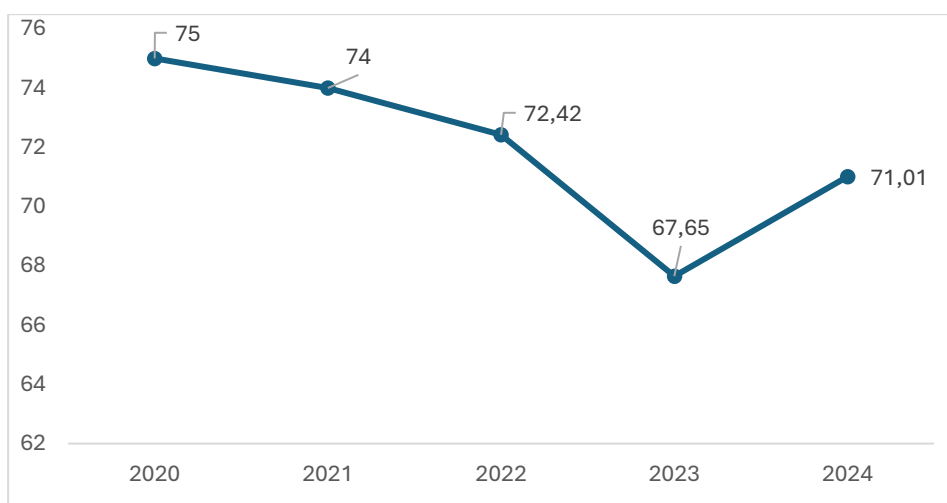
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2025)

**Gambar 2.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024**

Grafik tersebut menggambarkan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara umum, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif hingga kenaikan 8,05 poin jika menyandingkan data antara tahun 2020 dengan tahun 2024. IKLH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 75,05, angka ini jauh lebih tinggi jika disandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional yang hanya mencapai angka 72,87. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melakukan pembangunan yang memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Persentase Sampah Tertangani

Pengelolaan sampah ditunjukkan dengan kinerja indikator Persentase penanganan sampah pada tahun 2024 sudah mencapai 71,01%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan ke-11 pada SDG's yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.8 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2020-2024

3. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi Kepulauan Riau meningkat dari sebesar 5,44% pada tahun 2023 menjadi sebesar 6,6% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan capaian masih relatif rendah, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan program kedepan.

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 11,68% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan capaian Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah masih rendah, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan program kedepan. Sementara itu Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah telah mencapai 84,76% pada tahun 2024.

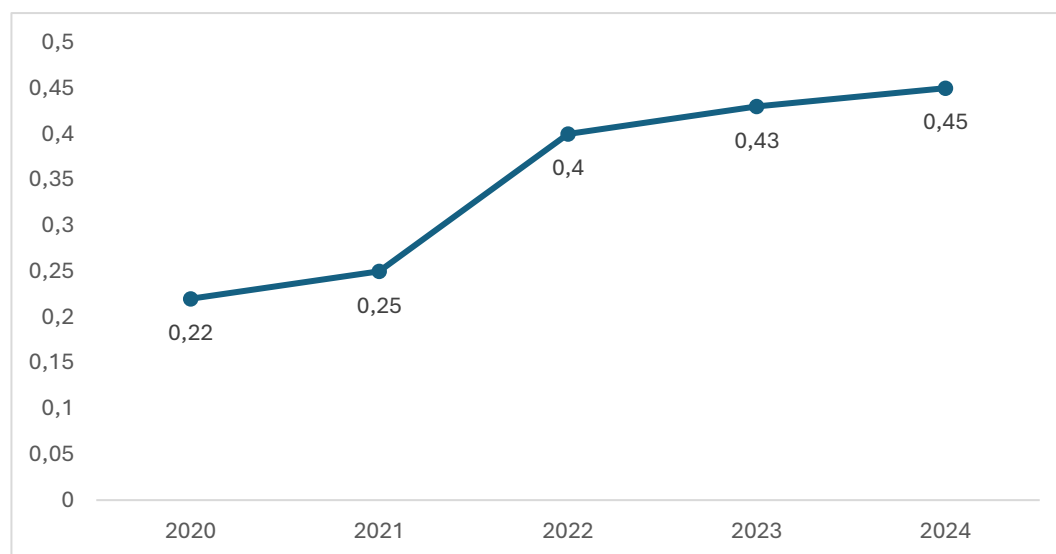
E. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indeks yang mengukur kapasitas suatu wilayah dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun Provinsi. IKD merupakan salah satu elemen yang turut diperhitungkan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) selain kerentanan dan ancaman bencana. Semakin tinggi skor IKD di suatu daerah maka semakin tinggi kapasitas kebencanaan daerah, sedangkan skor IRBI-nya akan semakin rendah. Dalam konteks pembangunan, IKD perlu diperhatikan karena kapasitas kebencanaan daerah yang tidak mumpuni dan tidak adanya upaya untuk mengurangi potensi kerugian bencana di masa mendatang dapat mengganggu hasil pembangunan. IKD diukur melalui 71 indikator, 16 sasaran aksi, dan 7 prioritas yaitu 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3)

pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, 4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta 7) pengembangan sistem pemulihan bencana.

Secara umum, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kepulauan Riau memiliki tren positif atau meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Provinsi Kepulauan Riau memperoleh skor 0,22 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,45 pada tahun 2024. Nilai IKD berada pada rentang 0 - 1 dengan pembagian yaitu indeks lebih kecil dari 0,4 dinyatakan rendah, hasil indeks berada pada rentang 0,4 - 0,8 tergolong sedang, dan skor 0,8 - 1 termasuk kategori tinggi. Berdasarkan kategori tersebut, IKD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 berada pada kategori sedang.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

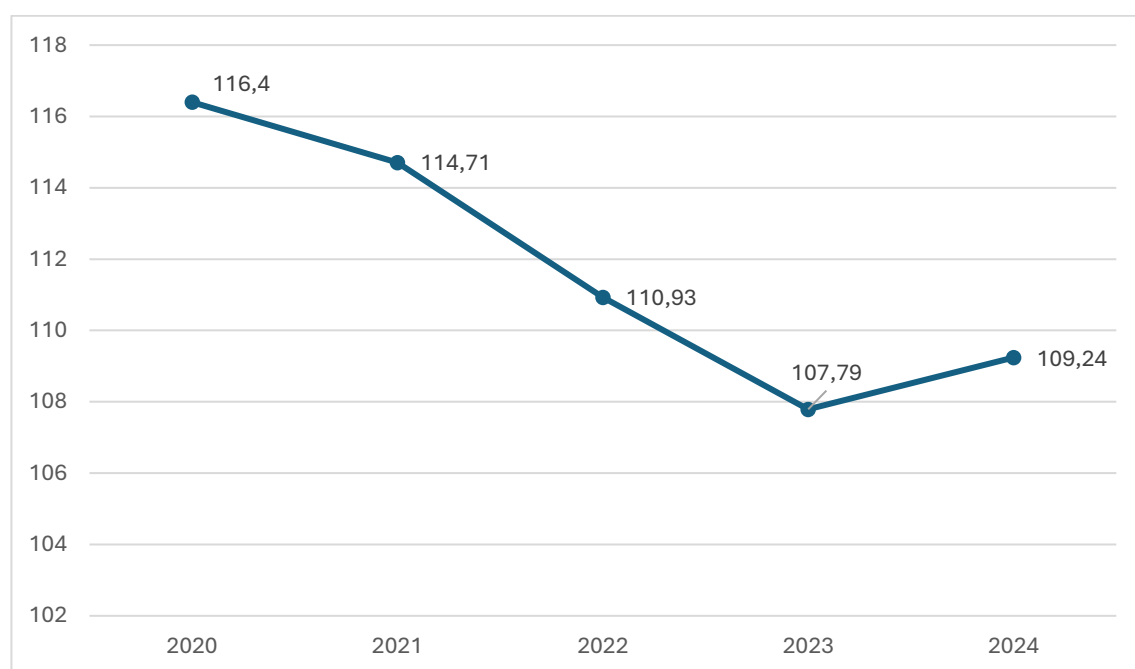
Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana perlu diukur untuk mengetahui perbandingan risiko bencana antar wilayah. Indikator perhitungan tingkat risiko bencana dilakukan dengan mempertimbangkan bahaya (*hazard*),

kapasitas (*capacity*), dan kerentanan (*vulnerability*). Indeks Risiko Bencana juga memperhitungkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta risiko korban jiwa yang terpapar. Dari ketiga komponen tersebut, komponen bahaya dan kerentanan cenderung sulit diturunkan atau meningkat setiap tahunnya karena probabilitas bencana ataupun peningkatan migrasi dan jumlah penduduk.

Selama kurun waktu 2020-2024 Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 116,4 pada tahun 2020 menjadi sebesar 109,24 pada tahun 2024. Gambaran perkembangan IRB terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.10 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

3. Wilayah Rawan Bencana

Telaah mengenai wilayah rawan bencana Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari data yang tersedia mengenai bencana yang terjadi di masa lalu, hasil kajian bencana, bencana yang tengah berlangsung, bencana yang tidak tercatat dalam sejarah sebelumnya. Berdasarkan catatan kejadian

bencana oleh Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) jenis potensi bencana yang memiliki kemungkinan untuk terjadi kembali. Potensi bencana di Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko menjadi subjek dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi.

1) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan kejadian terbakarnya banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput di suatu wilayah yang dapat disebabkan oleh faktor alam (kekeringan, maupun sambaran petir) atau ulah manusia (membuang puntung rokok dan pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru). Berlandaskan kajian terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan, luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan total sebesar 598.094 hektar (Tinggi). Berdasarkan luas, wilayah dengan potensi bahaya Karhutla terbesar adalah Kabupaten Lingga dengan luas 185.513 hektar. Sedangkan berdasarkan kelas, mayoritas wilayah berkategori Sedang, Kabupaten Natuna yang berkategori Tinggi. Rincian tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	3.070	Sedang
2	Kabupaten Bintan	90.364	Sedang
3	Kota Batam	37.900	Sedang
4	Kabupaten Karimun	54.399	Sedang
5	Kabupaten Lingga	185.513	Sedang
6	Kabupaten Natuna	179.885	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.962	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	598.094	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Kebakaran hutan di Kepulauan Riau dipicu oleh beberapa faktor, baik yang bersifat alami maupun akibat ulah manusia. Faktor alami seperti petir dan gesekan pohon, sementara faktor manusia meliputi pembukaan lahan dengan cara membakar, sisa aktivitas di hutan.

2) Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan kondisi bencana yang disebabkan oleh kekeliruan desain, operasional, kelalaian maupun kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Total luas wilayah yang memiliki potensi terdampak dari kegagalan teknologi sebesar 25.967 hektar dengan kelas bahaya secara keseluruhan Rendah.

Tabel 2.11 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	8.674	Rendah
3	Kota Batam	10.893	Rendah
4	Kabupaten Karimun	4.014	Rendah
5	Kabupaten Lingga	378	Rendah
6	Kabupaten Natuna	1.485	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	523	Rendah
	Provinsi Kepulauan Riau	25.967	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

3) Tanah Longsor

Tanah longsor ditandai dengan kemiringan lereng yang curam atau landai menurut sudut tertentu, pegunungan, hingga tebing pantai atau di dasar laut. Hal ini dapat dipicu oleh peristiwa seperti hujan lebat, gempa bumi, lereng miring untuk pembangunan jalan, abrasi, dan lainnya. Luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang rentan terhadap bahaya tanah longsor ditentukan berdasarkan kajian kelas bahaya maksimum pada masing-masing Kabupaten/Kota yang terdampak tanah longsor. Secara keseluruhan luas bahaya tersebut sebesar 169.062

hektar dengan kelas pada kategori Tinggi. Lebih lanjut data tersebut dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.12 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	10.348	Sedang
3	Kota Batam	10.281	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	13.828	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	58.371	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	26.355	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	49.879	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	169.062	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

Tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Kepulauan Riau berada di antara tiga lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

4) Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan yang rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi menghadapi banjir, terutama pada kawasan tangkapan air dengan daerah resapan air yang mengalami kerusakan lingkungan (pengalihan fungsi lahan), seperti reklamasi dan wilayah drainase yang kurang berfungsi dengan baik. Maka sungai yang tidak lagi mampu menampung jumlah aliran permukaan akan meluap dari badan sungai dan menyebabkan banjir. Total keseluruhan luas wilayah yang memiliki potensi dan rentan bahaya banjir sebesar 199.735 hektar dan berkategori kelas Tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	6.070	Sedang
2	Kabupaten Bintan	44.051	Tinggi
3	Kota Batam	20.970	Sedang
4	Kabupaten Karimun	24.644	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	43.379	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	60.028	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	594	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	199.735	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Pada sisi lain, total wilayah yang berpotensi atau rentan mengalami banjir bandang seluas 6.771 hektar. Luas wilayah yang berpotensi atau rentan terhadap banjir bandang ditetapkan melalui perhitungan total luas bahaya pada seluruh kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang. Selain itu kelas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan melalui kelas bahaya maksimum pada masing-masing wilayah. Rincian tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.14 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	-	-
3	Kota Batam	-	-
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	-	-
6	Kabupaten Natuna	6.687	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	85	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	6.771	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

Banjir di Kepulauan Riau dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan, perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu dan pola hujan yang tidak teratur, dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko bencana.

5) Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi yang diakibatkan oleh dilepaskannya energi di dalam bumi secara tiba-tiba, hal ini ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang terakumulasi dipancarkan ke seluruh arah berupa gelombang gempa bumi dan dapat dirasakan dampaknya pada permukaan bumi. Luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan potensi bahaya gempa bumi secara keseluruhan berjumlah 815.842 hektar dengan kelas pada tingkatan Rendah. Perhitungan ini dihasilkan dari total luas bahaya per kabupaten dan kota, serta kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak dengan gempa bumi. Rincian luas dan kelas potensi bahaya gempa bumi masing-masing sebagai berikut.

Tabel 2.15 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.456	Rendah
2	Kabupaten Bintan	131.821	Rendah
3	Kota Batam	96.025	Rendah
4	Kabupaten Karimun	91.275	Rendah
5	Kabupaten Lingga	222.347	Rendah
6	Kabupaten Natuna	200.904	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	59.014	Rendah
	Provinsi Kepulauan Riau	815.842	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

6) Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan memaparkan ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 hektar dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.16 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.456	Sedang
2	Kabupaten Bintan	131.821	Tinggi
3	Kota Batam	96.025	Sedang
4	Kabupaten Karimun	91.275	Sedang
5	Kabupaten Lingga	222.347	Sedang
6	Kabupaten Natuna	200.904	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	59.014	Sedang
	Provinsi Kepulauan Riau	815.842	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

7) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 105.373 hektar dengan status kelas bahaya yang tinggi.

Tabel 2.17 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	1.332	Rendah
2	Kabupaten Bintan	13.777	Rendah
3	Kota Batam	17.168	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	13.980	Rendah
5	Kabupaten Lingga	29.669	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	14.163	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	15.284	Tinggi
	Provinsi Kepulauan Riau	105.373	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

8) Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum yang terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 674.852 hektar dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.18 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	13.691	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	129.179	Tinggi
3	Kota Batam	90.355	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	81.880	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	222.347	Sedang
6	Kabupaten Natuna	78.859	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	58.541	Rendah
	Provinsi Kepulauan Riau	674.852	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

4. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi GRK di Provinsi Kepulauan Riau secara kumulatif menunjukkan penurunan dari sebesar 2,71% pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,54% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 data belum tersedia. Rinciannya perkembangan penurunan emisi GRK terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19 Penurunan Intensitas Emisi GRK di Provinsi Kepulauan Riau

Penurunan Intensitas Emisi GRK	Satuan	2020	2021	2022	2023
a. Kumulatif	%	2,71	2,51	2,54	2,54
b. Tahunan	%	0.02	0,03	2,93	2,93

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2024)

F. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah

penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kependudukan itu sendiri menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.064.564 jiwa dan tahun 2024 sebanyak 2.183.300 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir sebagai berikut pada tabel di bawah.

Tabel 2.20 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

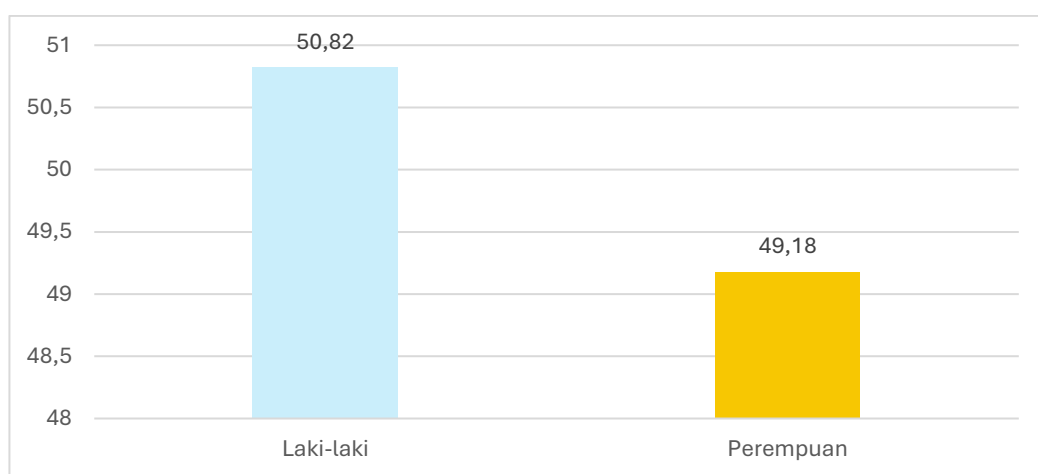
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tanjungpinang	227.663	233.370	239.850	234.840	237.400
Kabupaten Bintan	159.518	162.560	165.780	165.890	168.200
Kota Batam	1.196.396	1.230.100	1.269.410	1.256.610	1.276.900
Kabupaten Karimun	253.457	259.450	266.180	260.600	263.300
Kabupaten Lingga	98.633	100.660	102.850	101.030	102.000
Kabupaten Natuna	81.495	83.360	85.450	84.560	85.700
Kabupaten Kepulauan Anambas	47.402	48.740	50.300	49.090	49.700
Provinsi Kepulauan Riau	2.064.564	2.118.240	2.179.820	2.152.630	2.183.300

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Berdasarkan tabel di atas, tren penduduk Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir fluktuatif cenderung meningkat. Jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 2.183.300 jiwa. Mayoritas penduduk berlokasi di Kota Batam, mengingat bahwa wilayah Kota Batam menjadi pusat destinasi wisata maupun kegiatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan hanya sebanyak 49.090 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di

wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa angka kelahiran maupun migrasi seiring waktu semakin meningkat.

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 50,82%, sedangkan persentase penduduk perempuan sebesar 49,18%. Rasio jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 103,34. Perbandingan persentase penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Perempuan sebagai setengah populasi penduduk memiliki potensi signifikan sebagai penggerak pembangunan di berbagai sektor. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut kelompok umur berdasarkan jenis kelamin, sesuai data penduduk tahun 2024 usia produktif pada laki-laki sebesar 69,42% dan perempuan sebesar 69,83%, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki - laki	Perempuan
65+ Tahun (tidak produktif)	4,38%	4,38%
0-14 Tahun (tidak produktif)	26,20%	25,79%
15-64 Tahun (produktif)	69,42%	69,83%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) dalam suatu wilayah. Rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 43,63%.

Pada penduduk umur 10 tahun keatas, persentase penduduk yang belum kawin paling banyak laki-laki sebesar 50,86%, sedangkan perempuan sebesar 45,10%. Sementara penduduk umur 10 tahun keatas yang kawin, cerai hidup dan cerai mati paling besar perempuan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2024

Status Perkawinan	Laki - laki	Perempuan
Belum kawin	50,86%	45,10%
Kawin	47,24%	48,58%
Cerai hidup	0,50%	1,41%
Cerai mati	1,40%	4,91%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Kepala Rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Terdapat sebanyak 8,96% kepala rumah tangga perempuan di wilayah perkotaan dan 8,43% di wilayah perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam rangka perumusan kebijakan dalam pembangunan daerah, utamanya terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 2.23 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2024

Wilayah	Laki - laki	Perempuan
Perkotaan	91,04%	8,96%
Perdesaan	91,57%	8,43%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Laju pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,49%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,51%. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terendah adalah Kabupaten Lingga dan tertinggi Kota Batam. Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	1,72	1,77	2,83	1,11	1,10
Bintan	1,11	1,43	2,23	1,47	1,45
Natuna	1,62	1,72	2,74	1,39	1,37
Lingga	1,31	1,54	2,44	1,02	1,01
Kepulauan Anambas	2,32	2,1	3,45	1,38	1,36
Kota Batam	2,32	2,11	3,44	1,72	1,69
Kota Tanjungpinang	1,9	1,87	3,02	1,17	1,15
Kepulauan Riau	2,02	1,94	3,15	1,51	1,49

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Kepadatan penduduk Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 fluktuatif , cenderung meningkat. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 sebesar 264/km², sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau secara rinci terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25 Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (/km²)

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	278	284	286	280	283
Bintan	121	123	126	126	128
Natuna	41	41	43	42	43
Lingga	44	44	47	46	46
Kepulauan Anambas	80	83	80	78	79
Kota Batam	1246	1281	1227	1214	1234
Kota Tanjungpinang	1575	1614	1595	1562	1579
Kepulauan Riau	252	258	264	260	264

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Proyeksi penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Proyeksi penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 (Ribuan Jiwa)

Wilayah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kepulauan Riau	2.213,46	2.243,11	2.272,18	2.300,65	2.328,53	2.355,82
Karimun	266,01	268,59	271,07	273,43	275,68	277,81
Bintan	170,46	172,66	174,81	176,90	178,94	180,92
Natuna	86,76	87,83	88,88	89,92	90,92	91,92
Lingga	102,95	103,88	104,77	105,66	106,51	107,32
Anambas	50,36	50,98	51,58	52,16	52,74	53,29
Batam	1.296,96	1.316,74	1.336,25	1.355,44	1.374,37	1.393,03
Tanjungpinang	239,96	242,42	244,82	247,15	249,39	251,54

Sumber: RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (diolah).

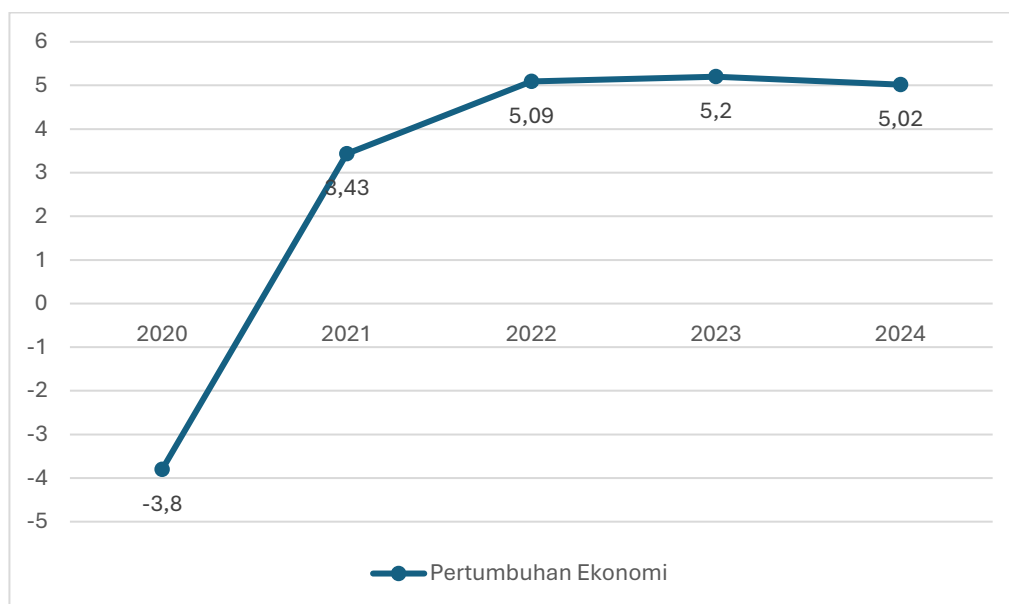
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 capaian pertumbuhan ekonomi terendah yakni sebesar -3,8%. Capaian

tersebut karena adanya permasalahan global berupa Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelumpuhan ekonomi di seluruh tingkatan pemerintah. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir yakni 2020-2023 pertumbuhan ekonomi perlahan membaik dan mengalami tren positif dengan capaian sebesar 5,2% pada tahun 2023 sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tersebut menunjukkan diperlukannya upaya pemerintah yang menyeluruh dan konsisten untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang terdapat di Kepulauan Riau. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2024 terlihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

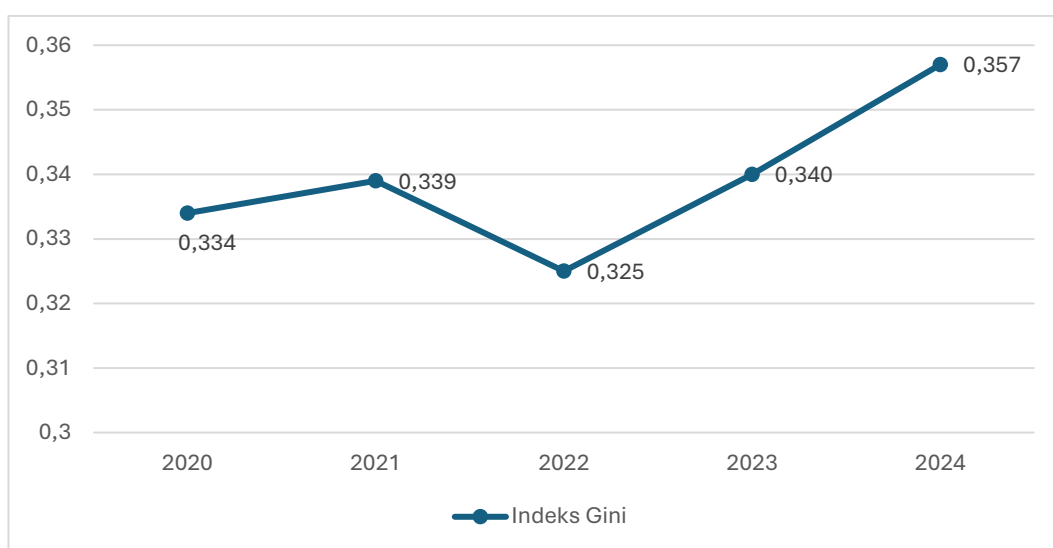
Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (%)

2. Indeks Gini

Selain inflasi, indikator lain yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi sebuah wilayah adalah Indeks Gini. Menurut Bank Dunia, Indeks Gini mengukur sejauh mana penyimpangan distribusi pemasukan (bisa juga pengeluaran konsumsi) sebuah individu/rumah tangga, dari distribusi yang seimbang secara sempurna. Indeks Gini nilai "0"

menunjukkan distribusi yang seimbang secara sempurna, sementara Indeks Gini nilai “1” menunjukkan ketimpangan sempurna.

Dari grafik di bawah, tampak bahwa Indeks Gini dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,357 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,340. Meski begitu, secara umum capaian ini masih tergolong cukup baik dibandingkan dengan rata-rata Indeks Gini nasional.



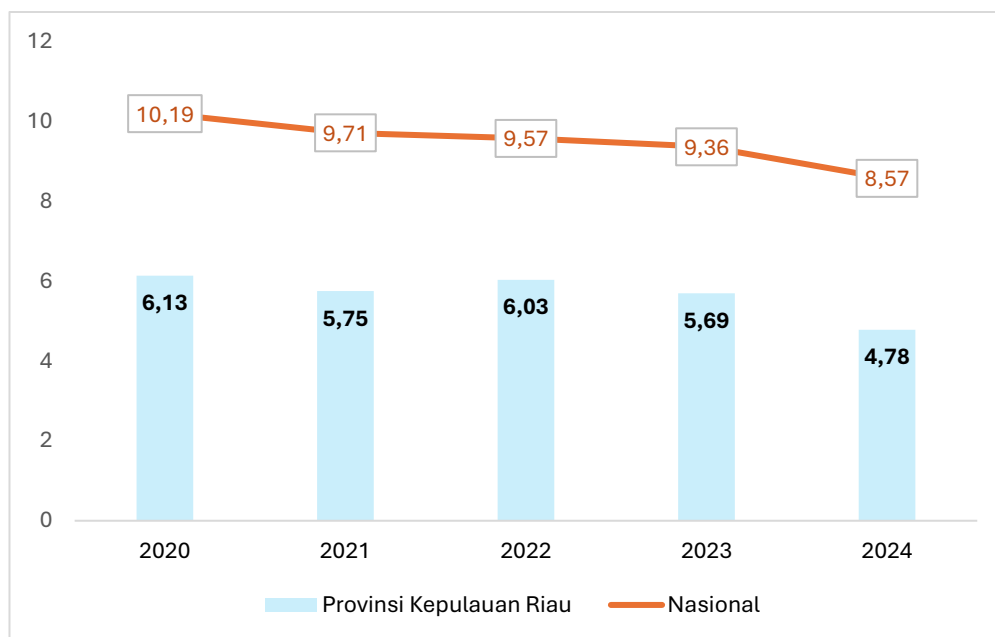
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.13 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

3. Angka Kemiskinan

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Secara umum kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020-2024 menurun. Selain itu, persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan tren cukup positif dengan selalu berada di bawah persentase jumlah penduduk miskin nasional.



Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Gambar 2.14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024 (Maret dan September) (%)

Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebesar 4,78%, menurun 0,91% poin dibanding tahun 2023 sebesar 5,69%. Angka tersebut di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 8,57%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban penduduk miskin melalui subsidi kebutuhan pokok (pendidikan, kesehatan, pangan), dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pangan maupun non pangan agar Garis Kemiskinan (GK) stabil.

Kondisi penduduk miskin kabupaten/kota dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	6,83	6,85	6,87	5,95	5,78
Bintan	6,36	6,42	6,44	5,9	5,44
Natuna	4,43	4,95	5,32	5,25	5,04
Lingga	13,85	13,93	14,05	11,26	9,99
Kepulauan Anambas	6,56	7,09	7,51	6,95	6,67
Kota Batam	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
Kota Tanjungpinang	9,37	9,57	9,85	7,95	6,68
Kepulauan Riau	5,92	6,12	6,24	5,69	4,78

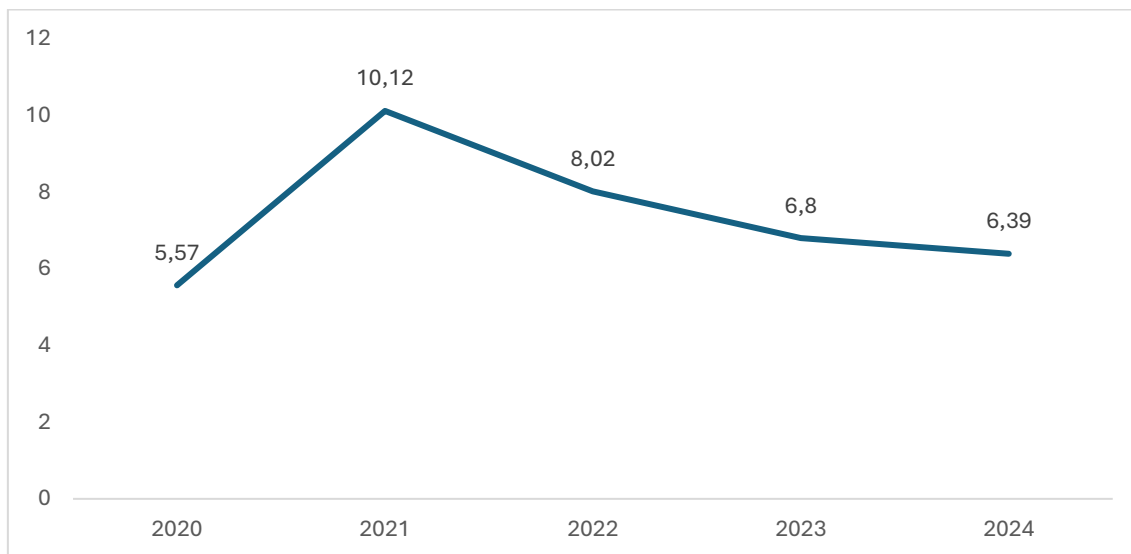
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator lain yang juga menunjukkan kesejahteraan ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini menunjukkan persentase jumlah pengangguran per 100 penduduk dalam klasifikasi angkatan kerja. Semakin kecil persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, berarti semakin baik kesejahteraan ekonomi masyarakat sebuah wilayah.

Pengangguran dibagi menjadi empat kategori, yaitu: a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

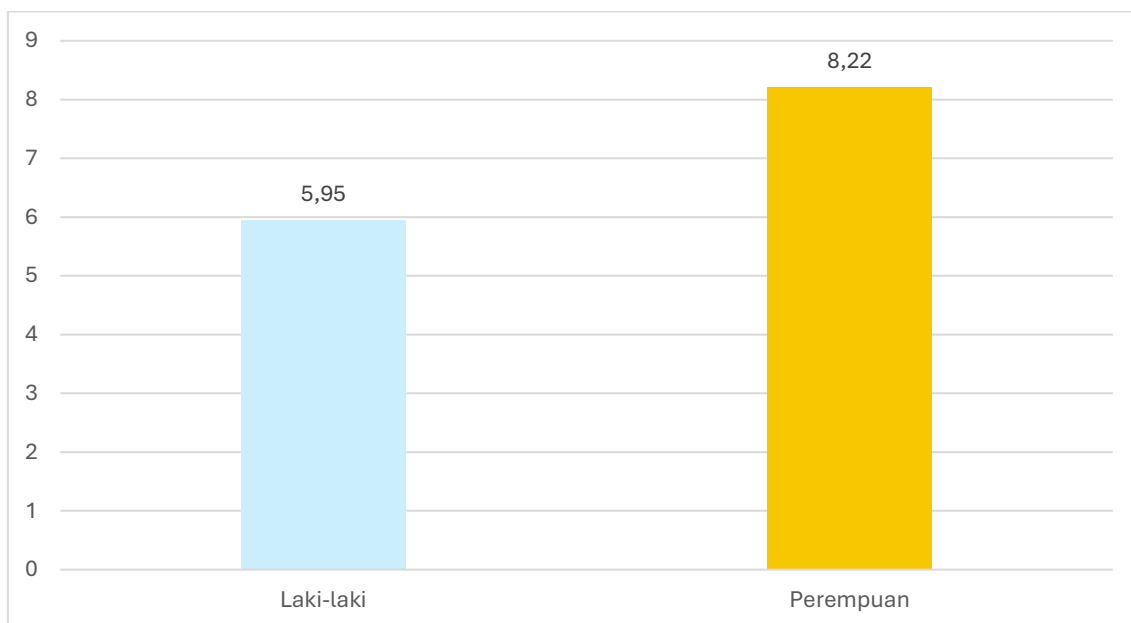
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepulauan Riau cukup fluktuatif, titik terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu di 5,57 persen dan titik tertinggi terjadi pada tahun 2021 di 10,12 persen. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,39 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.15 TPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepulauan Riau dilihat dari jenis kelamin paling besar adalah perempuan yaitu sebesar 8,22%, sedangkan laki-laki sebesar 5,95% pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

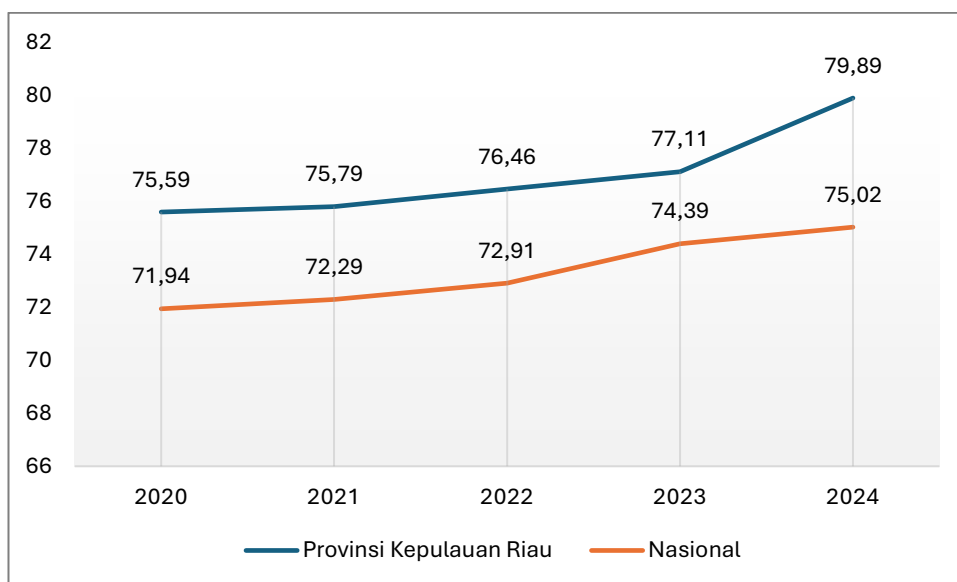


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.16 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran untuk meninjau capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. IPM diukur melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan maka digunakan angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan perhitungan tingkat pendapatan.



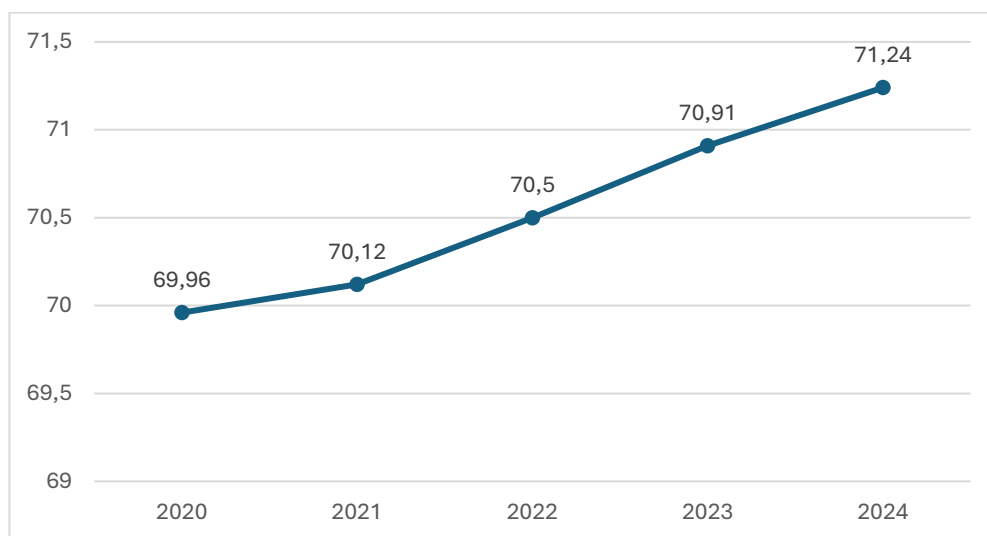
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024

Grafik di atas memperlihatkan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Selama 2020–2024, nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan IPM nasional.

B. Kesehatan Untuk Semua

Usia harapan hidup adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Usia Harapan hidup di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari 69,96 tahun menjadi 71,24 tahun, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.18 Usia Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

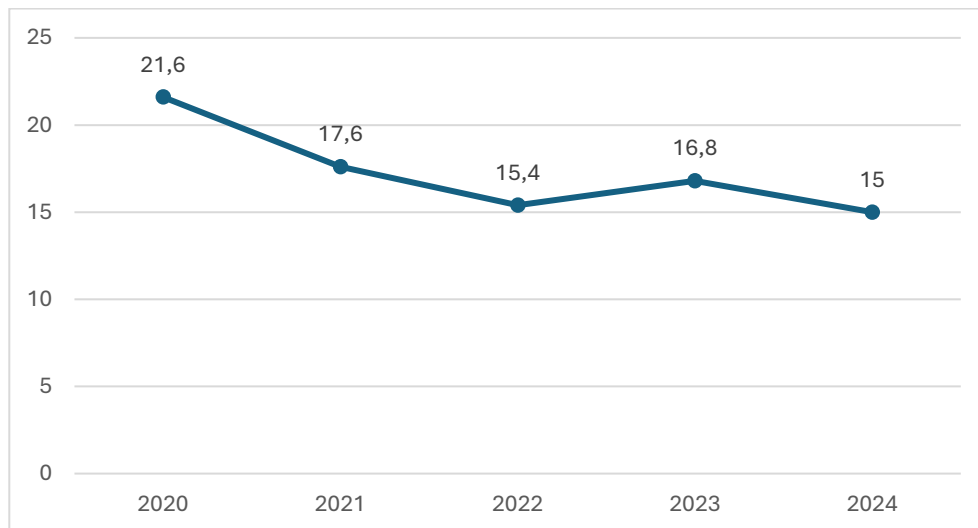
Dilihat dari jenis kelamin, angka harapan hidup penduduk perempuan sebesar 73,27 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 69,3 tahun. Usia harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan karena kombinasi faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Secara biologis, pria lebih rentan terhadap penyakit tertentu dan memiliki kadar hormon yang berbeda. Faktor lingkungan, seperti paparan polusi dan pekerjaan berisiko, serta perbedaan gaya hidup, seperti kebiasaan merokok dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan, juga berkontribusi terhadap perbedaan ini.

Tabel 2.28 Usia Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun)

Daerah	Laki-laki	Perempuan
1. Karimun	70,24	74,25
2. Bintan	69,28	73,24
3. Natuna	64,5	68,41
4. Lingga	61,88	65,68
5. Kepulauan Anambas	66,43	70,41
6. Batam	72,2	76,09
7. Tanjungpinang	71,02	75,4
Kepulauan Riau	69,3	73,27

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Prevalensi Stunting selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan. Prevalensi stunting pada tahun 2020 sebesar 21,6% pada tahun 2024 menjadi sebesar 15%. Gambaran selengkapnya perkembangan prevalensi stunting dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.19 Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus

kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi pada perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 98 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan dari 47 kasus menjadi 32 kasus. Dilihat berdasarkan kabupaten/ kota diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil mempertahankan kondisi 0 kasus kematian ibu pada 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan ada 4 (empat) kabupaten/ kota yang mengalami penurunan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Sedangkan untuk 2 (dua) kabupaten/ kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna dan Lingga mengalami kenaikan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI). Kabupaten/ kota dengan Angka Kematian Ibu (AKI) terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup (nol kasus) sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 588 per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.29 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022– 2024**

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Ibu					
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI
1	Karimun	2	61	4	129	3	109
2	Bintan	3	108	4	155	1	41
3	Natuna	1	86	2	176	2	199
4	Lingga	3	248	1	89	6	588
5	Anambas	2	252	0	0	0	0
6	Batam	22	66	30	84	17	73
7	Tanjungpinang	5	146	6	179	3	97
KEPRI		38	83 per 100.000 KH	47	98 per 100.000 KH	32	93 per 100.000 KH

**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup*

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal). Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi Masyarakat.

**Tabel 2.30 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 – 2024**

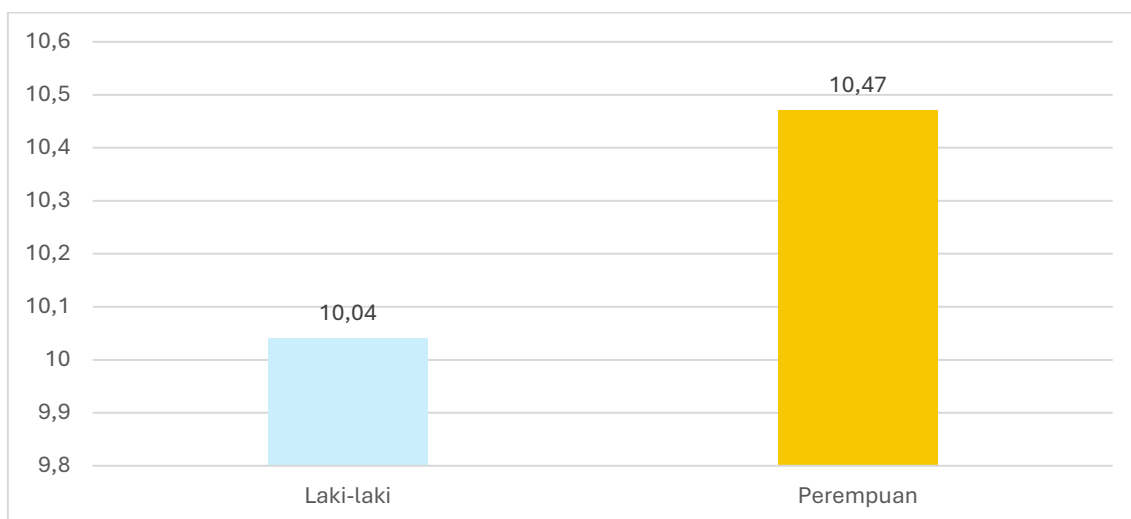
No	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi					
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB
1	Karimun	38	12	37	12	24	8,7
2	Bintan	25	9	38	15	23	9,5
3	Natuna	28	24	15	13	15	14,9
4	Lingga	14	12	14	12	22	21,6
5	Anambas	12	15	8	10	6	8,1
6	Batam	89	3	131	4	129	5,5
7	Tanjungpinang	26	8	34	10	36	11,7
KEPRI		232	5 per 1.000 KH	277	6 per 1.000 KH	255	7,4 per 1.000 KH
ESTIMASI		-	10 per 1.000 KH	-	12 per 1.000 KH	-	-

*Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 6 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan dari 277 kasus menjadi 255 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya penurunan data sasaran dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari tahun sebelumnya, data yang digunakan adalah data riil masing-masing puskesmas, meningkatnya capaian KB Aktif dan adanya penurunan sasaran ibu bersalin sehingga mempengaruhi jumlah bayi baru lahir. Dilihat berdasarkan kabupaten/ kota diketahui bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/ kota yang mengalami penurunan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, dan Kepulauan Anambas. Sedangkan untuk 3 (tiga) kabupaten/ kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kota Batam mengalami penurunan jumlah kematian bayi tapi Angka Kematian Bayi

(AKB) naik sedikit dibandingkan tahun 2023. Kabupaten/ kota dengan Angka Kematian Bayi (AKB) terendah yaitu Kota Batam sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 21,6 per 1.000 kelahiran hidup.

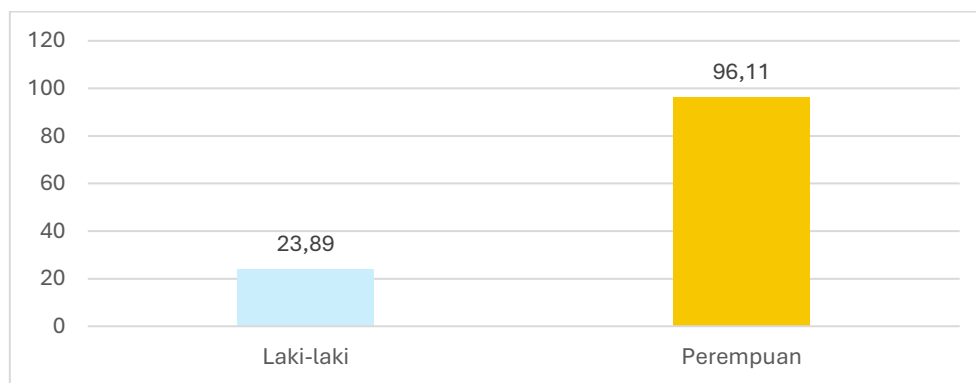
Angka kesakitan mengacu pada proporsi atau persentase individu dalam suatu populasi yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit pada periode waktu tertentu. Angka kesakitan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data Susenas Maret 2024, untuk laki-laki sebesar 10,04%, sedangkan perempuan sebesar 10,47% pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.20 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kepemilikan jaminan Kesehatan sangat penting dalam pelayanan Kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data Susenas Maret 2024, untuk laki-laki sebesar 23,89%, sedangkan perempuan sebesar 96,11% pada tahun 2024. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat ada kesenjangan dalam kepemilikan jaminan Kesehatan. Kepemilikan jaminan Kesehatan menurut jenis kelamin terlihat pada gambar berikut.



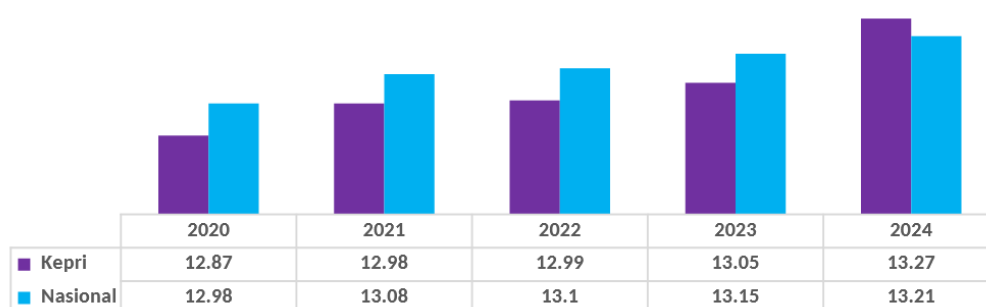
Sumber: Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.21 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, 2024

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Harapan Lama Sekolah

Selama kurun waktu 2020-2024 Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan 3,11 persen dari sebesar 12,87 tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,27 tahun pada tahun 2024. Pencapaian kinerja Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 lebih tinggi dari capaian kinerja Harapan Lama Sekolah secara nasional. Berikut Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.22 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 untuk laki-laki sebesar 13,05 tahun dan perempuan sebesar 13,56

tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki.

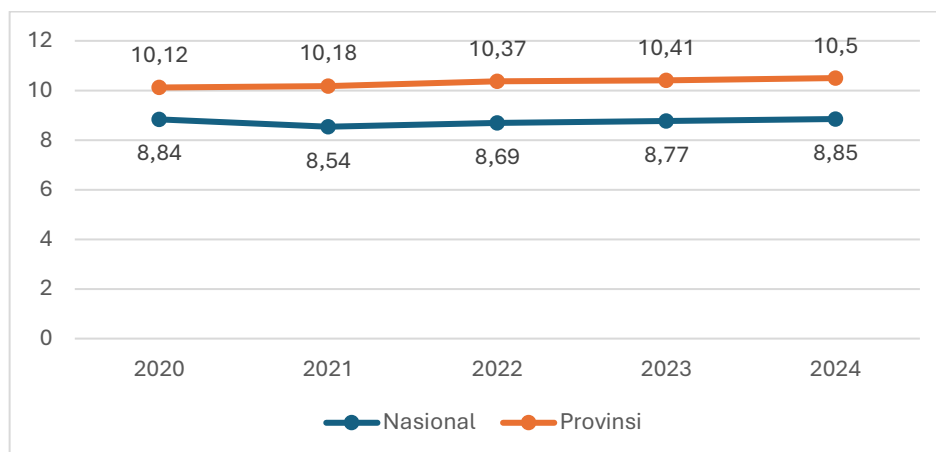
Tabel 2.31 Harapan Lama Sekolah Per Jenis Kelamin

Daerah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Laki-laki	Perempuan
1. Karimun	12,56	12,95
2. Bintan	13,34	14,19
3. Natuna	13,80	14,03
4. Lingga	12,92	12,63
5. Kepulauan Anambas	13,00	13,32
6. Batam	13,25	13,63
7. Tanjungpinang	14,18	14,63
Kepulauan Riau	13,05	13,56

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

2. Rata-rata Lama Sekolah

Capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan 3,75% , pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 10,12 tahun dan pada tahun 2024 menjadi 10,50 tahun. Secara nasional capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau lebih baik dari capaian nasional. Berikut perkembangan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau berbanding dengan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara nasional kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 untuk laki-laki sebesar 10,63 tahun dan perempuan sebesar 10,39 tahun. Kondisi ini menunjukkan perempuan masih tertinggal dalam hal rata-rata lama sekolah.

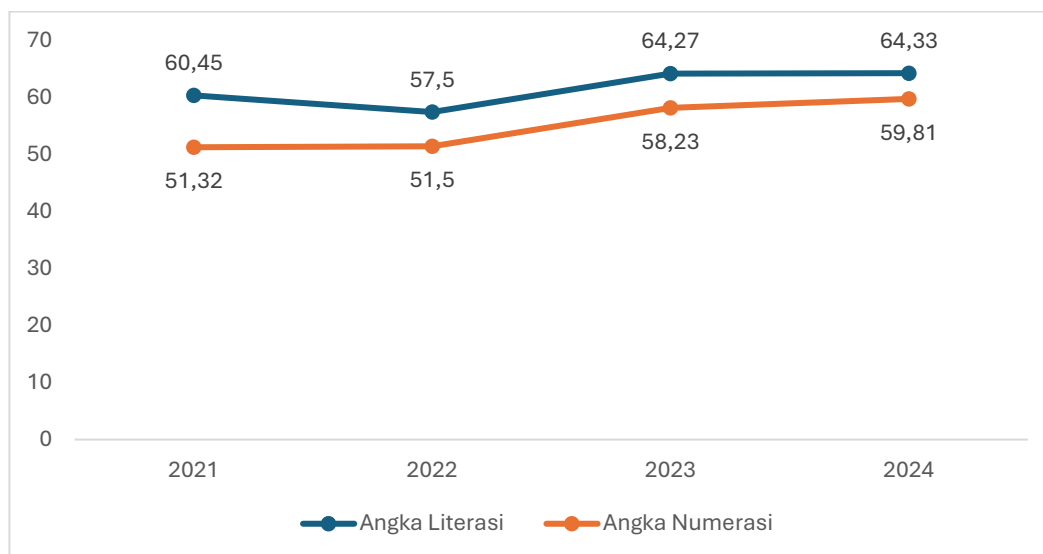
Tabel 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Per Jenis Kelamin

Daerah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Laki-laki	Perempuan
1. Karimun	9,09	8,72
2. Bintan	9,21	9,15
3. Natuna	9,65	9,12
4. Lingga	7,65	7,45
5. Kepulauan Anambas	7,83	7,49
6. Batam	11,39	11,08
7. Tanjungpinang	10,85	10,66
Kepulauan Riau	10,63	10,39

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

3. Angka literasi dan Numerasi

Angka literasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari 60,45 pada tahun 2021 menjadi 64,33 pada tahun 2024. Angka Numerasi juga meningkat dari 51,32 pada tahun 2021 menjadi 59,81 pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.24 Perkembangan Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi kesejahteraan di daerah dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seorang individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang disebabkan suatu hambatan atau kesulitan mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial dan kebutuhan hidupnya. Hambatan tersebut dapat berupa bencana, perubahan lingkungan, kemiskinan, kecacatan, keterbelakangan. Kementerian Sosial menjelaskan bahwa terdapat 26 jenis PMKS di Indonesia.

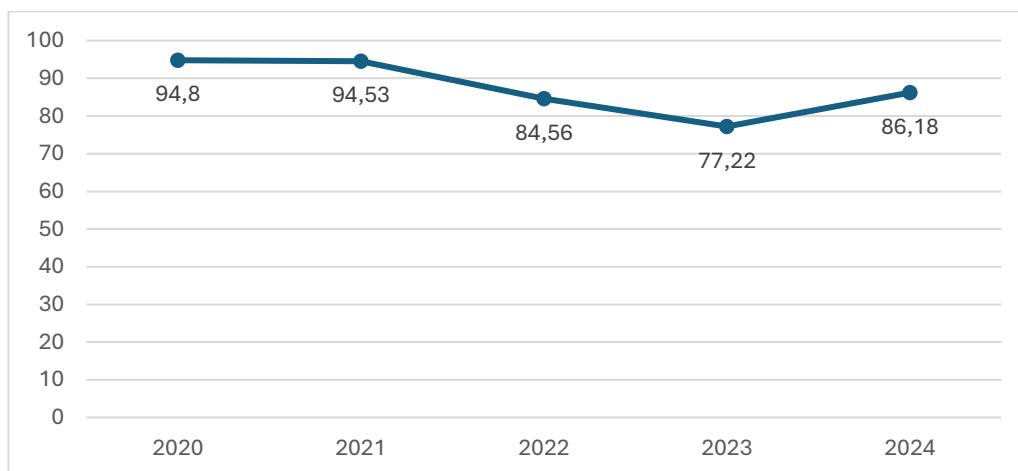
Tabel 2.33 Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia	Fakir Miskin
Kabupaten					
1. Karimun	108	1.397	456	-	85.261
2. Bintan	80	678	397	36	50.882
3. Natuna	-	399	1.225	-	26.265

Kabupaten/Kota	Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia	Fakir Miskin
4. Lingga	50	775	803	15	47.568
5. Kepulauan Anambas	-	137	583	-	15.492
Kota					
1. Batam	475	4.342	771	39	338.792
2. Tanjungpinang	285	1.811	519	13	63.632
Kepulauan Riau	998	9.539	4.754	103	627.892

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Perlindungan sosial yang adaptif ditunjukkan dengan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan perkembangan cenderung menurun dari sebesar 94,8% pada tahun 2020 menjadi sebesar 86,18% pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.25 Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (%)

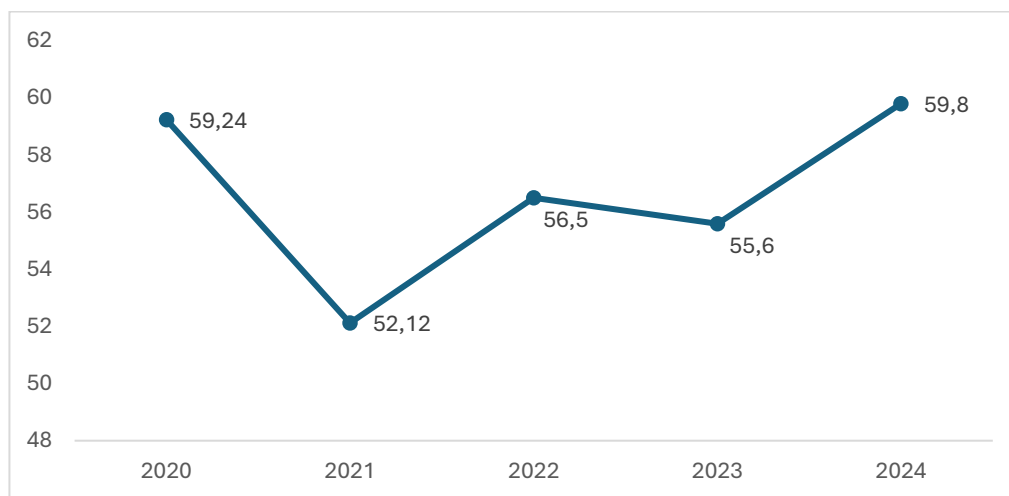
E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan kebudayaan pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan pada suatu daerah tersebut

sehingga pemerintah dapat melakukan perumusan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan terkait. Sejalan dengan hal ini, menurut UNESCO kebudayaan merupakan hal yang penting karena dapat memberikan identitas pada suatu kelompok melalui penciptaan nilai yang selaras dengan inovasi dan kreativitas.

Perhitungan IPK di Indonesia mengacu pada kerangka *Culture Development Indicators* (CDIS) yang dikembangkan oleh UNESCO. IPK terdiri atas enam dimensi yang memiliki pembobotan berbeda antar tiap dimensinya, yaitu 1) ekonomi budaya; 2) pendidikan; 3) ketahanan sosial budaya; 4) ekspresi budaya; 5) budaya literasi; 6) gender. Tujuh dimensi tersebut diturunkan ke dalam 31 indikator yang terdiri atas 12 indikator yang berasal dari data tahunan dan 19 indikator yang berasal dari data tiga tahunan. Beberapa indikator untuk mengukur IPK diantaranya, Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan; angka kesiapan sekolah; Persentase warisan budaya Takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir; dan Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki.



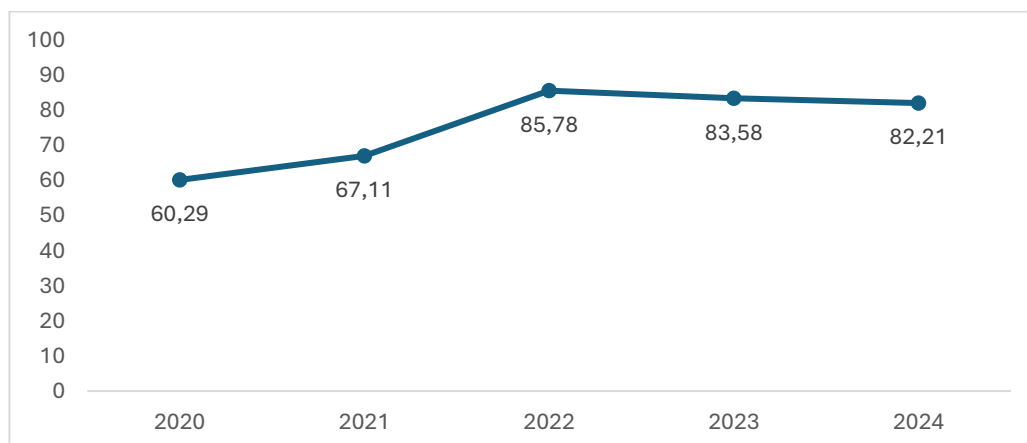
Sumber: Diolah dari Data Kemendikbud (2024)

**Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 - 2024**

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai tingkat kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia. Indeks ini penting mengingat kondisi masyarakat yang majemuk. Melalui indeks ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan identifikasi masalah dan melakukan intervensi kebijakan.

Indeks KUB Provinsi Kepulauan Riau fluktuatif cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dari sebesar 60,29 pada tahun 2020 menjadi 82,21 pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Gambar 2.27 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

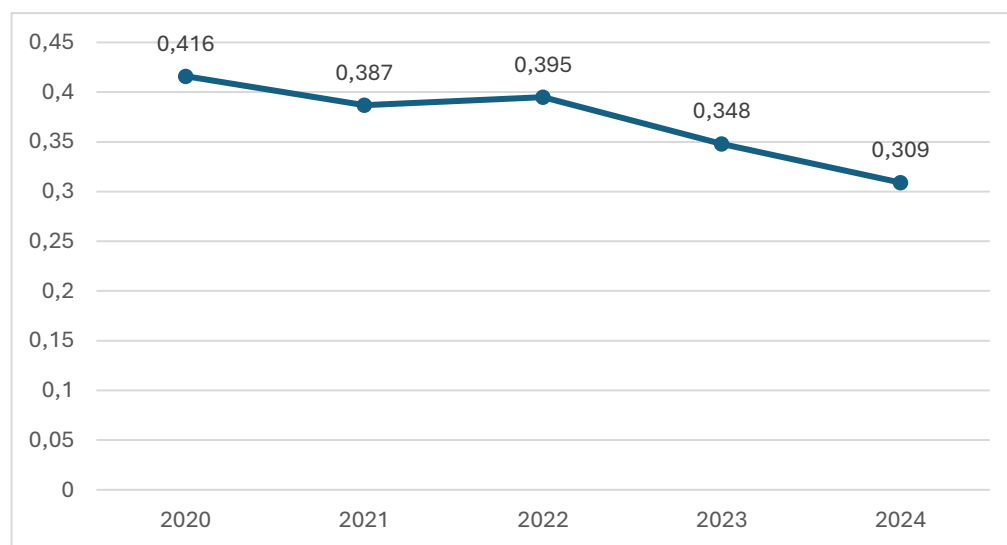
1. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender. Skala untuk menilai IKG adalah 0-1 dengan skala 1 menunjukkan ketimpangan. Dalam hal ini, IKG akan memiliki korelasi negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IKG yang rendah akan didukung dengan angka IPM, IPG, dan IDG yang tinggi. IKG memiliki indikator yang merujuk pada pengukuran *Gender Inequality Index* (GII) oleh UNDP. Menurut UNDP, GII Penting untuk diperhitungkan pada setiap negara dalam rangka upaya pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat tiga dimensi dalam pengukuran IKG yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Dalam mengukur IKG, ketiga dimensi tersebut memiliki indikator turunan. Pada dimensi kesehatan pengukuran hanya dilakukan pada penduduk perempuan dengan indikator faktor risiko kematian ibu dan bayi berupa proporsi perempuan yang pernah menikah pada usia 15-49 tahun dan melahirkan hidup tanpa menggunakan fasilitas kesehatan (*Maternal Mortality Ratio* (MTF)); dan fertilitas remaja berupa proporsi perempuan

yang pernah menikah di usia 15-49 tahun dan saat melahirkan usia anak pertama kurang dari 20 tahun (MHPK20). Kemudian dimensi pemberdayaan dihitung dari pendidikan berupa presentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan SMA ke atas; dan legislatif atau keterwakilan berupa presentase laki-laki dan perempuan yang duduk di tingkat legislatif. Lebih lanjut, dimensi pasar tenaga kerja dihitung melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berupa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

IKG Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 0,416 pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,309 pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan IKG dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.28 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 - 2024

Salah satu ketimpangan gender yang terjadi adalah ketimpangan dalam hal pendapatan yang terlihat dari rata-rata pengeluaran kepala rumah tangga menurut jenis kelamin, bahwa kepala rumah tangga laki-laki di perkotaan memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga perempuan, sedangkan pendapatan kepala rumah tangga laki-laki di

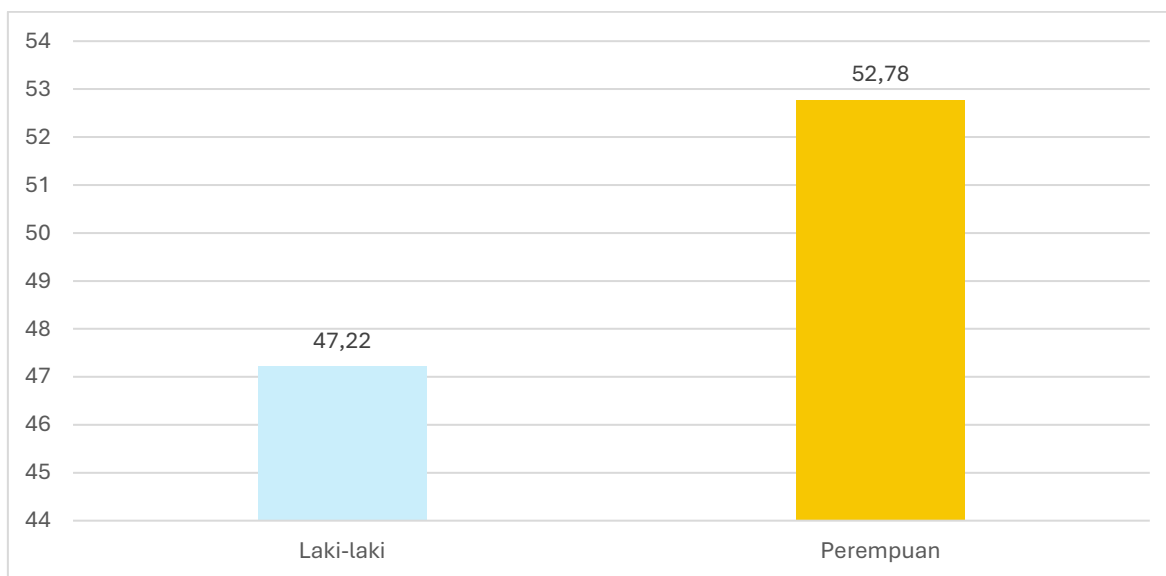
wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga perempuan.

Tabel 2.34 Rata-Rata Pengeluaran Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2024

Wilayah	Laki - laki	Perempuan
Perkotaan	2.148.363	2.757.390
Perdesaan	1.399.732	1.398.475

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Perempuan sebagai setengah populasi penduduk memiliki potensi signifikan sebagai penggerak pembangunan di berbagai sektor. Persentase PNS di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling banyak perempuan sebesar 52,78% dan laki-laki sebesar 47,22%.



Sumber: Badan Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Jumlah anggota DPRD di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi laki-laki sebesar 85,71% dan perempuan sebanyak 14,29%, seperti terlihat pada tabel berikut.

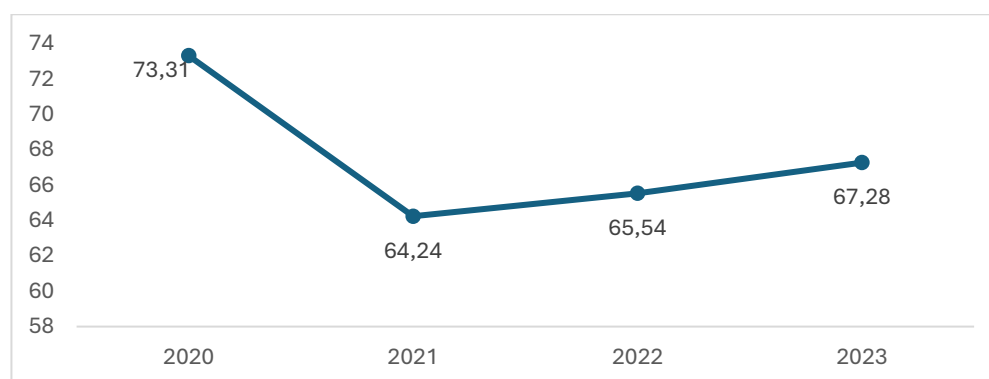
**Tabel 2.35 Jumlah Anggota DPRD di Prov. Kepri Menurut Partai Politik,
2024 Sebanyak 13% anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Berjenis Kelamin Perempuan**

Partai Politik	Laki - Laki	Perempuan
PDIP	3	-
Golkar	7	2
PKS	5	1
Nasdem	7	-
Gerindra	6	2
Demokrat	2	1
Hanura	1	-
PKB	2	-
PAN	2	-
PSI	1	-
Jumlah	36	6
Persentase (%)	85,71	14,29

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2025)

2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 73,31 menjadi 67,28 pada tahun 2023 seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian PPPA (2024)

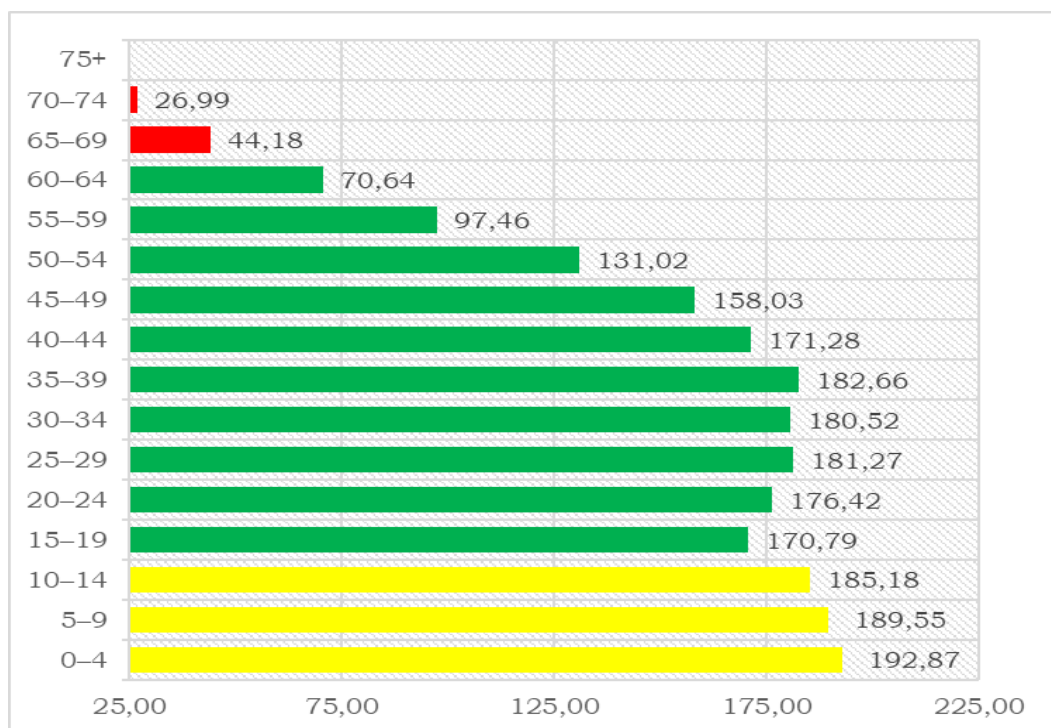
Gambar 2.29 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2023

2.1.3 Aspek Daya Saing

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merujuk pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh individu atau tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar kerja, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan suatu wilayah. Daya saing SDM antara lain dapat dilihat dari jumlah penduduk mengacu pada kelompok usia produktif yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kemajuan wilayah. Kelompok penduduk usia produktif yang didukung dengan keterampilan, pendidikan, pengetahuan, kreativitas, etika kerja, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru akan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah dan menjadi lebih kompetitif.

Angka ketergantungan menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Pada tahun 2024, jumlah penduduk kelompok usia produktif Provinsi Kepulauan Riau mencapai 1.705,27 ribu jiwa, sedangkan kelompok usia non produktif mencapai 643,47 ribu jiwa. Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 37,73 yang memberikan gambaran bahwa ada sekitar 37-38 per 100 orang usia non-produktif di Provinsi Kepulauan Riau bergantung kepada mereka yang berusia produktif. Angka ketergantungan yang semakin kecil menunjukkan bahwa jumlah anak-anak dan lansia yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin sedikit. Selain itu, angka ketergantungan yang semakin rendah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kenaikan kesejahteraan.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2024)

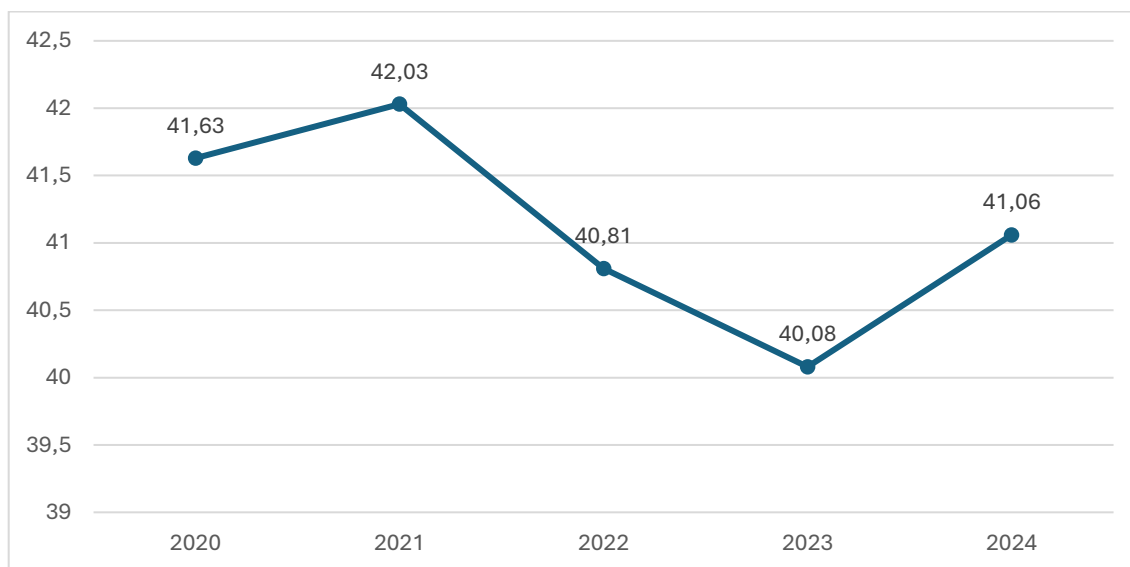
**Gambar 2.30 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024
(ribu jiwa)**

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Industri Pengolahan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB suatu daerah. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya per tahun. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan nilai PDRB yang berasal dari sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB daerah tersebut.

Upaya peningkatan PDRB pada sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum maksimal. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) rasio PDRB Industri Pengolahan fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 41,63 pada tahun 2020 menjadi sebesar 41,06 pada tahun 2024.

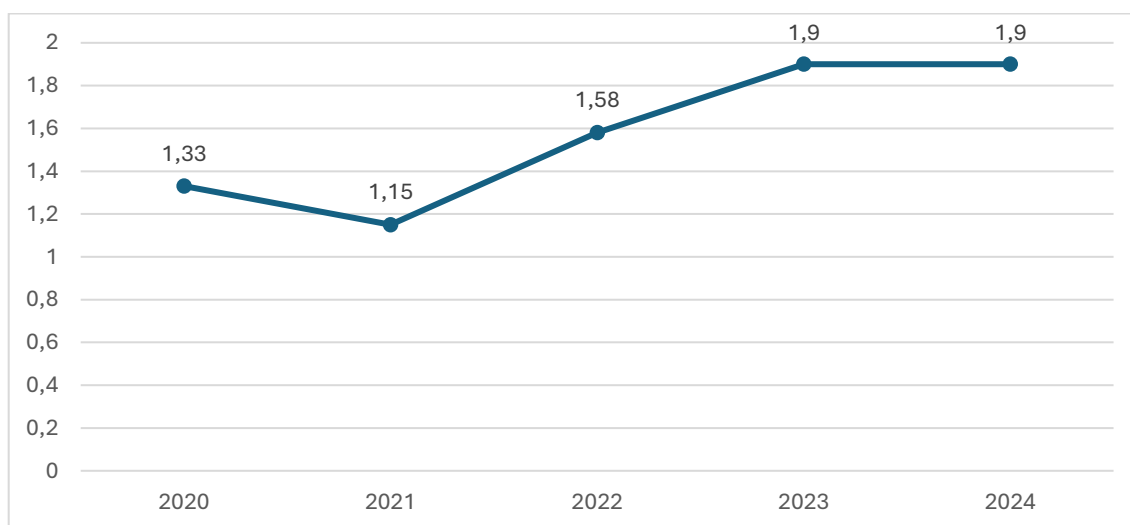


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.31 Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

2. Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum

Secara keseluruhan, rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari 1,33 pada tahun 2020 menjadi 1,9 pada tahun 2024. Gambaran perkembangan rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

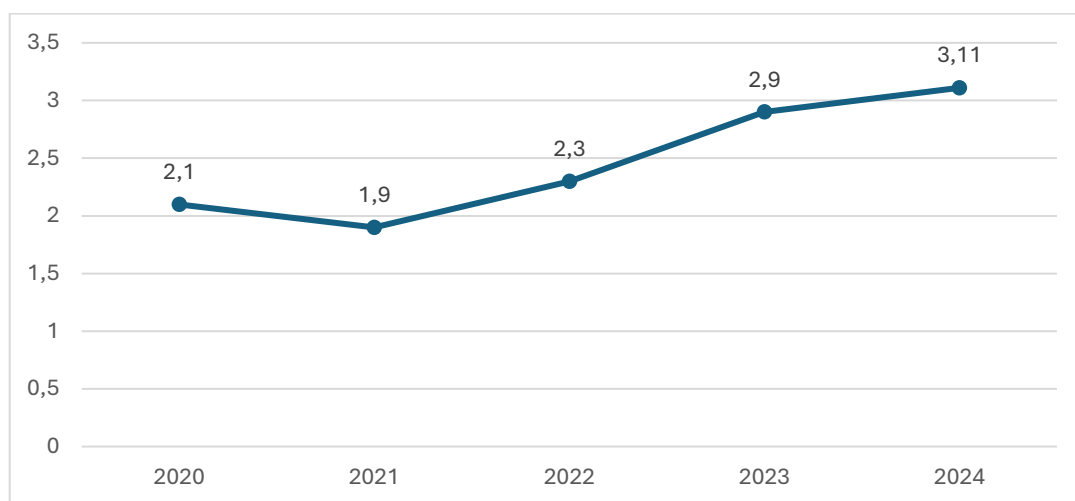


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.32 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

3. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif sepanjang periode 2020-2024, dari sebesar 2,1% pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,11% pada tahun 2024. Gambaran kinerja rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Grafik berikut.

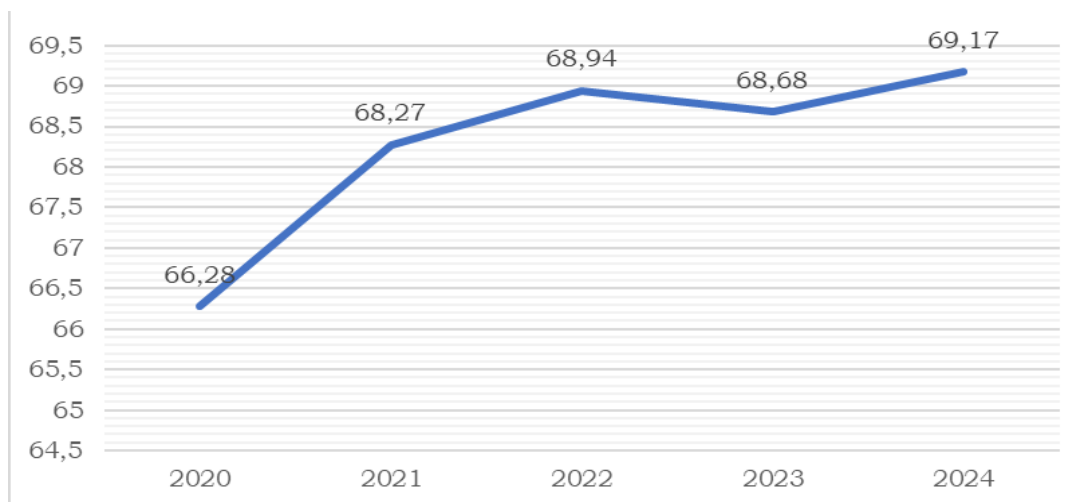


Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.33 Kinerja Indikator Rasio Kewirausahaan Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja dalam sektor produksi barang/jasa sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan. Partisipasi angkatan kerja perlu didukung oleh penciptaan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut merupakan tren tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau selama 2020-2024.

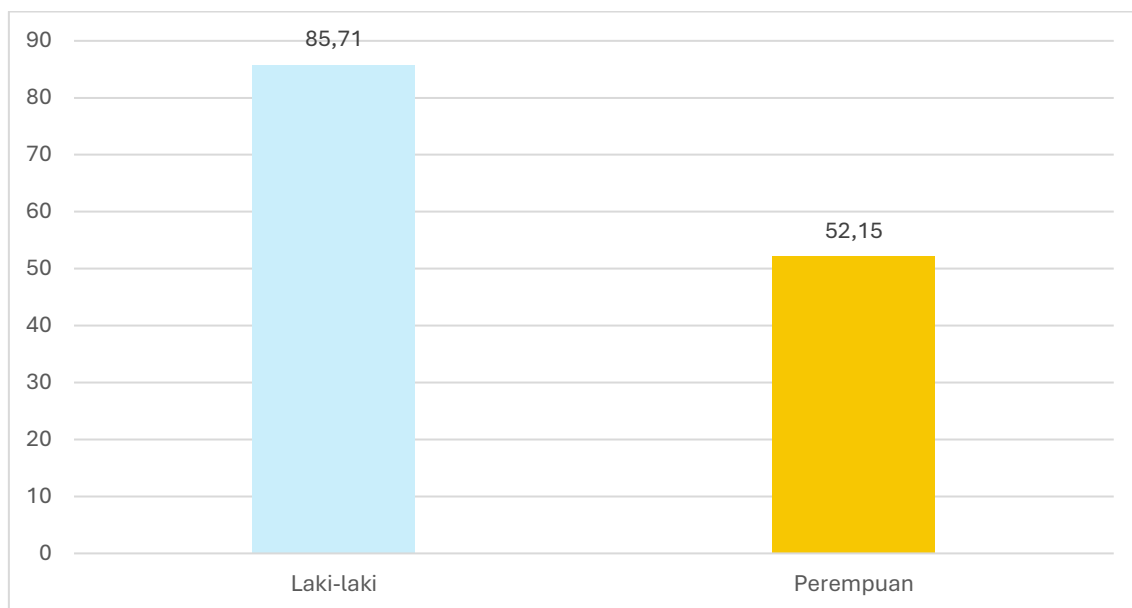


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan Grafik di atas, TPAK di provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren kenaikan yang stabil, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023, secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja dari 66,28% pada tahun 2020 menjadi 69,17% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK secara bertahap menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi karena lebih banyak individu yang aktif bekerja, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki pada tahun 2024 sebesar 85,73%, lebih besar dibandingkan perempuan hanya sebesar 52,15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja.

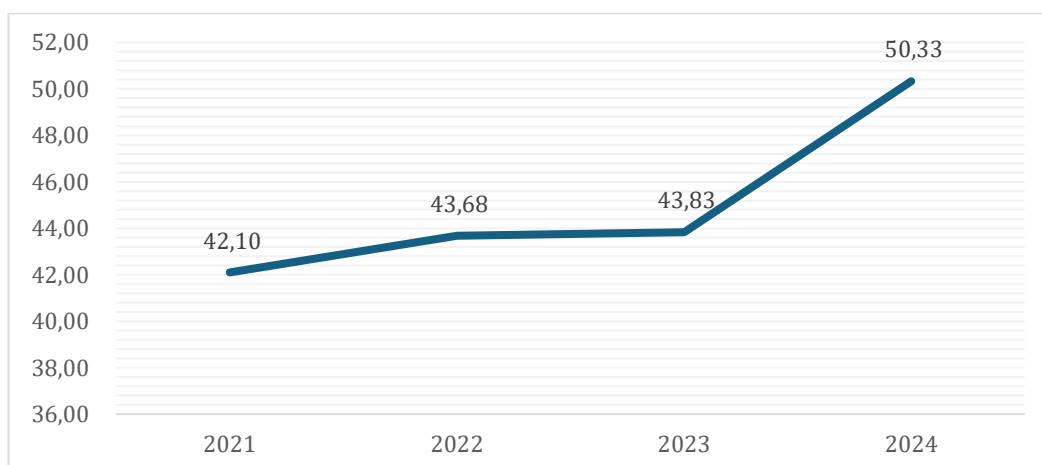


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.35 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2024

5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang positif dengan kenaikan secara konsisten setiap tahun dari sebesar 42,10 pada tahun 2021 menjadi sebesar 50,33 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menandakan adanya upaya yang lebih intensif dan signifikan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan inovasi Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2025)

Gambar 2.36 Perkembangan Kinerja Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Lahirnya indikator Indeks Ekonomi Hijau pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2045 selanjutnya perlu didukung dengan ketersediaan data indeks tersebut.

2. Indeks Ekonomi Biru

Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan, secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor maritim. Tentunya potensi maritim ini dapat menjadi topangan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai aspek, sehingga berbagai upaya pembangunan wilayah perlu menanamkan fokus maritim di dalamnya. Bahkan, pada RPJPN tahun 2025-2045, telah menyebutkan bahwa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan strategis industri maritim, misalnya arah pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah akan dikhususkan salah satunya kepada Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut, hal tersebut juga diharapkan dapat menopang *maritime backbone* yang menghubungkan antar kawasan strategis di Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, baik dari segi kebijakan fiskal maupun moneter.

Indeks Ekonomi Biru baru dikenal setelah disusunnya RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2045. Pada tahun-tahun sebelumnya indikator tersebut belum digunakan. Hal ini dikarenakan pembangunan wilayah pada periode sebelumnya masih kurang memperhatikan dan berkomitmen terhadap

potensi sektor maritim. Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat didukung dengan ketersediaan data untuk penilaian indeks tersebut. Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI) Kepulauan Riau pada tahun 2021 adalah 39,66, di bawah rata-rata nasional 42,06.

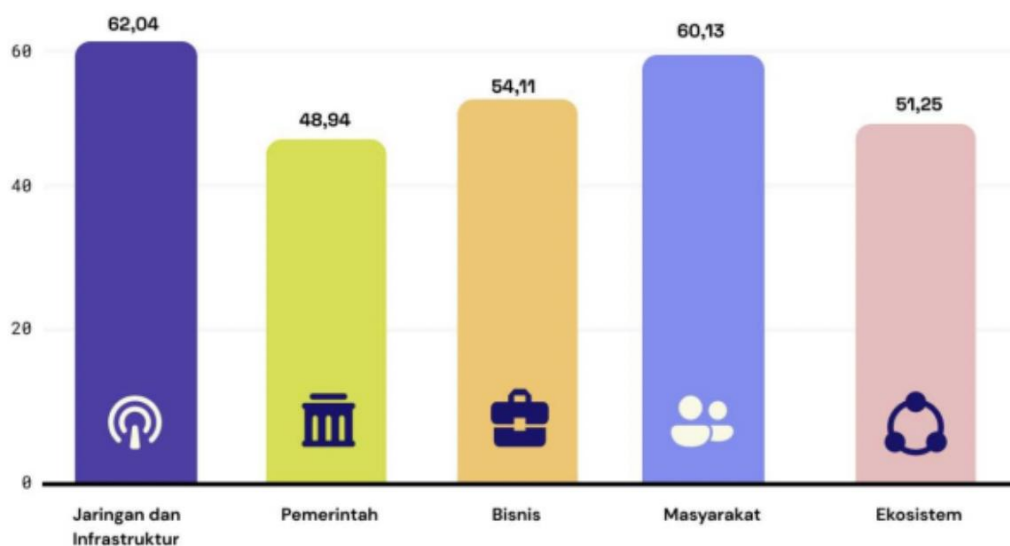
3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis dalam jangka panjang, seperti energi surya, angin, air, biomassa, dan geotermal. Penggunaan EBT dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dan membawa banyak manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang mulai diterapkan menjadi indikator daerah dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2024 masih belum diketahui secara spesifik. Namun, secara nasional, pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 19,5% dalam bauran energi primer pada tahun 2024, dan realisasi hingga tahun 2024 mencapai 14,1%.

D. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses penerapan teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam era yang serba digital ini, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah.

Penerapan transformasi digital di daerah semakin ditingkatkan dengan masuk pada target pembangunan jangka panjang. Pengukuran terhadap kinerja tranformasi digital di daerah dituangkan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 55,93. Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. Komponen dari ITDN meliputi jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem.



Sumber: Kementerian Komdigi (2024)

Gambar 2.37 Pencapaian Komponen Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

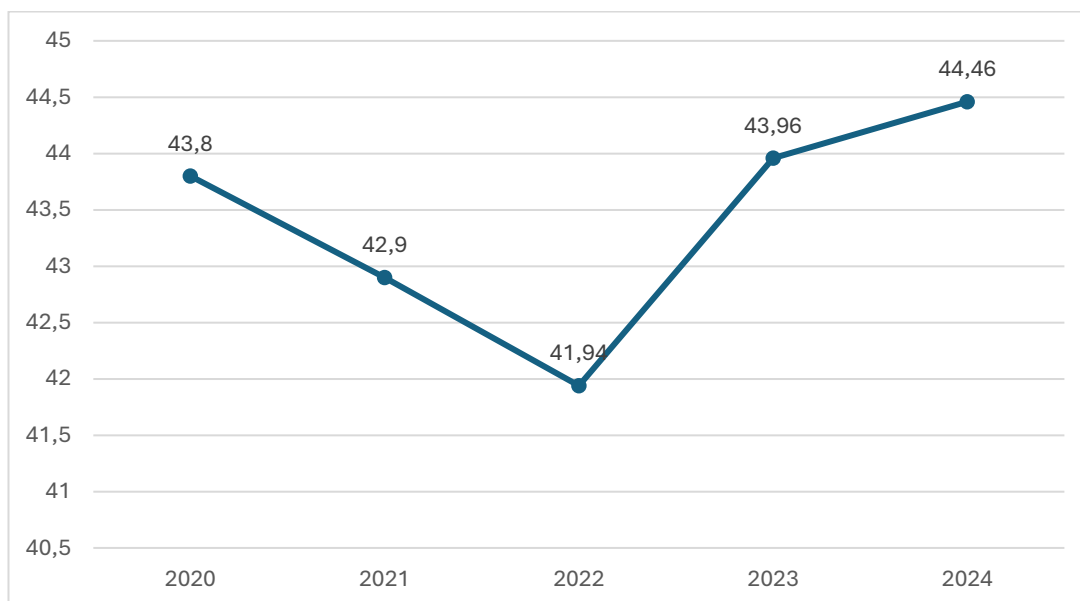
Provinsi Kepulauan Riau mengalami perbaikan kondisi transformasi digital secara signifikan, ditandai dengan peningkatan skor ITDN dari 47,90 pada tahun 2018 menjadi sebesar 55,93 pada tahun 2022. Dengan peningkatan skor ini, Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan klasifikasi dari C (Cukup) menjadi B (Baik). Hal ini menunjukkan progress transformasi digital pada setiap pilar sudah lebih maju, bahkan berada dalam kondisi yang relative lebih baik dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera.

E. Integrasi Ekonomi Domestik Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.38 Persentase PMTB terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Secara total, selama kurun waktu tahun 2020–2024, persentase PMTB terhadap PDRB menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 43,8% pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,46% pada tahun 2024.

2. Nilai Ekspor

Kegiatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2024 dibanding November 2024 turun sebesar 9,94 persen, yaitu dari US\$1.921,96 juta menjadi US\$1.730,84 juta. Penurunan nilai ekspor Desember 2024 disebabkan oleh turunnya ekspor sektor non-migas sebesar 14,39 persen. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 8,26 persen, yaitu dari US\$1.886,75 juta menjadi US\$1.730,84 juta. Penurunan nilai ekspor Desember 2024 dibanding Desember 2023 disebabkan oleh turunnya ekspor sektor migas sebesar 30,18 persen. Total ekspor kumulatif bulan Januari–Desember 2024 Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar US\$19.559,73 juta. Jika dibanding dengan total ekspor kumulatif Januari–Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,28 persen yaitu dari US\$18.938,34 juta menjadi US\$19.559,73 juta.

Naiknya nilai ekspor Januari–Desember 2024 disebabkan oleh naiknya ekspor kumulatif sektor nonmigas sebesar 9,56 persen.

Tabel 2.36 Nilai Ekspor dan Persentase Perubahannya Menurut Sektor Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Nilai FOB (ribu US\$)					Perubahan (%)			Peran (%) Jan–Des 2024
	Des 2023	Jan - Des 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan - Des 2024	Des'24 thd Nov'24 (m-to-m)	Des'24 thd Des'23 (y-on-y)	Jan–Des'24 thd Jan–Des'23 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	1.886.749,93	18.938.337,90	1.921.958,22	1.730.837,05	19.559.724,09	-9,94	-8,26	3,28	100,00
Migas	524.859,23	4.233.455,55	328.151,56	366.446,44	3.448.374,41	11,67	-30,18	-18,54	17,63
- Gas Alam	196.959,07	2.167.707,20	174.700,41	181.245,96	2.166.558,16	3,75	-7,98	-0,05	11,08
- Hasil minyak	291.427,46	1.851.592,87	142.550,34	152.330,24	1.117.985,80	6,86	-47,73	-39,62	5,72
- Minyak Mentah	36.472,70	214.155,48	10.900,80	32.870,24	163.830,45	201,54	-9,88	-23,50	0,84
Nonmigas	1.361.890,70	14.704.882,35	1.593.806,67	1.364.390,62	16.111.349,68	-14,39	0,18	9,56	82,37
- Hasil Industri	1.354.630,57	14.275.281,11	1.582.333,21	1.301.843,99	15.746.032,76	-17,73	-3,90	10,30	80,50
- Hasil Pertanian	3.967,06	73.632,54	4.223,45	4.302,20	49.453,84	1,86	8,45	-32,84	0,25
- Hasil Tambang	3.293,06	355.910,16	7.250,01	58.244,43	315.857,60	703,37	1.668,70	-11,25	1,61
- Lainnya	-	58,54	-	-	5,49	-	-	-90,62	0,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari sebesar 0,53 pada tahun 2023 menjadi 0,55 pada tahun 2024. Namun masih terdapat tantangan signifikan dalam hal daya saing kualitas infrastruktur. Peningkatan rasio konektivitas mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan angkutan darat, penyeberangan, dan laut.

2. Akses Rumah Layak Huni

Pemenuhan rumah tangga dengan akses rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dan

jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun. Capaian kinerja terhadap ketiga indikator tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Pemenuhan Atas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	100	100	68,03	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	0	100	0	100
3	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit Rumah	0	0	0	200	50

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau (2025)

3. Persentase Desa Mandiri

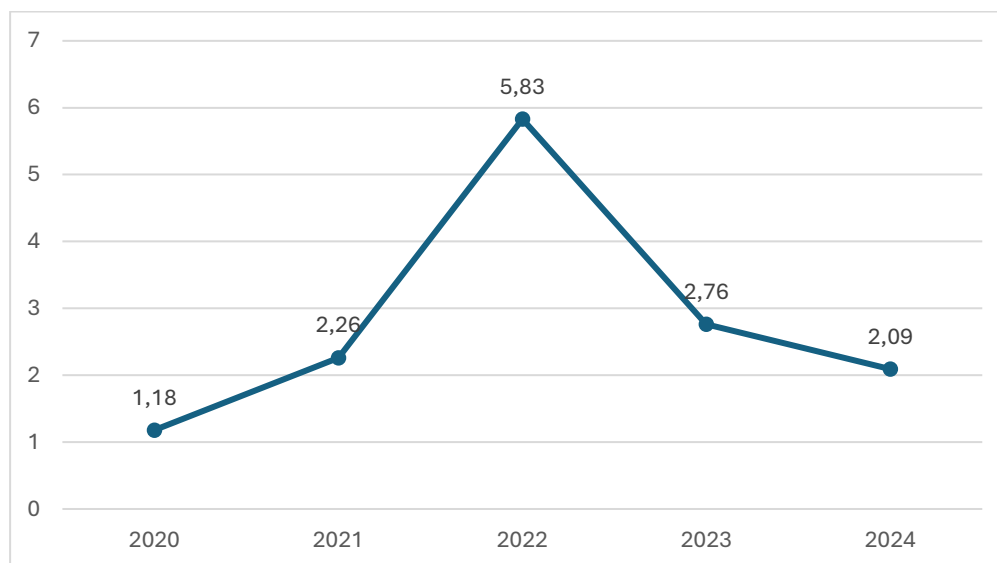
Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah baik. Persentase desa mandiri di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan dalam dua tahun terakhir dari sebesar 8,73% pada tahun 2023 menjadi sebesar 9,17% pada tahun 2024.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari laju inflasi. Inflasi adalah suatu bentuk gejala meningkatnya harga-harga yang berlaku umum pada suatu perekonomian secara terus-menerus. Hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari pandangan yang menyatakan bahwa inflasi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik domestik maupun global. Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tercatat sebesar 2,09% (y-on-y) lebih tinggi dari inflasi nasional (1,57%), kelompok penyumbang tertinggi ada pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, yang menggambarkan inflasi cenderung stabil. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Kepulauan Riau melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh kepala daerah secara langsung dalam mengendalikan harga pangan, bahan bakar, serta adanya normalisasi dalam sektor-sektor yang sebelumnya mengalami lonjakan harga yang signifikan. Stabilitas ekonomi global dan perbaikan dalam rantai pasokan juga memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi di tingkat provinsi.

Perkembangan laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.39 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

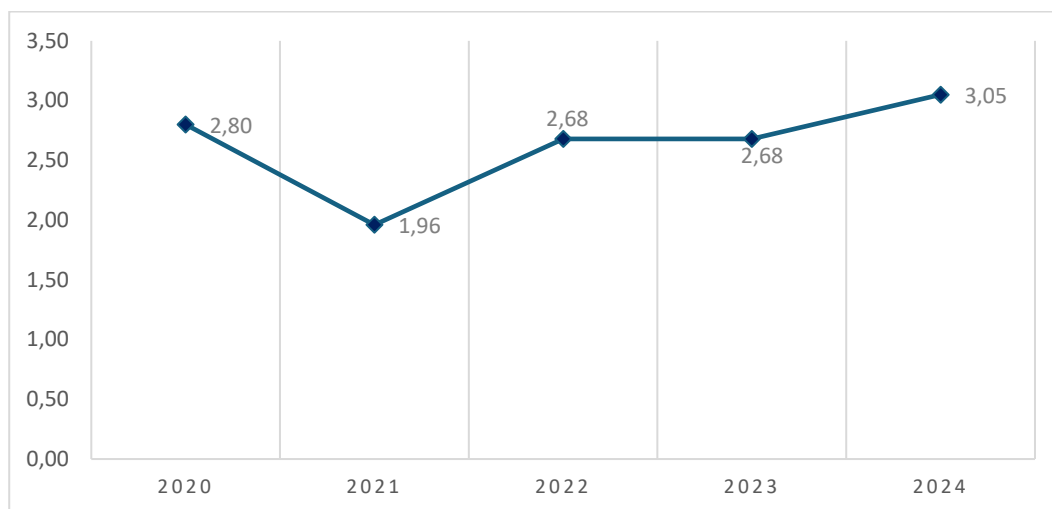
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut SPBE) merupakan indeks yang mengukur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan, SPBE dilaksanakan untuk mewujudkan integrasi dan efisiensi, menciptakan peluang inovasi, mendorong kolaborasi antar instansi pemerintah ataupun dengan aktor non pemerintah, serta menekan penyelewengan melalui sistem pengawasan dan sistem elektronik. Indeks ini memiliki empat sasaran utama yaitu mewujudkan manajemen SPBE serta tata kelola yang efektif dan efisien, memberikan layanan terpadu yang berorientasi pada masyarakat, adanya peningkatan kapasitas SDM, dan terselenggaranya infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah pusat membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertanggung jawab kepada presiden. Tim tersebut bertugas melaksanakan koordinasi dalam penerapan kebijakan SPBE di instansi pusat dan daerah.

Tabel 2.38 Predikat Penilaian SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	< 1,8	Kurang
2	1,8-< 2,6	Cukup
3	2,6-< 3,5	Baik
4	3,5-< 4,2	Sangat Baik
5	4,2-5,0	Memuaskan

Sumber: KemenPAN RB (2020)

Evaluasi terhadap indeks SPBE mengacu pada 47 indikator dan 4 domain utama yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Domain utama yang dinilai, yaitu tata kelola, layanan, kebijakan internal, dan manajemen SPBE. Berdasarkan domain tersebut, terdapat 7 aspek yang mencakup: a) kebijakan internal tata kelola SPBE, b) perencanaan strategis SPBE, c) teknologi informasi dan komunikasi, d) penyelenggara SPBE, e) penerapan manajemen SPBE, f) pelaksanaan audit TIK, g) layanan administrasi pemerintahan berbasis elektron. Berdasarkan evaluasi dari hasil indeks SPBE, setiap instansi akan diberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam melakukan perbaikan implementasi SPBE. Penilaian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan SPBE dan memperluas jejaring ataupun pembinaan implementasi SPBE. Penilaian indeks SPBE terdiri dari skala 1 sampai 5 yang berarti bahwa instansi yang memperoleh indeks SPBE mendekati 5 menunjukkan penerapan SPBE semakin baik, sedangkan hasil indeks SPBE yang mendekati 1 menunjukkan implementasi SPBE yang masih kurang baik.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.40 Perkembangan Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Pada konteks Kepulauan Riau, hasil indeks SPBE menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020, Kepulauan Riau berhasil memperoleh nilai 2,8 atau berada pada predikat baik, menjadi 3,05 pada tahun 2024 dengan predikat baik.

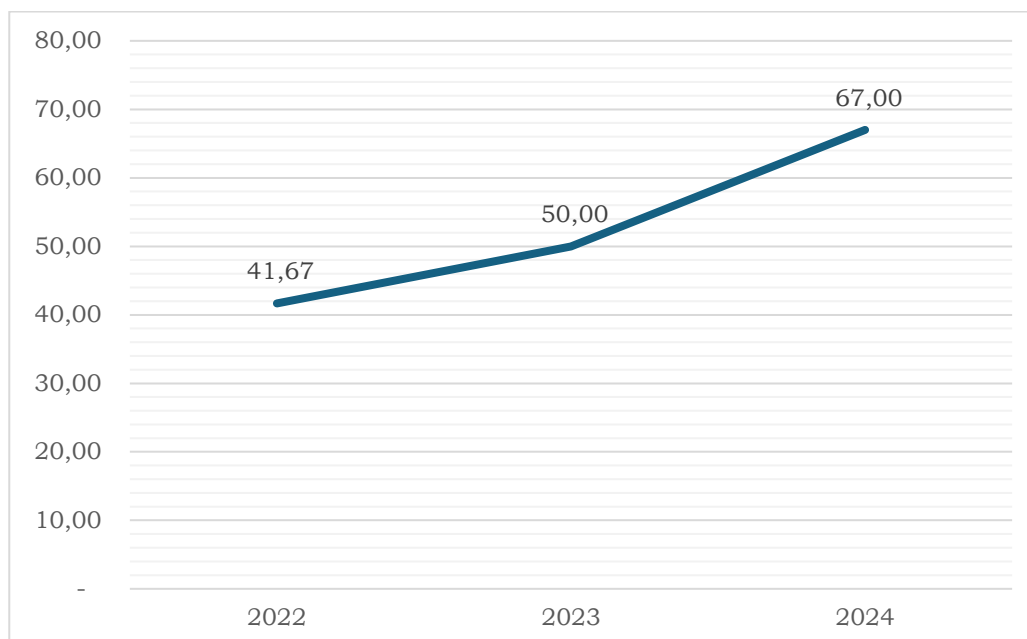
2. Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepulauan Riau berhasil meraih predikat tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 menurut Ombudsman. Ini menandakan kualitas pelayanan publik di Kepri sangat baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks nilai 4,13 atau kategori A- kepada Pemerintah Provinsi Kepri, untuk kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 41,67% menjadi sebesar 67,00% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu di atasi, seperti pengawasan yang lebih ketat dan konsistensi dalam penegakan hukum. Untuk memastikan bahwa pencapaian ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, pemerintah daerah harus terus memperkuat sumber daya manusia, infrastruktur penegakan hukum, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan.

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Gambaran perkembangan kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber: Satpol PP dan Damkar Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Gambar 2.41 Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Uraian penjelasan atas Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dijelaskan melalui Indikator Indeks Daya Saing Daerah. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi. Hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Indeks daya saing menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan baik di kancah nasional maupun global. Indeks daya saing daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2020 sebesar 3,2 atau masuk dalam kategori tinggi. Tahun 2021 tidak ditemukan rilis data yang

dilakukan oleh lembaga yang sama. Kemudian di tahun 2022 Badan Riset Inovasi Nasional merilis indeks daya saing daerah dengan perolehan skor untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,36, pada tahun 2023 sebesar 3,38 dan pada 2024 sebesar 3,40. Capaian angka tersebut merupakan kontribusi atas 12 pilar, adapun secara rinci capaian pilar indeks daya saing Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.39 Rincian Indikator Daya Saing Daerah Oleh Badan Riset Inovasi Nasional Untuk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, 2023-2024

No	Pilar	2022		2023		2024	
		Skor Provinsi	Skor Nasional	Skor Provinsi	Skor Nasional	Skor Provinsi	Skor Nasional
1.	Institusi	4,41	4,14	4,55	4,31	4,20	4,18
2.	Infrastruktur	2,99	2,91	3,08	2,71	2,88	2,97
3.	Adopsi TIK	4,79	3,57	4,86	3,60	4,66	3,47
4.	Stabilitas Ekonomi Makro	2,78	3,05	3,16	3,54	4,23	3,99
5.	Kesehatan	3,75	3,76	3,79	3,79	3,83	3,76
6.	Keterampilan	3,91	3,73	4,04	3,76	3,85	3,91
7.	Pasar Produk	0,97	2,68	1,05	2,59	1,04	2,57
8.	Pasar Tenaga Kerja	4,46	3,73	4,57	3,86	3,82	3,03
9.	Sistem Keuangan	1,38	2,66	2,08	2,54	2,14	2,76
10.	Ukuran Pasar	3,02	1,31	4,44	4,36	4,78	4,35
11.	Dinamisme Bisnis	5,00	5,00	2,31	3,23	2,58	3,06
12.	Kapabilitas Inovasi	2,91	2,62	2,59	3,02	2,80	3,13

Sumber: Rilis dokumen BRIN (2025)

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintah daerah disampaikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir pada masing-masing urusan pemerintah daerah. Adapun penjelasan atas kinerja setiap urusan disampaikan melalui uraian berikut.

I. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Pada rentang usia ini, remaja berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional yang krusial, sehingga pendidikan menengah menjadi fondasi bagi pembentukan keterampilan akademik, sosial, dan profesional. Melalui keikutsertaan dalam pendidikan menengah, mereka memperoleh pengetahuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi dalam pendidikan menengah, semakin besar peluang bagi suatu negara untuk memiliki tenaga kerja yang berkualitas di masa depan.

Peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan generasi muda. Remaja yang tidak mengenyam pendidikan menengah cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga berisiko mengalami ketidakstabilan ekonomi. Melalui pendidikan yang memadai, mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang dibutuhkan dalam persaingan global. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap anak usia 16-18 tahun memiliki akses yang setara terhadap pendidikan menengah, baik melalui penyediaan fasilitas, beasiswa, maupun program pendidikan alternatif.

Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan, dari sebesar 88,83% menjadi 87,94%. Untuk tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, capaian tahun 2024 sebesar 108,452%, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2020 sebesar 91,78%. Penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pendidikan khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai jenis disabilitas, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau perkembangan. Program ini mencakup metode pengajaran yang disesuaikan, penggunaan teknologi asistif, serta dukungan dari tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus siswa. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan penting dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas, kurikulum yang fleksibel, serta kebijakan yang memastikan kesetaraan bagi semua peserta didik. Dengan adanya pendidikan khusus yang efektif, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan berkontribusi dalam kehidupan sosial serta dunia kerja.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	%	88,83	89,689	86,837	92,29	87,94
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	%	91,78	82,694	74,765	88,82	108,45

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah Daerah yang mampu mencapai target kinerja di sektor kesehatan akan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Provinsi Kepulauan Riau, khususnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan kesehatan, seperti fasilitas medis, tenaga

kesehatan, obat-obatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kinerja yang optimal dalam bidang ini tidak hanya meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas kesehatan penduduk, tetapi juga mengurangi beban ekonomi akibat tingginya biaya perawatan penyakit yang bisa dicegah.

Kinerja fasilitas medis seperti Rumah Sakit rujukan tingkat provinsi yang terakreditasi sudah mencapai angka 96,01% di tahun 2024. Akreditasi menjadi indikator utama bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar nasional maupun internasional dalam aspek pelayanan, fasilitas, tenaga medis, serta manajemen rumah sakit. Adanya status akreditasi akan membuat pasien dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih aman, efektif, dan berbasis bukti, terutama untuk kasus-kasus kompleks yang memerlukan penanganan lanjutan, seperti penyakit kronis, bedah spesialis, dan perawatan intensif. Selain itu, rumah sakit yang terakreditasi juga menjadi pusat rujukan bagi fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota, sehingga memastikan koordinasi yang lebih baik dalam sistem rujukan pasien.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana menjadi aspek krusial dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kondisi masyarakat. Ketika bencana terjadi, seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terganggu akibat rusaknya fasilitas, terbatasnya tenaga medis, serta kurangnya pasokan obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, respons cepat melalui layanan kesehatan darurat sangat dibutuhkan untuk mencegah peningkatan jumlah korban serta mengurangi risiko penyebaran penyakit. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi kemanusiaan harus bersinergi dalam menyediakan layanan medis, termasuk pertolongan pertama, evakuasi medis, serta penyediaan air bersih dan sanitasi guna mencegah penyebaran penyakit menular. Capaian kinerja persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi

bencana di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 100% atau dengan kata lain sudah sangat baik.

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,02	1,9152	2,0831	1,94	1,96
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	82,86	48,571	54,286	94,59	96,01
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan tata kelola ruang wilayah yang berkelanjutan. Fungsi utamanya mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, sistem air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan ruang wilayah agar pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga dapat mencegah masalah seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, banjir akibat tata drainase yang buruk, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Melalui perencanaan yang baik, pemerataan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan drainase, capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup rendah. Kinerja capaian indikator ini hanya sebesar 34,713 (tahun 2022), dan sedikit meningkat menjadi 37,16 (tahun 2023). Rendahnya rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari segi perencanaan, pendanaan, maupun faktor lingkungan. Infrastruktur pengendalian banjir, seperti sistem drainase yang memadai, tanggul, waduk, serta normalisasi sungai, berperan dalam mengurangi risiko genangan air yang dapat merusak permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Semakin tinggi rasio kawasan yang terlindungi, semakin baik pula ketahanan wilayah terhadap bencana banjir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk serta meminimalkan kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan properti. Selain itu, peningkatan rasio ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan tata ruang yang berkelanjutan serta memastikan bahwa kawasan permukiman dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan dan daya dukung lingkungan.

Pemeliharaan infrastruktur dasar berikutnya terkait dengan jalan. Rasio kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, dimana capaian tertingginya yaitu sebesar 80,87% pada tahun 2024. Rasio kemantapan jalan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada di suatu wilayah. Jalan dikategorikan mantap jika memenuhi standar kelayakan tertentu, baik dari segi struktur maupun permukaan, sehingga dapat mendukung mobilitas dan aksesibilitas secara optimal. Rasio ini menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kualitas infrastruktur transportasi dan efisiensi konektivitas suatu daerah, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Semakin

tinggi rasio kemantapan jalan, semakin baik pula kualitas jaringan transportasi, yang dapat menekan biaya logistik, meningkatkan akses ke layanan publik, dan mendorong investasi. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan pemeliharaan rutin serta peningkatan infrastruktur jalan guna memastikan rasio kemantapan jalan tetap tinggi, khususnya di daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi.

Indikator lainnya pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait sistem air minum. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 belum mencapai angka 55%. Penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota merupakan sistem distribusi air bersih dalam jumlah besar dari daerah yang memiliki sumber daya air berlimpah ke daerah yang membutuhkan. Skema ini umumnya melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan badan usaha penyedia air minum untuk memastikan pasokan air tetap terjaga, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air baku. Air minum curah disalurkan melalui jaringan perpipaan atau transportasi tangki air ke instalasi pengolahan atau reservoir sebelum didistribusikan ke masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih, mendukung ketahanan air, serta mengurangi ketergantungan pada sumber air yang tidak layak konsumsi. Selain aspek teknis, keberhasilan penyaluran air minum curah juga bergantung pada regulasi, tarif air, serta efisiensi manajemen operasional agar tetap berkelanjutan. Melalui sistem ini, daerah yang mengalami kekeringan atau keterbatasan infrastruktur air dapat tetap memperoleh pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, industri, dan pertanian, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	100	53,15	34,71	37,16	0,1
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	90,76	13,42	18,01	18,92	0,01
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	0	100	100	0
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	%	0	53,21	53,34	46,1	33,51
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	0	0	0	0
6	Rasio kemandapan jalan	%	78	79,08	80,62	80,78	80,87
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8,92	6,29	23,76	15,54	77,25

Sumber : Dinas PUPR Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah berperan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengelolaan kawasan permukiman agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Selain itu, upaya penataan kawasan permukiman juga mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta pengelolaan kawasan kumuh agar lebih layak huni. Melalui program seperti bantuan rumah subsidi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengembangan perumahan berbasis komunitas, pemerintah daerah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Indikator luas kawasan kumuh 10–15 hektare yang ditangani merupakan ukuran penting dalam menilai efektivitas program penataan permukiman dan peningkatan kualitas hunian di suatu wilayah. Capaian kinerja Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah bahkan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 51,45% dan menjadi sebesar 63,12% di tahun 2024. Kawasan kumuh dengan luas 10-15 ha biasanya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, serta kondisi lingkungan yang kurang layak. Penanganan kawasan kumuh dalam skala ini, menjadikan pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti penyediaan akses air bersih, sanitasi yang memadai, jalan lingkungan, serta peningkatan kualitas hunian.

Peningkatan kualitas hunian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui indikator persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum). Capaian indikator ini sudah mencapai 100% pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami penurunan menjadi 52,66% pada tahun 2024. Perumahan yang sudah dilengkapi PSU merupakan

perumahan yang telah memiliki infrastruktur dasar, fasilitas pendukung, dan layanan publik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Prasarana mencakup jaringan jalan, drainase, sistem air bersih, dan listrik. Sarana meliputi fasilitas sosial seperti tempat ibadah, ruang terbuka hijau, sekolah, dan pusat kesehatan. Sementara itu, utilitas umum mencakup sistem pengelolaan limbah, persampahan, serta jaringan komunikasi dan telekomunikasi.

Keberadaan PSU dalam suatu perumahan sangat penting untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup penghuninya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berperan dalam menyediakan dan memastikan kelengkapan PSU, terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman. Melalui adanya PSU yang memadai, perumahan tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	68,03	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	51,45	58,698	13,662	20,8	63,12
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	84,48	100	100	52,66	52,66

Sumber : Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penegakan peraturan daerah, pengelolaan keamanan lingkungan, serta upaya mitigasi terhadap potensi gangguan sosial yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan perangkat keamanan lainnya, pemerintah daerah memastikan bahwa regulasi daerah dipatuhi. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, tindak kriminal, atau gangguan sosial lainnya. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keamanan daerah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang berbasis pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum yang humanis, bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, serta mendukung kelangsungan pembangunan daerah.

Persentase gangguan Trantibum (Ketenteraman dan Ketertiban Umum) yang dapat diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 100% selama tahun 2020-2024. Gangguan Trantibum merupakan segala bentuk tindakan atau kondisi yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, diindikasikan melalui 2 indikator yaitu Persentase penanganan pra bencana dengan realisasi tahun 2024 sebesar 57,14% dan Persentase penanganan tanggap darurat bencana dengan realisasi sebesar 71,43%.

Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	22,22	4,76	91,67	50	74,62
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	0	66,67	66,67	66,67
4	Persentase penanganan pra bencana	%	28,57	42,86	100	100	57,14
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	71,43

Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Bidang sosial dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, dan kesejahteraan anak. Program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, maupun gelandangan dan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti, capaian kinerjanya sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan dan layanan sosial bagi kelompok rentan.

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	69,231	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Fungsi utamanya mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui

pelatihan dan sertifikasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja melalui penyediaan data pasar kerja yang akurat serta mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, program pemberdayaan tenaga kerja, termasuk wirausaha mandiri dan pelatihan vokasi, menjadi bagian penting dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja, pemerintah daerah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memastikan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Capaian kinerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari sebesar 0,13% di tahun 2020 kemudian menjadi 4,59% di tahun 2024. Rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja di tingkat daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi, kurangnya kesadaran tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi, serta minimnya dukungan dari perusahaan dalam meningkatkan kompetensi karyawannya. Selain itu, biaya sertifikasi yang relatif tinggi dan keterbatasan lembaga pelatihan yang terakreditasi juga menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikasi.

Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dilihat melalui indikator Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan. Capaian indikator ini juga masih rendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,65% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 14,57% di tahun 2024. Kepatuhan terhadap regulasi

ketenagakerjaan tidak hanya melindungi hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	57,14	57,14	57,14	42,86	42,86
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,13	9,88	17,85	2,91	4,59
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rp/Tk)	172,1	166,41	164,5	196,25	205,9
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	6,75	16,45	25,29	36,21	39,04
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	64,31	79,27	48,60	59,42	78,58
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	3,65	5,84	8,217	11,3	14,57

Sumber : Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemerintahan daerah berperan penting dalam menciptakan kesetaraan

gender, meningkatkan kesejahteraan perempuan, serta menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, program, dan layanan yang mendukung peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik, serta memastikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Program seperti pelatihan keterampilan dan akses modal bagi perempuan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, layanan pengaduan bagi korban kekerasan, serta kampanye edukasi mengenai hak anak menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif di tingkat daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis data, pemerintahan daerah dapat memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan, serta setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	5,38	8,83	11,24	12,63	13,51
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	4,18	4,26	5,33	5,51	5
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	25,71	21,05	29,46	28,96	25,05

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Bidang Pangan dalam pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung produksi, distribusi, serta stabilisasi harga pangan, termasuk dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, dan peternakan lokal agar lebih produktif dan berdaya saing. Selain itu, pengawasan terhadap keamanan pangan, pengendalian inflasi pangan, serta mitigasi risiko krisis pangan akibat bencana alam atau gangguan rantai pasok menjadi bagian dari tugas utama dalam bidang ini. Pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan melalui pelatihan, bantuan teknologi, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Dengan kebijakan pangan yang terencana dan berbasis data, pemerintah daerah dapat memastikan distribusi pangan yang merata, mengurangi kerawanan pangan, serta mendukung pola konsumsi yang sehat dan bergizi bagi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Persentase Cadangan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,01 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 72,15 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	0,01	0,01	11,91	17,81	72,15

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola, mengatur, dan mengawasi penggunaan serta pemanfaatan tanah agar sesuai dengan perencanaan tata ruang dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

proses administrasi pertanahan, termasuk penerbitan izin pemanfaatan lahan, penyelesaian sengketa tanah, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, bidang pertanahan juga berperan dalam program sertifikasi tanah bagi masyarakat, terutama bagi kelompok kurang mampu, guna meningkatkan kepastian hukum dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam upaya mencegah konflik agraria, pemerintah daerah harus memastikan adanya transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan tanah serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kebijakan pertanahan yang efektif dan berkeadilan, pemerintahan daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta menjamin hak-hak masyarakat atas tanah sebagai aset produktif yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu telah mencapai 100% selama kurun waktu lima tahun.

**Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	100	0	0
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	%	0	0	91,49	91,49	0

Sumber : Dinas PUPR Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memastikan kualitas lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran udara dan air, serta rehabilitasi lahan kritis. Selain itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti penghijauan perkotaan, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan energi terbarukan, menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas industri dan pemanfaatan lahan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak keseimbangan ekosistem. Kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan organisasi lingkungan dalam edukasi serta gerakan sadar lingkungan semakin memperkuat efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, pemerintah daerah tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari bencana ekologis. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan penurunan dari sebesar 41,79% pada tahun 2020 menjadi sebesar 23,33% pada tahun 2024.

Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	41,79	6,67	16,67	14,29	23,33

Sumber : DLHK Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemerintahan daerah berperan penting dalam mengelola data kependudukan serta menjamin hak-hak sipil setiap warga negara melalui pencatatan yang akurat dan sistematis. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, serta dokumen kependudukan lainnya yang menjadi dasar dalam berbagai layanan publik. Data kependudukan yang valid dan terintegrasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pemetaan kebutuhan sosial, serta peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam mencegah permasalahan seperti identitas ganda, penyalahgunaan data, dan keterlambatan pencatatan dokumen kependudukan, yang dapat berdampak pada hak-hak masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi digital dan sistem administrasi berbasis elektronik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi layanan kependudukan, memastikan inklusivitas, serta mempercepat akses masyarakat terhadap identitas hukum yang sah, yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	43,9	43,90	41,86	41,86	75

Sumber : DPMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun budaya. Persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan penurunan dari sebesar 25,27% pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,17% pada tahun 2024.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	50,00	32,14	62,50	10,60	100,00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	25,27	1,14	3,47	11,00	9,17

Sumber : DPMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki peran yang penting dalam upaya mengendalikan kuantitas maupun kualitas penduduk. TFR (Angka Kelahiran Total) menunjukkan penurunan dari sebesar 2,2% pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,15% pada tahun 2024.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,2	2,53	2,16	2,17	2,15
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	44,2	40,4	37,13	44	56,1
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	10,14	26,27	26,27	16,5	56,1

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan dalam pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengembangkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, serta pengawasan infrastruktur transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas angkutan umum agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, regulasi terkait lalu lintas, keselamatan transportasi, serta integrasi moda transportasi juga menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran mobilitas dan mengurangi kemacetan. Upaya modernisasi transportasi, seperti digitalisasi layanan angkutan umum, pengembangan transportasi berbasis energi ramah lingkungan, serta penerapan sistem transportasi cerdas (ITS), menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi di daerah. Dengan kebijakan perhubungan yang baik, pemerintahan daerah tidak hanya mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi. Rasio konektivitas Provinsi menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,38 pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,59 pada tahun 2024.

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0,38	0,42	0,44	0,49	0,59
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Rasio	-	0,43	0,47	0,52	0,22

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola arus informasi, meningkatkan

literasi digital masyarakat, serta mendukung transparansi dan efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata, memastikan akses internet yang inklusif, serta mengembangkan sistem informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam penyebarluasan informasi publik secara cepat dan akurat melalui berbagai media, termasuk portal resmi pemerintah, media sosial, serta layanan informasi digital. Upaya pemberantasan hoaks dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Dengan transformasi digital yang optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, kritis, dan siap menghadapi era digitalisasi secara berkelanjutan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan peningkatan dari 82,93% pada tahun 2020 menjadi sebesar 83,72% pada tahun 2024.

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82,93	85,37	85,366	85,37	83,72
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	79,40	79,60	79,53	88,24	71,79

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	80,99	11,85	81,03	86,71	100

Sumber : Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan pelaku UKM melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian akses permodalan, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, regulasi yang kondusif, insentif pajak, serta kemudahan perizinan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing koperasi dan UKM di daerah. Digitalisasi dan inovasi juga menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini, di mana pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi dalam pemasaran dan operasional bisnis mereka. Dengan kebijakan yang mendukung dan ekosistem usaha yang sehat, koperasi dan UKM dapat tumbuh lebih mandiri, berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, serta menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas menunjukkan penurunan dari sebesar 51,04% pada tahun 2020 menjadi sebesar 49,54% pada tahun 2024.

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	51,04	53,73	46,55	48,57	49,54
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	54,7	42,38	29,95	29,86	30,46

Sumber : Dinkop UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dalam pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam mendorong investasi yang berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang transparan, penyederhanaan perizinan, serta pemberian insentif bagi investor yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, promosi investasi dilakukan untuk menarik minat pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menonjolkan potensi unggulan daerah seperti sektor industri, pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi tenaga kerja lokal. Dengan pengelolaan yang baik, bidang penanaman modal tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global. Peningkatan Investasi di Provinsi menunjukkan peningkatan dari sebesar 45,55% pada tahun 2020 menjadi sebesar 134,4% pada tahun 2024.

**Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	45,55	-34,19	-27,14	10,67	134,4

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam pemerintahan daerah berperan penting dalam membangun generasi muda yang produktif, berdaya saing, serta meningkatkan budaya hidup sehat melalui olahraga. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi pemuda, baik dalam aspek pendidikan, kewirausahaan, kepemimpinan, maupun partisipasi sosial. Program pelatihan keterampilan, beasiswa, serta fasilitasi kewirausahaan pemuda menjadi bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri. Di sisi lain, bidang olahraga difokuskan pada pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai, pembinaan atlet daerah, serta penyelenggaraan event olahraga untuk mendorong prestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah daerah juga berperan dalam memasyarakatkan olahraga sebagai gaya hidup sehat, dengan menyediakan sarana olahraga yang mudah diakses serta kampanye kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik. Dengan kebijakan yang terarah dan dukungan yang optimal, sektor kepemudaan dan olahraga dapat menjadi pilar utama dalam membangun daerah yang dinamis, sehat, serta berprestasi di berbagai bidang. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,13% pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,24% pada tahun 2024. Peningkatan prestasi olahraga meningkat dari 16% pada tahun 2022 menjadi sebesar 27% pada tahun 2024.

**Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,13	0,64	0,49	0,71	1,24
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	0	16	17	27

Sumber : Dispora Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Bidang Statistik dalam pemerintahan daerah memiliki peran fundamental dalam menyediakan data yang akurat, valid, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta memastikan efektivitas program pembangunan. Melalui sistem statistik yang andal, pemerintah dapat memantau indikator-indikator strategis, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam mendorong digitalisasi pengelolaan data serta meningkatkan literasi statistik di kalangan aparatur dan masyarakat agar pemanfaatan data menjadi lebih optimal. Dengan statistik yang kuat dan berbasis teknologi, pemerintahan daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar 51,22% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2024.

Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	51,22	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	51,22	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Bidang Persandian dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi pemerintah, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola sistem persandian untuk melindungi data dan informasi sensitif dari potensi kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Implementasi teknologi enkripsi, penguatan infrastruktur keamanan siber, serta pelatihan sumber daya manusia dalam bidang persandian menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan komunikasi pemerintahan. Selain itu, koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta instansi terkait diperlukan agar kebijakan keamanan informasi di tingkat daerah selaras dengan standar nasional. Dengan sistem persandian yang kuat, pemerintah daerah dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan kelancaran layanan pemerintahan berbasis digital secara aman dan efektif. Tingkat Keamanan informasi pemerintah menunjukkan penurunan dari sebesar 83,52% pada tahun 2020 menjadi sebesar 64,34% pada tahun 2024.

Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Nilai	83,52	69,01	73,41	60,31	64,34

Sumber : Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pelestarian Budaya mengacu pada pengelolaan sumber daya budaya yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan yang bijak dan keberlanjutan warisan budaya. Upaya ini dilakukan dengan cara melindungi dan meningkatkan kualitas nilai serta keragaman budaya yang ada. Persentase cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki tren meningkat selama tahun 2020 sampai 2024, dari tahun 2020 sebesar 34,95% persen menjadi 41,8 persen pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	34,95	58,14	60,91	66,43	41,8

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Provinsi Kepulauan Riau nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2020 mencapai 56,3 persen menjadi 67,12 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki perubahan positif dalam kebiasaan literasi. Kenaikan ini mencerminkan bahwa masyarakat semakin

tertarik dan aktif dalam kegiatan membaca, baik melalui buku, artikel, jurnal, maupun sumber bacaan lainnya.

Sementara indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai 2024, dari sebesar 14,45 pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,24 pada tahun 2024. Secara rinci dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	56,3	61,83	62,02	65,8	67,12
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14,45	21,33	72,87	62,52	74,24

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sampai 2024, dari sebesar 1,01% pada tahun 2020 menjadi sebesar 18,17% pada tahun 2024.

Kemudian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat dari sebesar 18,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 28,22% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	%	1,01	18,25	15,67	17,81	18,17
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	18,33	4,38	0	27,67	28,22

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dari sebesar 347.598,65 ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 375.153,75 ton pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, namun hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan sektor perikanan.

Sementara itu, persentase kepatuhan pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dari sebesar 90% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha KP telah mematuhi ketentuan yang ada. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Selain itu, tingginya tingkat

kepatuhan juga menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	347.598,65	325.529,89	333.125,969	351.641,786	375.153,75
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	90	90	99	100	100

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar -85,76% pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,90% pada tahun 2024. Pertumbuhan tahun 2020 dan 2021 minus dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 kemudian mulai tahun 2022, sektor ini menunjukkan pemulihan yang luar biasa dengan seiring dibukanya kembali akses internasional dan kebijakan yang mendukung kedatangan wisatawan mancanegara.

Kemudian persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan yang signifikan selama periode ini. Pemulihan yang semakin kuat yang

mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri serta efektivitas promosi pariwisata lokal yang dilakukan oleh pemerintah.

Tingkat hunian akomodasi di Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki tren cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai 2024, dari sebesar 28,88% pada tahun 2020 menjadi sebesar 56,54% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan bertahap di sektor akomodasi seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,90% pada tahun 2024.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-85,76	-99,24	24,332	101,92	8,90
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-82,58	12,08	80,85	51,88	52,12
3	Tingkat hunian akomodasi	%	28,88	24,13	32,24	47,79	56,54
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33	1,15	1,58	1,90	1,90

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Selama periode 2020 hingga 2024, produktivitas pertanian per hektar per tahun di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kecenderungan peningkatan dari sebesar 2,03 ton/hektar pada tahun 2020 menjadi sebesar 23,34 ton/hektar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap di sektor pertanian. Peningkatan ini mengindikasikan adanya optimalisasi lahan pertanian, inovasi dalam teknologi pertanian, atau panen komoditas unggulan dalam skala besar.

Selama periode 2020 hingga 2024, persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi fluktuatif, dari sebesar 20,41% pada tahun 2020 menjadi sebesar -33,48% pada tahun 2024. Upaya penurunan penyakit hewan dilakukan melalui intensifikasi vaksinasi, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalkan penyebaran penyakit. Meskipun ada upaya pengendalian, penyakit hewan menular masih tetap menjadi tantangan.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	2,03	19,724	20,5	19,06	23,34
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	20,41	-20	60,09	32,33	-33,48

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan digambarkan melalui 3 indikator kinerja. Dari ketiga indikator tersebut, dua indikator di antaranya tergolong memiliki capaian yang perlu perhatian. Kerusakan hutan pertahun (*deforestasi*) di Provinsi Kepulauan Riau dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak tercatat, sehingga perlu dipastikan kembali terkait

pemantauannya. Kemudian untuk kinerja rehabilitasi lahan kritis masih cukup rendah, di mana pada tahun 2024 hanya 0,39% lahan terehabilitasi, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 yang mencapai 6,68%.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	88	701	0	1069,5	500,48
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (<i>deforestrasi</i>)	%	2,38	0,43	0,01	0,20	0,40
3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	6,68	1,762	0,356	1,31	0,39

Sumber : DLHK Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja kunci pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki capaian baik. Dua indikator yaitu Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda meningkat dari sebesar 0% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2024, dan Persentase Desa Yang Teraliri Listrik realisasi meningkat dari sebesar 91,35% pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,76% pada tahun 2024.

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	0	0	0	100	100
2	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	%	91,35	98,80	100	100	99,76

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian kinerja bidang perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi yang signifikan pada berbagai indikator. Salah satu indikator utama, yaitu pertumbuhan nilai ekspor non-migas, menunjukkan tren positif dari sebesar 6,5% pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,56% pada tahun 2024. Kontraksi ekspor disebabkan oleh perlambatan ekonomi global atau hambatan dalam rantai pasok internasional, yang berdampak pada kinerja ekspor daerah.

Kemudian persentase penanganan pengaduan konsumen menunjukkan kinerja yang cukup baik sepanjang periode ini. Kondisi yang hampir sama pada indikator tertib usaha capaian kinerja menunjukkan hasil optimal selama tahun 2020 hingga 2024 dengan capaian 100 persen setiap tahunnya.

Capain kinerja yang paling terlihat pada persentase realisasi pupuk yang mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2020, realisasi pupuk tercatat sangat rendah, yaitu 0,01%, pada tahun 2024 menjadi 74,75%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi dan ketersediaan pupuk, yang berperan penting dalam mendukung sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2020 sebesar 100 persen menjadi 81,5% pada tahun 2024. Penurunan angka ini diakibatkan oleh perbedaan metode pengukuran dan analisa, dimana pada tahun 2020 analisis terhadap sampel barang beredar dilakukan secara non laboratoris, sedangkan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 metode pengukuran dan analisa dilakukan secara laboratoris. Selengkapnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6,5	26,92	24,03	-4,3	9,56
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	88,46	82,35	97,78	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	0	0	-	0	0
4	Tertib Usaha	%	100	100	100	0	0
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,01	0,015	4,16	88,68	74,75
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	91,24	59,87	88,73	81,5
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	0,09	0,08	13,45	8,06	9,08

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP memperlihatkan bahwa kinerja pada tahun 2020-2023 sebesar 0% sementara pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh dokumen RPIP Provinsi Kepulauan Riau baru ditetapkan pada tahun 2024.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait memiliki kinerja 0% sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini terjadi karena tidak ada izin perluasan industri dalam kewenangan provinsi yang diajukan oleh pelaku usaha.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

yang dikeluarkan oleh instansi terkait memiliki kinerja 0% sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan provinsi Kepulauan Riau adalah kepulauan dimana batas kabupaten satu dengan yang lain berupa lautan, sehingga tidak ada pengembangan industri yang berada pada lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait berfluktuasi karena pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh provinsi adalah terhadap industri baru yang persetujuan perizinannya dikeluarkan oleh instansi terkait ditingkat pusat melalui OSS.

Sementara itu, tersedianya informasi industri secara lengkap dan menunjukkan fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, informasi industri tersedia secara lengkap dengan capaian 100%, pada tahun 2024 kembali mencapai 125%. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan jumlah industri besar di provinsi	%	25,81	4,74	0,77	2,55	4,90
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	0	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	46,92	0	100	11,11	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	0	75	100	125

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

IV. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tren peningkatan selama periode lima tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk membiayai pegawai di luar sektor pendidikan dan kesehatan, yang menunjukkan penambahan jumlah pegawai atau penyesuaian gaji dan tunjangan.

Kemudian persentase PAD menunjukkan fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2024 dengan kecenderungan menurun dari sebesar 122,33 persen menjadi sebesar 50,05 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah.

Opini laporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan stabilitas yang konsisten selama periode 2020-2024, dengan capaian Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa opini terhadap laporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori yang baik, mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang cukup stabil. Maturitas SPIP juga menunjukkan stagnasi pada level 3. Kapabilitas APIP menunjukkan peningkatan yang bertahap dari level 2 pada tahun 2020 menjadi level 3 pada tahun 2022-2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya untuk memperkuat kapasitas pengawasan internal, yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	14,01	20,15	24,14	23,07	29,01
2	Persentase PAD	%	122,33	0,86	48,15	43,33	50,05
3	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	54,15	61,03	61,86	58,58	64,37
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	3

Sumber : BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

2. Kepegawaian

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Provinsi Kepulauan Riau terjadi fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari sebesar 85,70% pada tahun 2022 menjadi sebesar 87,28% pada tahun 2024. Sedangkan rasio

pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), juga menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan jabatan struktural ke fungsional dari sebesar 10,05% pada tahun 2020 menjadi sebesar 36,88% pada tahun 2024. Kemudian rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dari sebesar 50,66% pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,83% pada tahun 2024.

**Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	-	-	85,70	83,34	87,28
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,5	12,68	32,34	32,84	36,88
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	50,66	57,51	65,83

Sumber : BKD dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan dalam mempertahankan transparansi informasi. Sebaliknya, akses publik terhadap informasi keuangan daerah menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Selama periode 2020 hingga 2024, capaian tetap berada di angka 100 persen, yang menandakan bahwa informasi keuangan daerah selalu tersedia secara lengkap dan dapat diakses oleh publik. Konsistensi ini mencerminkan komitmen Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga transparansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Kunci Transparansi dan Partisipasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase (%)	100	78,87	96,14	78,87	80,45
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum gambaran keuangan daerah dalam RPJMD mencakup analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah, dan gambaran proyeksi keuangan daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Kuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur secara sistematis dan terencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi perkiraan penerimaan, belanja daerah dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Peraturan Daerah APBD menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.2.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

A. Kinerja APBD Secara Umum

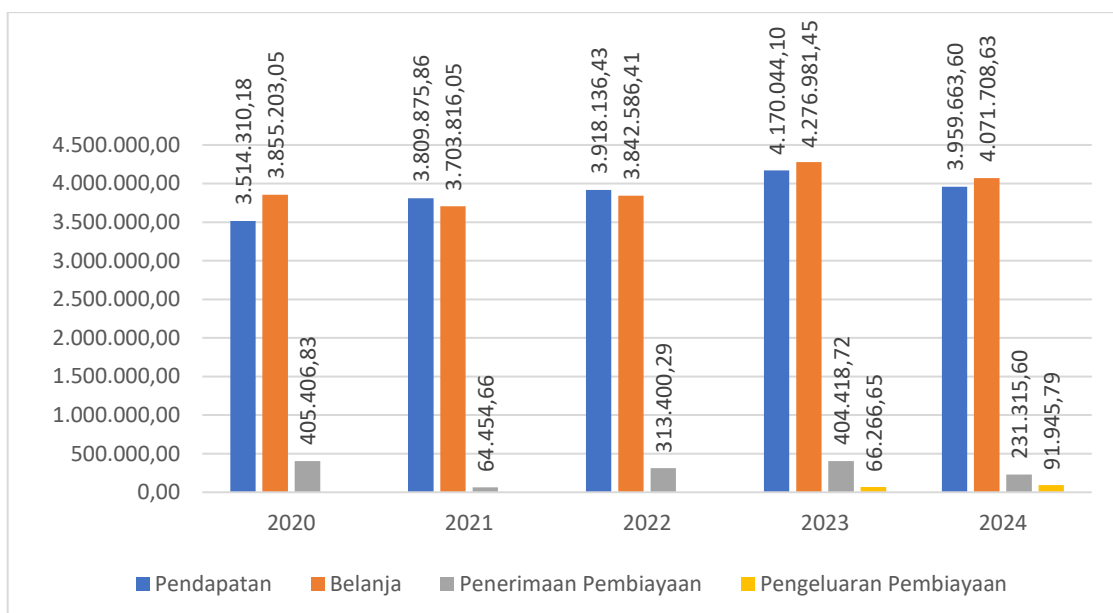
Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dilihat dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah realisasi kinerjanya menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp3.514.310,18 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp3.959.663,60 juta pada tahun 2024, mencapai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp4.170.044,10 juta. Dilihat dari pencapaian terhadap target, pendapatan daerah tahun 2020, 2021 dan 2024 belum mencapai target Perubahan APBD, sedangkan tahun 2022 dan 2023 telah mencapai target Perubahan APBD. Tingkat capaian target pendapatan dalam kurun waktu lima tahun berkisar antara 92,62% hingga 107,5%.

Dari sisi belanja daerah, realisasi menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp3.855.203,05 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.4.071.708,63 juta pada tahun 2024. Realisasi belanja daerah dapat dikatakan baik karena konsisten di angka 92,24% hingga 98,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dianggarkan dalam APBD dan Perubahan APBD dapat terlaksana dengan baik.

Tren kinerja realisasi yang baik juga ditunjukkan dari sisi realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari sebesar Rp405.406,83 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp231.315,60 pada tahun 2024. Tingkat realisasi berkisar antara 94,23% hingga 100,04%. Realisasi pengeluaran pembiayaan hanya ada mulai tahun 2023 sebesar Rp66.266,65 juta menjadi sebesar Rp91.945,79 juta pada tahun 2024. Tingkat capaian berkisar antara atas 98,68% hingga 99,88%.



Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Gambar 2.42 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Secara rinci pencapaian kinerja APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.74 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PENDAPATAN	3.524.153,17	3.514.310,18	99,72	3.854.182,05	3.809.875,86	98,85	3.644.669,78	3.918.136,43	107,5	4.094.098,08	4.170.044,10	101,86	4.275.037,23	3.959.663,60	92,62
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.165.900,40	1.195.637,69	102,55	1.436.072,74	1.375.770,28	95,8	1.444.560,17	1.675.729,89	116	1.710.018,21	1.806.972,83	105,67	2.020.676,42	1.981.830,00	98,08
1.2	Pendapatan Transfer	2.356.768,86	2.317.188,59	98,32	2.390.535,70	2.406.531,96	100,67	2.198.844,57	2.241.141,50	101,92	2.382.801,15	2.361.792,54	99,12	2.250.268,12	1.976.533,07	87,84
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.483,90	1.483,90	100	27.573,62	27.573,62	100	1.265,04	1.265,04	100	1.278,72	1.278,72	100	4.092,70	1.300,53	31,78
2b	BELANJA	3.929.519,42	3.855.203,05	98,11	3.918.696,02	3.703.816,05	94,52	3.977.271,43	3.842.586,41	96,61	4.432.452,07	4.276.981,45	96,49	4.414.198,80	4.071.708,63	92,24
2b.1	Belanja Operasi	2.778.223,67	2.721.582,44	97,96	2.940.216,71	2.771.185,71	94,25	2.719.719,40	2.619.539,68	96,32	2.975.920,02	2.888.146,53	97,05	3.222.810,00	2.987.202,68	92,69
2b.2	Belanja Modal	602.152,91	586.608,80	97,42	377.456,75	338.332,23	89,63	580.852,22	552.161,76	95,06	660.703,18	618.877,44	93,67	344.997,52	307.296,33	89,07
2b.3	Belanja Tidak Terduga	5.892,84	2.297,33	38,99	28.454,56	19.134,02	67,24	709,20	00	0	6.960,78	2.413,03	34,67	4.773,67	2.065,42	43,27
2b.4	Belanja Transfer	543.250,00	544.714,48	100,27	572.568,00	575.164,08	100,45	675.990,61	670.884,96	99,24	788.868,10	767.544,45	97,3	841.617,61	775.144,20	92,10
Surplus / (Defisit)		(405.366,25)	(340.892,87)	84,10	(64.513,97)	106.059,82		(332.601,65)	75.550,01		(338.353,99)	(106.937,35)	31,61	(139.161,57)	(112.045,03)	80,51
3	PEMBIAYAAN															
3.1	Penerimaan Pembiayaan	405.366,25	405.406,83	100,01	64.513,97	64.454,66	99,91	332.601,65	313.400,29	94,23	405.506,59	404.418,72	99,73	231.214,72	231.315,60	100,04
3.2	Pengeluaran Pembiayaan										67.152,60	66.266,65	98,68	92.053,14	91.945,79	99,88
Pembiayaan Netto		405.366,25	405.406,83	100,01	64.513,97	64.454,66	99,91	332.601,65	313.400,29	94,23	338.353,99	338.152,07	99,94	139.161,57	139.369,81	100,15
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	64.513,97		0,00	170.514,47		0,00	388.950,30		0,00	231.214,72		-	27.324,78	

Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

B. Kinerja Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pendapatan Transfer yang bersumber dari pos transfer pemerintah pusat; (3) Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) cukup fluktuatif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

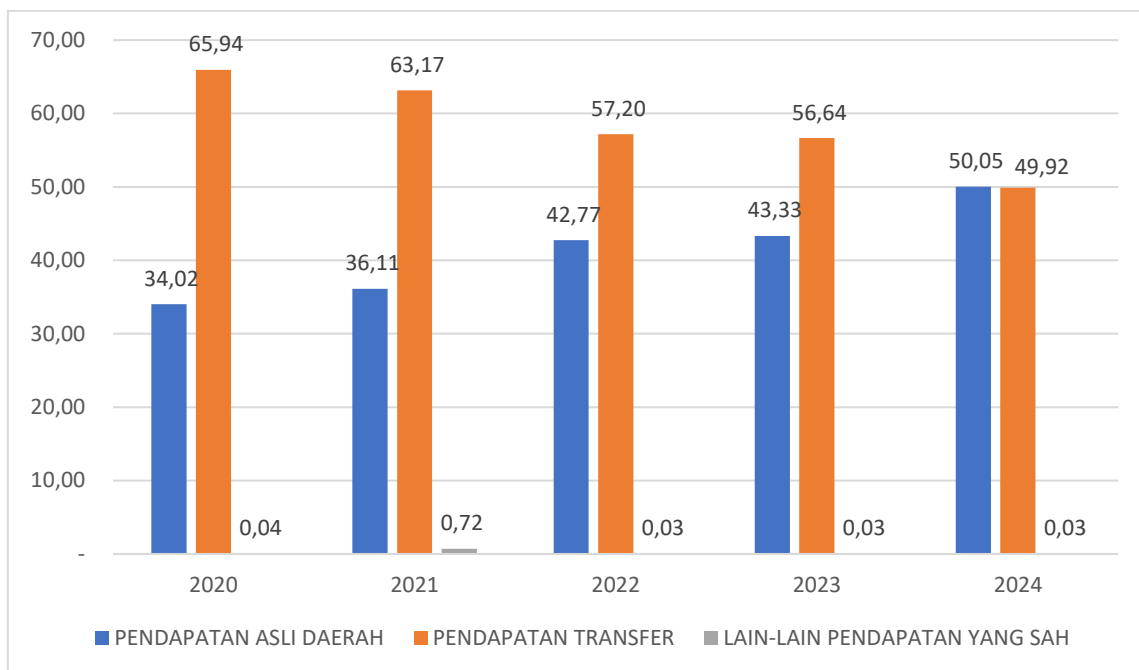
**Tabel 2.75 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024**

Tahun	Target Pendapatan (Juta Rp)	Realisasi Pendapatan (Juta Rp)	%
2020	3.524.153,17	3.514.310,18	99,72
2021	3.854.182,05	3.809.875,86	98,85
2022	3.644.669,78	3.918.136,43	107,50
2023	4.094.098,08	4.170.044,10	101,86
2024	4.275.037,23	3.959.663,59	92,62

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 107,50% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 92,62%. Sementara itu jika dilihat dari sisi nominal, realisasi tertinggi berada pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.170.044,10 juta dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp3.514.310,18 juta. Perkembangan pendapatan daerah belum memadai untuk mendanai target pembangunan ke depan, perlu dilakukan penggalian potensi pendapatan asli daerah.

Proporsi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) didominasi oleh pendapatan transfer rata-rata sebesar 58,57%, selanjutnya diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 41,26%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,17%. Secara umum derajat desentralisasi fiskal yang diukur dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dari sebesar 34,01% pada tahun 2020 menjadi sebesar 50,05% pada tahun 2024. Selengkapnya perkembangan kontribusi masing-masing unsur pendapatan daerah terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Gambar 2.43 Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.76 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1b	PENDAPATAN	3.524.153,17	3.514.310,18	99,72	3.854.182,05	3.809.875,86	98,85	3.644.669,78	3.918.136,43	107,5	4.094.098,08	4.170.044,10	101,86	4.275.037,23	3.959.663,60	92,62
1b.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.165.900,40	1.195.637,69	102,55	1.436.072,74	1.375.770,28	95,8	1.444.560,17	1.675.729,89	116	1.710.018,21	1.806.972,83	105,67	2.020.676,42	1.981.830,00	98,08
1b.1.1	Pajak Daerah	944.406,06	1.033.430,81	109,43	1.074.270,33	1.191.202,76	110,88	1.285.015,65	1.492.764,32	116,17	1.545.528,27	1.631.489,16	105,56	1.738.323,17	1.777.704,39	102,27
1b.1.2	Retribusi Daerah	97.653,10	5.734,87	5,87	207.569,62	12.274,39	5,91	10.461,42	6.856,07	65,54	17.158,83	12.203,62	71,12	155.935,54	148.286,24	95,09
1b.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	6.414,98	2.064,42	32,18	53.035,62	3.035,62	5,72	2.490,32	2.490,32	100	18.300,00	2.449,33	13,38	34.003,22	1.904,91	5,60
1b.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	117.426,25	154.407,59	131,49	101.197,17	169.257,51	167,26	146.592,77	173.619,18	118,44	129.031,11	160.830,72	124,64	92.414,48	53.934,46	58,36
1b.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.356.768,86	2.317.188,59	98,32	2.390.535,70	2.406.531,96	100,67	2.198.844,57	2.241.141,50	101,92	2.382.801,15	2.361.792,54	99,12	2.250.268,12	1.976.533,07	87,84
1b.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	2.321.842,41	2.282.262,14	98,3	2.346.098,38	2.362.094,64	100,68	2.148.695,92	2.190.992,84	101,97	2.376.107,40	2.355.098,80	99,12	2.235.949,56	1.965.217,98	87,89
1b.2.3	Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya	34.926,45	34.926,45	100	44.437,32	44.437,32	100	50.148,65	50.148,65	100	6.693,75	6.693,75	100	14.318,55	11.315,09	79,02
1b.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.483,90	1.483,90	100	27.573,62	27.573,62	100	1.265,04	1.265,04	100	1.278,72	1.278,72	100	4.092,70	1.300,53	31,78
1b.3.1	Pendapatan Hibah	1.483,90	1.483,90	100	1.201,00	1.201,00	100	1.265,04	1.265,04	100	1.278,72	1.278,72	100	4.092,70	1.300,53	31,78
1b.3.3	Pendapatan Lainnya				26.372,62	26.372,62	100									

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2024)

C. Kinerja Belanja Daerah

Secara umum struktur belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (1) belanja operasi yang meliputi; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan; (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga; dan (4) belanja transfer.

Realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) cukup fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

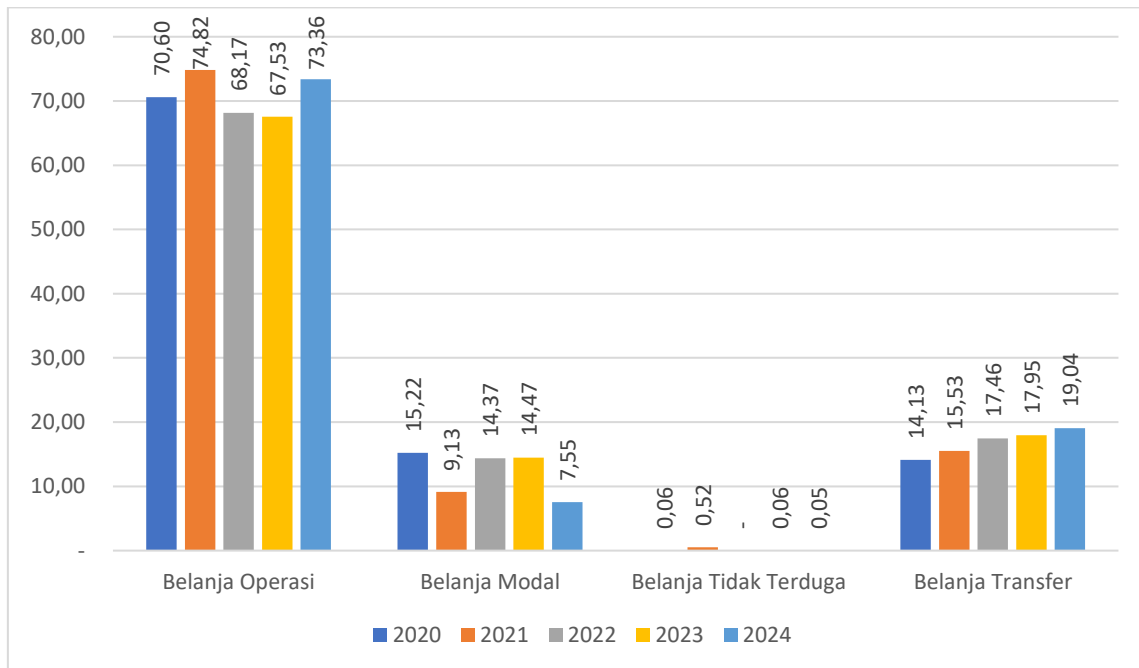
Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Juta Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Juta Rp)	%
2020	3.929.519,42	3.855.203,05	98,11
2021	3.918.696,02	3.703.816,05	94,52
2022	3.977.271,43	3.842.586,41	96,61
2023	4.432.452,07	4.276.981,45	96,49
2024	4.414.198,80	4.071.708,63	92,24

Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 98,11% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 92,24%. Sementara itu jika dilihat dari sisi nominal, realisasi belanja daerah tertinggi justru berada pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.276.981,45 juta dan terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.855.203,05 juta.

Proporsi unsur-unsur belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) terbesar adalah Belanja Operasi rata-rata selama lima tahun sebesar 70,90%, selanjutnya belanja transfer dengan persentase rata-rata pertahun sebesar 16,82%, belanja modal sebesar 12,15%, dan belanja tak terduga sebesar 0,05%.

Perkembangan proporsi unsur-unsur belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu lima tahun terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Gambar 2.44 Perkembangan Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Perkembangan realisasi masing-masing unsur belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan rencana anggaran selama kurun waktu lima tahun terlihat pada tabel berikut ini.



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.78 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2b	BELANJA	3.929.519,42	3.855.203,05	98,11	3.918.696,02	3.703.816,05	94,52	3.977.271,43	3.842.586,41	96,61	4.432.452,07	4.276.981,45	96,49	4.414.198,80	4.071.708,63	92,24
2b.1	Belanja Operasi	2.778.223,67	2.721.582,44	97,96	2.940.216,71	2.771.185,71	94,25	2.719.719,40	2.619.539,68	96,32	2.975.920,02	2.888.146,53	97,05	3.222.810,00	2.987.202,68	92,69
2b.1.1	Belanja Pegawai	1.020.129,78	1.004.932,69	98,51	974.785,01	932.136,66	95,62	1.033.407,42	1.016.168,58	98,33	1.131.988,00	1.100.521,28	97,22	1.329.553,42	1.309.833,87	98,52
2b.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.110.982,29	1.082.661,19	97,45	1.444.382,42	1.328.356,87	91,97	1.430.736,02	1.360.825,30	95,11	1.439.819,11	1.405.114,29	97,59	1.502.668,21	1.311.147,69	87,25
2b.1.3	Belanja Bunga							2.500,00	664,05	26,56	9.100,00	8.623,44	94,76	4.050,00	3.692,56	91,17
2b.1.4	Belanja Subsidi										5.139,75	4.143,88	80,62	1.400,00	944,30	67,45
2b.1.5	Belanja Hibah	620.242,70	607.947,46	98,02	519.604,76	509.651,42	98,08	249.256,55	238.079,77	95,52	381.759,53	362.326,21	94,91	380.037,01	357.581,33	94,09
2b.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.868,90	26.041,10	96,92	1.444,52	1.040,76	72,05	3.819,42	3.801,99	99,54	8.113,62	7.417,43	91,42	5.101,37	4.002,93	78,47
2b.1.7	Belanja Bantuan Keuangan															
2b.2	Belanja Modal	602.152,91	586.608,80	97,42	377.456,75	338.332,23	89,63	580.852,22	552.161,76	95,06	660.703,18	618.877,44	93,67	344.997,52	307.296,33	89,07
2b.3	Belanja Tidak Terduga	5.892,84	2.297,33	38,99	28.454,56	19.134,02	67,24	709,20	0	0	6.960,78	2.413,03	34,67	4.773,67	2.065,42	43,27
2b.4	Belanja Transfer	543.250,00	544.714,48	100,27	572.568,00	575.164,08	100,45	675.990,61	670.884,96	99,24	788.868,10	767.544,45	97,3	841.617,61	775.144,20	92,10
2b.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	517.000,00	518.464,48	100,28	553.868,00	561.664,08	101,41	654.199,81	652.632,19	99,76	780.468,10	759.191,87	97,27	812.172,11	748.291,20	92,13
2b.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26.250,00	26.250,00	100	18.700,00	13.500,00	72,19	21.790,80	18.252,78	83,76	8.400,00	8.352,58	99,44	29.445,50	26.853,00	91,20

Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

D. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan meliputi SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2020-2024 menerapkan kebijakan defisit anggaran, yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah. Realisasi pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024, terjadi surplus pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada tahun 2020, 2023 dan 2024 terjadi defisit.

Gambaran realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.79 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	PEMBIAYAAN															
3.1	Penerimaan Pembiayaan	405.366,25	405.406,83	100,01	64.513,97	64.454,66	99,91	332.601,65	313.400,29	94,23	405.506,59	404.418,72	99,73	231.214,72	231.315,60	100,04
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	405.366,25	405.406,83	100,01	64.513,97	64.454,66	99,91	332.601,65	313.400,29	94,23	405.506,59	388.950,30	95,72	231.214,72	231.214,72	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah															
3.2	Pengeluaran Pembiayaan										67.152,60	66.266,65	98,68	92.053,14	91.945,79	99,88
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo										67.152,60	66.266,65	98,68	92.053,14	91.945,79	99,88
	Pembiayaan Netto	405.366,25	405.406,83	100,01	64.513,97	64.454,66	99,91	332.601,65	313.400,29	94,23	338.353,99	338.152,07	99,94	139.161,57	139.369,81	100,15
	SISA LEBIH (KURANG)	0,00	64.513,97		0,00	170.514,47		0,00	388.950,30		0,00	231.214,72		-	27.324,78	
	PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)															

Sumber: BKAD Provinsi Kepulauan Riau (2024)

2.2.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

Proyeksi APBD dalam kurun tahun 2025-2030 mencerminkan perkiraan kondisi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. Proyeksi keuangan daerah disusun dengan menerapkan metode sistematis-empiris, berbasis data, berupa analisis tren historis, proyeksi makro ekonomi, dan analisis terhadap potensi sumber daya daerah.

Dalam proyeksi pendapatan daerah, komponen PAD diperhitungkan kontribusinya cenderung meningkat terhadap total Pendapatan Daerah, begitu juga pendapatan transfer cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan PAD tersebut secara umum disumbangkan oleh kenaikan pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Dari analisis kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pencapaian visi dan misi daerah relatif kecil sehingga diperlukan peningkatan kapasitas fiskal melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ketiga. Penetapan besarnya pinjaman daerah disesuaikan dengan kapasitas-kemampuan membayar (*ability to pay*).

Beberapa kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas pada lini-lini unit kerja yang dapat memberikan retribusi yang cukup besar.
2. Penataan manajemen internal, penataan orientasi bisnis, dan efisiensi dalam operasional BUMD agar terdapat pembagian dividen yang cukup untuk menambah PAD, Sehingga tujuan pembentukan BUMD bisa tercapai, yakni sebagai penopang APBD dalam penyokong kesejahteraan masyarakat, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi daerah.



3. Peningkatan Penerimaan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan.
4. Penatausahaan aset secara menyeluruh dan terinci dengan melakukan evaluasi dan appraisal terhadap nilai jual dan nilai guna aset agar lebih optimal sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan belanja yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*); dan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
2. Belanja daerah dilakukan secara selektif dan tepat guna dan tepat sasaran dengan mengedepankan prioritas capaian RPJMD dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung.
3. Belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 sebagai berikut.



**Tabel 2.80 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030
(rupiah)**

NO	Uraian	2025 (Perubahan)	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Asli Daerah	1.775.011.907.866	1.771.661.677.280	1.802.692.463.003	1.843.311.496.152	1.994.695.488.693	2.017.969.178.702,00
1.1	Pajak Daerah	1.598.783.730.316	1.544.306.743.507	1.566.559.035.194	1.598.270.522.214	1.633.877.744.826	1.671.723.827.502,00
1.2	Retribusi Daerah	132.122.692.000	180.696.085.853	187.075.969.309	193.596.853.184	200.300.525.050	207.007.534.180,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.650.000.000	4.000.000.000	5.200.000.000	6.000.000.000	113.783.290.744	91.117.455.281,00
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	41.455.485.550	42.658.847.920	43.857.458.500	45.444.120.754	46.733.928.073	48.120.361.739,00
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan		46,32%	47,43%	47,61%	47,92%	49,64%	49,68%
2	Pendapatan Transfer	1.982.660.806.997	1.962.521.575.030	1.982.146.790.781	2.001.968.258.689	2.021.987.941.275	2.042.207.820.687
2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.982.660.806.997	1.962.521.575.030	1.982.146.790.781	2.001.968.258.689	2.021.987.941.275	2.042.207.820.687
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	299.772.946.997	286.273.355.000	289.136.088.550	292.027.449.436	294.947.723.930	297.897.201.169
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.199.592.477.000	1.211.588.401.770	1.223.704.285.788	1.235.941.328.646	1.248.300.741.932	1.260.783.749.351
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	460.059.226.000	464.659.818.260	469.306.416.443	473.999.480.607	478.739.475.413	483.526.870.167
2.1.5	Dana Insentif Daerah	23.236.157.000					
Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan		51,73%	52,54%	52,35%	52,04%	50,32%	50,28%
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	74.705.618.511	1.337.343.525	1.350.716.960	1.364.224.129	1.377.866.370	1.377.866.370,00
3.1	Pendapatan Hibah	1.324.102.500	1.337.343.525	1.350.716.960	1.364.224.129	1.377.866.370	1.377.866.370



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	Uraian	2025 (Perubahan)	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	73.381.516.011					
Kontribusi lain lain terhadap pendapatan		1,95%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.832.378.333.374	3.735.520.595.835	3.786.189.970.744	3.846.643.978.970	4.018.061.296.338	4.061.554.865.759
5	Belanja Daerah	3.833.234.126.412	3.967.074.441.227	3.824.461.110.518	3.711.731.482.530	3.883.148.807.612	4.061.554.865.759,00
5,1	Belanja Operasi	2.879.075.282.161	2.843.246.359.764	2.551.041.904.359	2.551.355.151.720	2.734.528.199.258	2.572.466.459.727,70
5.1.1	Belanja Pegawai	1.408.891.705.470	1.491.038.629.953	1.180.676.991.223	1.153.993.193.691	1.205.418.388.901	1.218.466.459.728
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.289.180.072.815	1.287.960.072.815	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000
5.1.3	Belanja Subsidi	2.864.494.061	2.864.494.061	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5.1.4	Belanja Bunga		10.540.441.672	16.364.913.136	13.361.958.029	5.109.810.357	
5.1.5	Belanja Hibah	175.407.564.814	50.000.000.000	50.000.000.000	80.000.000.000	220.000.000.000	50.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.731.445.000	842.721.263	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja		75,11%	71,67%	66,70%	68,74%	70,42%	63,34%
5,2	Belanja Modal	243.051.040.572	582.076.132.160	728.424.328.643	609.930.368.538	592.396.519.678	926.921.803.161
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	1.595.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.966.309.174	90.162.940.092	80.000.000.000	80.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.914.361.912	252.805.798.103	238.000.000.000	206.599.999.999	130.000.000.000	200.000.000.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.150.510.981	219.285.549.609	387.924.328.643	287.940.746.603	321.853.218.301	613.221.803.161
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.474.839.774	17.022.323.751	19.000.000.000	21.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.095.018.731	1.204.520.604	1.500.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	Uraian	2025 (Perubahan)	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja		6,34%	14,67%	19,05%	16,43%	15,26%	22,82%
5.3	Belanja Tidak Terduga	19.935.902.987	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	19.935.902.987	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Kontribusi BTT Terhadap Belanja		0,52%	0,38%	0,39%	0,40%	0,39%	0,37%
5.4	Belanja Transfer	691.171.900.692	526.751.949.303	529.994.877.516	535.445.962.272	541.224.088.676	547.166.602.870
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	668.277.900.692	505.386.949.303	509.994.877.516	515.445.962.272	521.224.088.676	527.166.602.870
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	668.277.900.692	505.386.949.303	509.994.877.516	515.445.962.272	521.224.088.676	527.166.602.870
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	22.894.000.000	21.365.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.4.2.4	Bantuan Keuangan Khusus	22.894.000.000	21.365.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja		18,03%	13,28%	13,86%	14,43%	13,94%	13,47%
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.833.234.126.412	3.967.074.441.227	3.824.461.110.518	3.711.731.482.530	3.883.148.807.612	4.061.554.865.759
SURPLUS /DEFISIT		(855.793.038)	(231.553.845.392)	(38.271.139.774)	134.912.496.440	134.912.488.726	-
6	Pembiayaan Daerah	5.855.793.038	250.600.000.000	149.400.000.000	-	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.855.793.038	250.600.000.000	149.400.000.000	-	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.855.793.038	-	-	-	-	-
6.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		250.600.000.000	149.400.000.000	-		



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	Uraian	2025 (Perubahan)	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		5.855.793.038	250.600.000.000	149.400.000.000	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		19.046.154.608	111.128.860.226	134.912.496.440	134.912.488.726	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.000.000.000	19.046.154.608	111.128.860.226	134.912.496.440	134.912.488.726	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000.000	19.046.154.608	111.128.860.226	134.912.496.440	134.912.488.726	-
PEMBIYAAAN NETTO		855.793.038	231.553.845.392	38.271.139.774	(134.912.496.440)	(134.912.488.726)	-
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		-	-	-	-	-	-

Sumber: TAPD Provinsi Kepulauan Riau (2025)

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 teridentifikasi sebagai berikut.

1) Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat didominasi oleh lautan serta terdiri dari banyak pulau dan terbentang luas di Laut Cina Selatan (saat ini Laut Natuna Utara). Kondisi geografis semacam ini menghadirkan tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antar daerah. Wilayah Provinsi Kepulauan yang tersebar dengan jarak yang signifikan dan medan yang beragam, termasuk pulau-pulau kecil dan terpencil, menjadi hambatan utama dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Kepulauan Riau.

Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau masih menjadi tantangan signifikan dalam hal daya saing kualitas infrastruktur. Rasio konektivitas Kepulauan Riau masih rendah, baru mencapai 0,59 pada tahun 2024. Keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau juga menghambat distribusi barang dan jasa secara merata. Biaya logistik yang tinggi dan waktu tempuh yang lama menjadi kendala utama bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar di seluruh wilayah. Hal ini juga membatasi aksesibilitas penduduk untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan peluang ekonomi. Kurangnya konektivitas antar pulau menghambat pergerakan modal dan investasi di Kepulauan Riau. Peluang usaha di pulau-pulau kecil dan terpencil terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merata. Potensi wisata bahari yang melimpah pun sulit diakses, menghambat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kepulauan Riau.

Peningkatan konektivitas mencerminkan perbaikan dalam layanan angkutan darat, penyeberangan, dan laut, menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan

mengintegrasikan antar pulau. Secara umum akses dan kesempatan masyarakat terhadap layanan pembangunan masih terbatas jika dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi urgensi peningkatan konektivitas dan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, terutama mengingat tantangan geografis yang bercirikan kepulauan.

Di sisi lain, Persebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak merata. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 sebesar 264/km², sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Kepadatan penduduk terpusat di wilayah perkotaan seperti Tanjungpinang dengan kepadatan penduduk 1.579 jiwa/km², Batam dengan kepadatan penduduk 1.234 jiwa/km² dan Karimun dengan kepadatan penduduk 283 jiwa/km². Sementara di beberapa daerah lainnya kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar di banyak pulau. Hal ini berdampak terhadap pemenuhan fasilitas publik dan layanan dasar yang belum merata.

Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kemampuan Kepulauan Riau untuk bersaing dalam menarik investasi, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memperluas akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika daya saing infrastruktur tidak ditingkatkan, Kepulauan Riau berisiko tertinggal dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur yang dapat mengimbangi tantangan kepulauan menjadi prioritas yang mendesak untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di wilayah ini.

2) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Belum Optimal

Sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam sektor maritim yang dapat mendukung pengembangan wilayah ini di berbagai aspek. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perlu menitikberatkan fokus pada sektor maritim. Dalam RPJPN 2025-2045, Kepulauan Riau disebut sebagai salah satu fokus pengembangan kawasan strategis industri maritim, termasuk

pengembangan ekonomi biru yang berbasis keunggulan wilayah. Pengembangan ini juga diharapkan mendukung jaringan maritim yang menghubungkan kawasan strategis di Indonesia. Namun, banyak peluang di sektor maritim yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti sektor perikanan (terutama sektor perikanan budidaya), pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut terbarukan.

Dari sisi lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah mencapai sebesar 75,05. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang masih dihadapi Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Pencemaran laut akibat pembuangan limbah *sludge oil*, akibat kepadatan pelayaran kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura; (2) Meningkatnya luas kerusakan hutan dan hutan kritis; (3) Kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang cenderung terjadi pada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau terutama kerusakan terumbu karang, lamun dan mangrove; (4) Pemulihan lahan pasca tambang yang belum dilakukan reklamasi.

3) Kerentanan Terhadap Bencana Alam

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menghadirkan tantangan dalam hal konektivitas antar wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, namun juga memiliki potensi kerentanan terhadap bencana alam. Dari 11 jenis risiko bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Riau, 9 di antaranya berada pada kelas/kategori risiko tinggi yaitu: (1) Wilayah Rawan Banjir; (2) Wilayah Rawan Banjir Bandang; (3) Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem; (4) Wilayah Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi; (5) Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan; (6) Bahaya Kekeringan; (7) Bahaya Tanah Longsor; (8) Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit; dan (9) Bahaya Pandemi Covid 19. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi bencana yang efektif, termasuk peningkatan infrastruktur tahan bencana, penguatan sistem peringatan

dini, dan edukasi masyarakat untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak dari bencana-bencana tersebut.

4) Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,69% menjadi sebesar 4,78% pada tahun 2024. Namun demikian penurunan kemiskinan tersebut belum berdampak signifikan terhadap disparitas angka kemiskinan di Kabupaten/kota. Setidaknya hal ini ditunjukkan oleh perkembangan sebaran jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang secara keseluruhan tidak mengalami perubahan struktural. Artinya dengan penurunan kemiskinan yang dicapai Provinsi Kepri tidak dapat mengubah secara substansial baik komposisi tingkat kemiskinan maupun sebaran jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 masih tinggi terjadi di Kabupaten Lingga yang mencapai 9,99%, Kota Tanjungpinang sebesar 6,68%, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 6,67% sedangkan Kabupaten/kota lainnya berada pada kisaran 4,85% hingga 5,78%. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia dan kelembagaan.

5) Disparitas Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Antar Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai angka 5,02%. Daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu Batam (6,69%), Bintan (8,89%), Karimun (6,45%) dan Pertumbuhan ekonomi menengah seperti Tanjungpinang (3,78%) dan Lingga (4,42%) dan pertumbuhan ekonomi rendah seperti Natuna sebesar -3,57 dan Kepulauan Anambas sebesar -5,67%. Perbedaan variasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor-sektor dominan sebagai kontributor utama.

Kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Riau paling besar dari Kota Batam sebesar 66,01%, sedangkan terendah dari Kabupaten Lingga sebesar 1,59%. Sisanya disumbangkan kabupaten/kota yang lain dengan proporsi yang relatif proporsional antara 5,10% hingga 8,60%. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi yang paling berdampak terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berasal dari Kota Batam.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau jika dilihat dari sisi PDRB masih terfokus pada sektor-sektor tertentu seperti: (1) industri pengolahan, dengan kontribusi PDRB sebesar 41,04%; (2) konstruksi, dengan kontribusi PDRB sebesar 20,25%; (3) pertambangan dan galian, dengan kontribusi PDRB sebesar 9,72%; serta (4) perdagangan besar dan eceran, dengan kontribusi PDRB sebesar 9,25%. Hal ini menyebabkan daya saing ekonomi daerah menjadi rentan terhadap perubahan kondisi global dan domestik. Oleh karena itu diperlukan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi daerah, dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan lainnya terutama yang berhubungan dengan sektor maritim sesuai dengan potensi daerah. Kerentanan daya saing ekonomi Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi jumlah wirausahawan yang masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.

Disparitas pertumbuhan dan kontribusi ekonomi antar kabupaten/kota, dipengaruhi oleh investasi di Kabupaten/kota. Salah satu masalah utama terkait investasi adalah banyaknya rencana realisasi investasi yang tidak terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan signifikan yang menghalangi investor untuk merealisasikan proyek mereka di provinsi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sangat beragam dan dinamis. Sejumlah tantangan regulasi, birokrasi, dan sosial menghambat kemajuan proyek investasi. Selain itu, hambatan lainnya meliputi konflik lahan yang sering kali tidak terselesaikan dengan baik. Kendala infrastruktur juga memainkan peran penting dalam menghambat

realisasi investasi. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi meningkatkan biaya logistik dan operasional bagi investor, membuat investasi di Provinsi Kepulauan Riau menjadi kurang menarik dibandingkan daerah lain yang lebih maju infrastrukturnya. Kondisi geografis provinsi yang terdiri dari banyak pulau juga menambah kompleksitas dalam pembangunan infrastruktur yang efisien.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi

Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai momentum penurunan tingkat pengangguran terbuka yang konsisten setidaknya dalam 3-4 tahun terakhir. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 6,80% pada tahun 2023 menjadi sebesar 6,39% pada tahun 2024. Jika mengacu pada standar ILO, maka tingkat pengangguran alamiah berada di kisaran 3-6%. Maka, tren penurunan TPT di Kepulauan Riau harus menjadi momentum yang perlu dijaga terus menerus sehingga bisa menurunkan TPT dibawah angka 6%. Hal ini bertujuan untuk semakin mendekatkan peningkatan TPAK dengan penurunan TPT. Meningkatnya TPAK yang disertai dengan TPT yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih banyaknya para pencari kerja yang belum terserap oleh pasar kerja.

Penanganan pengangguran di Kepulauan Riau sangat penting karena pengangguran memiliki dampak negatif pada perekonomian, sosial, dan individu. Pengangguran menyebabkan penurunan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup, serta berpotensi meningkatkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Penanganan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak. Dengan tersedianya lapangan kerja, produktivitas masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

7) Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu

Sebagai daerah dengan jejak sejarah dan akar budaya Melayu yang kental, permasalahan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan

Riau merupakan salah satu tema besar dalam pembangunan daerah. Pemilihan unsur kebudayaan dalam pemuatan visi pembangunan daerah telah menjadi konsensus tekstual yang dijaga sejak Provinsi Kepulauan Riau berdiri. Sebagai Provinsi yang berbasiskan kepada budaya Melayu, maka pengarusutamaan budaya Melayu menjadi sangat penting di dalam penerapannya.

Berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengarusutamakan budaya Melayu, diantaranya sosialisasi perda budaya, pengusulan karya ilmiah dan kajian dalam penetapan warisan budaya tak benda, minimnya upaya pemugaran cagar budaya dan penglibatan para pelaku atau unsur masyarakat. Selain itu, penglibatan para pakar sejarah (sejarawan) dalam pembangunan kebudayaan belum mendapatkan apresiasi yang optimal dimana belum tersedianya dukungan sertifikasi yang optimal, termasuk dukungan terhadap para para pakar yang menjadi Tim Ahli Cagar Budaya maupun pemenuhan kecukupan Juru Pelihara dalam pelestarian cagar budaya. Tersedianya sarana prasarana ikonik seperti Museum Negeri di tingkat Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting untuk dipenuhi, terutama dikaitkan dengan masih rendahnya dimensi budaya literasi dalam pemenuhan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kepulauan Riau.

8) Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau selalu berada di atas nasional, namun masih terdapat kabupaten/kota dengan IPM di bawah provinsi dan nasional. Pada tahun 2024 IPM Provinsi Kepulauan Riau 79,89. Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang angka IPM masih di bawah nasional dan provinsi yaitu Kabupaten Lingga (68,19) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (70,93).

Meski memiliki akses ke Singapura dan Malaysia, kualitas SDM di Kepri masih tertinggal. Banyak tenaga kerja di sektor industri dan jasa berasal dari luar daerah, sementara lapangan kerja bagi masyarakat lokal masih terbatas. Kurangnya pusat penelitian, pengembangan teknologi, dan

pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri turut menghambat inovasi dan produktivitas.

Pencapaian IPM dipengaruhi oleh pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terkait layanan pendidikan mencerminkan tantangan signifikan yang perlu segera diatasi untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Salah satu isu utama adalah rendahnya partisipasi anak usia 16-18 tahun di semua jenjang pendidikan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, biaya pendidikan yang masih menjadi beban, serta keterbatasan daya tampung sekolah menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi ini. Di sisi lain, anak-anak disabilitas usia 4-18 tahun juga menghadapi hambatan serupa, dengan partisipasi mereka yang belum optimal di seluruh jenjang pendidikan. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif dan kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Selain itu, jumlah sekolah yang tersedia bagi penduduk usia pendidikan menengah masih belum memadai, ditambah dengan distribusi guru yang tidak merata di berbagai satuan pendidikan. Akibatnya, orang tua dan peserta didik cenderung memilih sekolah-sekolah favorit, yang justru memperbesar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan biaya pendidikan, penambahan daya tampung sekolah, serta pemerataan distribusi guru. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal, inklusif, dan merata bagi seluruh anak, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

Permasalahan dalam layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau mencerminkan sejumlah tantangan yang mempengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan. Pertama, cakupan penimbangan balita masih rendah, yang menunjukkan kurangnya kesadaran orang tua tentang

pentingnya pemantauan pertumbuhan anak sejak dini, serta akses yang sulit ke fasilitas kesehatan. Selain itu, cakupan ASI eksklusif juga masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima ibu-ibu mengenai pentingnya ASI serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Tingginya kasus anemia pada remaja putri juga menjadi perhatian utama, yang berkaitan dengan pola makan yang kurang seimbang dan terbatasnya program pencegahan yang efektif. Di sisi lain, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil belum optimal, terutama karena sulitnya akses ke layanan kesehatan dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin. Masalah penanggulangan TBC di wilayah ini juga belum efektif, dengan deteksi kasus yang tidak maksimal, keterlambatan pengelolaan data, dan rendahnya cakupan pencegahan. Terakhir, pelaksanaan program imunisasi menghadapi kendala, terutama terkait dengan kekurangan petugas penginput data, data imunisasi yang tidak lengkap dari klinik dan bidan swasta, serta kurangnya pemahaman petugas tentang prosedur yang benar dalam program imunisasi. Semua faktor ini berkontribusi pada belum optimalnya layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

9) Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola

Meningkatnya Indeks RB tahun 2024 memperoleh angka 82,47 (A-). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Angka tersebut masih dapat ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya nyata untuk memperkuat perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sejumlah permasalahan yang terangkum dalam evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan implikasi tata kelola pemerintahan, di antaranya seperti optimalisasi Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Internal) di masing-masing perangkat daerah, komitmen respon terhadap temuan dan rekomendasi lembaga pemeriksa yang masih

rendah, dan belum terwujudnya secara maksimal keterbukaan unit pelayanan publik. Di samping itu, permasalahan tata kelola pemerintahan juga tidak terlepas dari isu-isu yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan aset, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi problem sertifikasi aset bagi tanah milik daerah. Yang tidak kalah pentingnya termasuk bagaimana memastikan setiap perangkat daerah dapat memahami penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangannya di masing-masing perangkat daerah.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor personalia atau SDM aparatur pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pengembangan kompetensi ASN masih terbatas, sehingga masih terdapat capaian ASN yang belum mengikuti pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN juga terkendala oleh keberadaan sarana prasarana diklat yang tidak mendukung. Seterusnya, permasalahan yang terkait dengan tata Kelola pemerintahan juga dapat bermuara pada belum terpenuhinya standar kesesuaian kualifikasi dalam hal penempatan ASN, pembinaan karir pejabat fungsional dan belum optimalnya penilaian kompetensi bagi seluruh PNS.

Dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai Indeks SPBE baru mencapai 3,05%. Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan manajemen dan audit TIK yang terdapat pada domain manajemen SPBE dikarenakan masih memperoleh skor terendah jika dibandingkan dengan tiga domain utama lainnya.

Tabel 2.81 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2025-2045

Permasalahan Pembangunan RPJMD 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RPJPD 2025-2045
1. Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal	Konektivitas Antar Wilayah
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Belum Optimal	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Ketahanan Bencana Masih Rendah
3. Kerentanan Terhadap Bencana Alam.	
4. Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan
5. Disparitas Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan Antar Wilayah
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi	Pengangguran
7. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu	Masih Lemahnya Pengarusutamaan Budaya Melayu
8. Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pendidikan Kesehatan
9. Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola

Sumber: Olahan Tim Penyusun (2025)

2.3.2 Isu Strategis Daerah

A. Kondisi Lingkungan Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, berdaya ungkit, serta memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, isu global, isu nasional, serta isu regional.

1. Isu Global

Isu-isu global yang berkembang pada saat ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut

menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Perubahan demografi global dapat memberi pengaruh terhadap kondisi Indonesia dan Kepulauan Riau khususnya. Salah satu tantangan yang berpotensi memunculkan masalah di kemudian hari yang ditimbulkan akibat pertambahan populasi dunia berkaitan dengan ketersediaan pasokan pangan bagi penduduk. Meskipun tren Indeks Ketahanan Pangan Kepulauan Riau mengalami peningkatan, namun tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini ditunjukkan dengan ranking Kepri yang berada pada urutan ke-30 dibandingkan dengan wilayah lain, disamping itu Provinsi Kepulauan Riau termasuk 5 provinsi dengan skor terendah dalam hal Indeks Ketahanan Pangan.

2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antar negara menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Nilai strategis kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang

berdaya saing dan berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara berkembang. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Dampak dari konflik dan perang dalam skala kawasan dapat menimbulkan kerentanan bagi Provinsi Kepulauan Riau secara khusus. Perang yang berdampak terhadap situasi ekonomi dunia dengan akibat naiknya inflasi secara global secara langsung telah berpengaruh terhadap pembentukan harga di seluruh dunia. Hal ini diperburuk dengan kompetisi vis a vis pengetatan terhadap komoditas yang menjadi salah satu obyek perdagangan dunia yang terdampak akibat perang. Provinsi Kepulauan Riau yang notabene provinsi kepulauan yang sebagian besar pasokan komoditasnya bergantung pada alur pelayaran laut (maritim) akan menghadapi kerentanan dari segi fluktuasi harga.

Namun demikian, dari segi proyeksi geoekonomi, berkurangnya ketergantungan terhadap sektor komoditas dan potensi kemajuan dalam penguatan institusi perekonomian sebagai keunggulan kompetitif di pihak negara-negara berkembang akan memberi pengaruh terhadap eksistensi Provinsi Kepulauan Riau yang pembentukan ekonominya didominasi oleh kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur). Nilai tambah yang dimiliki oleh Provinsi

Kepulauan Riau sebagai tujuan investasi di antaranya insentif dari keunggulan komparatif Kota Batam sebagai kawasan FTZ (*free trade zone*) termasuk sejumlah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang telah dikembangkan (KEK Nongsa Digital, KEK Batam Aero Technic, KEK Tanjung Sauh). Selain Batam, daerah lainnya seperti Karimun dan Bintan juga memiliki keunggulan kawasan dari penerapan FTZ dan sejumlah KEK yaitu KEK Galang Batang yang terdapat di Kabupaten Bintan. Optimisme Indonesia yang mampu memperkuat institusi dan stabilitas makro ekonominya dan menjadi salah satu pemain kunci di tahun 2050 harus dimaksimalkan sebagai jalan (*track*) penguatan sektor industri di Provinsi Kepulauan Riau dengan berbagai keunggulan kawasan dan letak geografisnya di jalur perdagangan dunia. Yang tidak kalah penting adalah juga mempersiapkan basis Sumber Daya Manusia lokal yang berdaya saing sebagai salah satu faktor kunci untuk memperoleh manfaat dari perubahan geoekonomi dunia.

3) Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti nanotechnology, *blockchain*, robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi

imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi, teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya), inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk

mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

5) Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi

dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara- negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

6) Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disruptasi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

7) Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual- metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8) Persaingan Sumberdaya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan

aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Penerapan ekonomi hijau tidak hanya sekadar mengubah proses produksi atau kebijakan, tetapi juga membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi khusus untuk mendorong transisi berkelanjutan. Tenaga kerja hijau akan menjadi tulang punggung ekonomi hijau, dan ekonomi hijau tidak bisa berjalan tanpa pekerjaan hijau (*green jobs*) karena kompleksitas teknologi dan regulasi sehingga membutuhkan keahlian khusus, industri konvensional harus bertransformasi sehingga pekerja perlu *upskilling*, permintaan pasar akan produk hijau meningkat yang selanjutnya akan menciptakan lapangan kerja baru, serta kebijakan global mendorong praktik berkelanjutan sehingga SDM harus adaptif.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan baru akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

2. Isu Nasional

Isu-isu nasional yang berkembang pada saat ini dan dijadikan sebagai isu rancangan teknokrasi RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1) Transformasi Sosial

Transformasi sosial pada tahun 2025-2029 diarahkan pada upaya penguatan pondasi transformasi sosial. Transformasi Sosial

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pada bidang pendidikan masih terdapat beberapa tantangan, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Aspek perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program

yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

2) Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah dalam rangka keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (*demand*).

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa subsektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Indonesia masih berada pada era *Industrial Revolution 2.0*. Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri.

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut

disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal.

Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga

pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan urban sprawl berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3) Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Ruang lingkup tata kelola dalam RPJMN 2025-2029 meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Akan tetapi masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola. Pada akhirnya, persoalan-persoalan tersebut menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan

Penjaminan kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi dan teknologi informasi menjadi ancaman sekaligus peluang dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan. Dalam bidang politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*. Kondisi eksternal diiringi dengan belum terselesaikannya perundingan batas wilayah negara serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra

dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan *higher for longer*, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Transfer ke Daerah, serta imbal hasil obligasi yang relatif masih tinggi dibanding negara sekawasan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Peningkatan populasi Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai,

mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada 2028.

Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

3. Isu Regional (Sumatera)

Isu-isu regional wilayah Sumatera yang berkembang pada saat ini dan dijadikan sebagai isu RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dll.
- 2) Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
- 3) Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
- 4) Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.
- 5) Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infra struktur konektivitas antarwilayah.
- 6) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.



B. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, serta dengan mempertimbangkan isu-isu global, nasional, dan regional, telah dirumuskan beberapa isu strategis untuk Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan isu strategis ini didasarkan pada kriteria: (1) pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan; (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) dampak luas terhadap daerah dan masyarakat; (4) potensi daya ungkit yang besar terhadap pembangunan daerah; dan (5) kemudahan dalam pengelolaan.

Tabel 2.82 Keterkaitan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Dengan Permasalahan Pembangunan, Isu Regional, Isu Nasional, dan Isu Global

Isu Regional	Isu Nasional	Isu Global	Permasalahan Pembangunan Kepri 2025-2029	Isu Strategis Kepri 2025-2029
- Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T	Transformasi Sosial	- Demografi Global - Urbainsasi Dunia	Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender yang Belum Optimal
-	Transformasi Ekonomi	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Disparitas Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota	Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal



Isu Regional	Isu Nasional	Isu Global	Permasalahan Pembangunan Kepri 2025-2029	Isu Strategis Kepri 2025-2029
		▪ Keuangan Internasional ▪ Kelas Menengah		
-	▪ Transformasi Ekonomi ▪ Transformasi Sosial	▪ Perdagangan Internasional ▪ Kelas Menengah	▪ Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi	▪ Kemiskinan dan Pengangguran
-	▪ Transformasi Tata Kelola ▪ Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	▪ Disrupsi Teknologi	▪ Belum optimalnya Transformasi tata kelola	▪ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal
-	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	▪ Demografi Global	▪ Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu	▪ Pemajuan Budaya melayu yang Belum Optimal



Isu Regional	Isu Nasional	Isu Global	Permasalahan Pembangunan Kepri 2025-2029	Isu Strategis Kepri 2025-2029
▪ Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. ▪ Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	▪ Persaingan Sumberdaya Alam ▪ Perubahan Iklim	▪ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Belum Optimal ▪ Kerentanan Terhadap Bencana Alam.	▪ Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infra struktur konektivitas antarwilayah	▪ Transformasi Ekonomi ▪ Transformasi Sosial	▪ Urbanisasi Dunia	▪ Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal	▪ Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi

Sumber: Olahan Tim Penyusun (2025)

Hasil perumusan isu strategis untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 meliputi:

1) Kualitas Pembangunan Manusia dan Kesenjangan Gender yang Belum Optimal

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. Intensitas isu ini menjadi lebih besar karena tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah kabupaten/kota yaitu antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain terutama dengan Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi kesehatan dilihat dari Usia Harapan Hidup dengan capaian sebesar 75,12 tahun pada tahun 2024. Kondisi Pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata lama sekolah sebesar 10,50 tahun pada tahun 2024, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,27 tahun pada tahun 2024. Kondisi kesetaraan gender belum optimal, dapat dilihat dari IKG Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,309 pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah dari laki-laki walaupun harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, pendapatan perkapita perempuan yang lebih rendah dari laki-laki, dan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Isu strategis ini juga terkait dengan stunting, merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak-anak di bawah usia lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Kondisi ini bukan hanya masalah fisik (perawakan pendek) tetapi juga mengganggu perkembangan kognitif dan kesehatan anak, serta dapat berisiko terhadap penyakit kronis di kemudian hari.

2) Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal.

Sebesar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah laut atau seluas 17.012,97 km², sisanya 4.21 persen atau seluas 8.269,708 km² merupakan daratan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau mendukung potensi lestari sumber daya perikanan hingga sebanyak 1.1 juta ton per tahun. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menyimpan segudang sumber daya kemaritiman, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan beragam komoditi ekspor unggulan, seperti lobster dan kepiting. Pada sektor perikanan tangkap, sebagian besar potensi berasal dari pengelolaan perikanan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya pada Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, serta Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup besar terutama dengan adanya peningkatan sebesar 43% pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang. Kondisi ini besar dipengaruhi oleh faktor peralihan profesi masyarakat sekitar menjadi nelayan akibat krisis ekonomi global. Namun demikian di saat yang sama dengan potensi sumber daya yang begitu besar rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

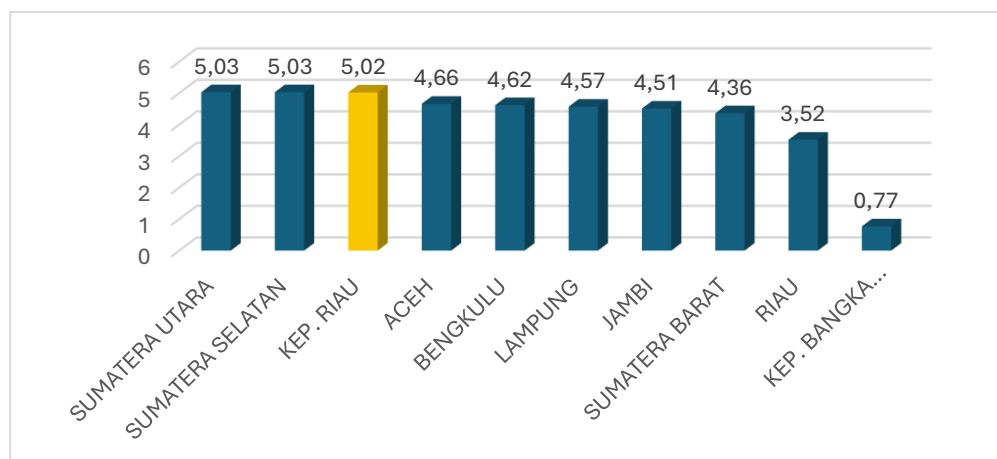
Arah pengembangan kewilayahan mengacu pada dokumen RPJPN periode 2025-2045 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang nasional pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau *Blue Economy*. Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut memiliki potensi maritim yang sangat besar, sehingga potensi ini mampu menjadi titik tolak pembangunan yang transformatif bagi Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan. Tentunya fokus pembangunan ini harus sinergi dengan berbagai tujuan dan sumber daya lainnya, dalam hal ini aspek-aspek pembangunan lain perlu diarahkan kepada koridor pembangunan yang berbasis maritim. Misalnya,

aspek ekonomi akan mengalir pada arus ekonomi biru yang memberdayakan perairan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, pengarusutamaan maritim ke dalam komponen lain dapat menopang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih optimal.

Dalam upaya membangun ekosistem maritim di Provinsi Kepulauan Riau terdapat tiga aspek pembangunan sesuai konsepsi ekonomi biru antara lain:

1. *Blue Communities*, memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sektor maritim. Termasuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya potensi laut, mempromosikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, membangun infrastruktur maritim, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait kegiatan maritim, serta mendorong kegiatan ekonomi berbasis maritim.
2. *Blue Production*, meningkatkan produktivitas pengelolaan perikanan dan budidaya perairan berbasis pembangunan ekosistem melalui optimalisasi kontribusi sektor perikanan dan pengolahan hasil laut dengan memanfaatkan teknologi dan bioteknologi kelautan, penjaminan mutu produk, serta didukung oleh investasi.
3. *Blue Trade*, bertujuan untuk meningkatkan nilai produk, meningkatkan pasar dan sebaran produk, serta akses terhadap perdagangan dengan pengembangan infrastruktur kemaritiman serta perluasan konektivitas antarwilayah.

Pengembangan ekonomi maritim diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Posisi relatif Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat ketiga tertinggi, setelah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Gambaran posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera terlihat pada gambar berikut.

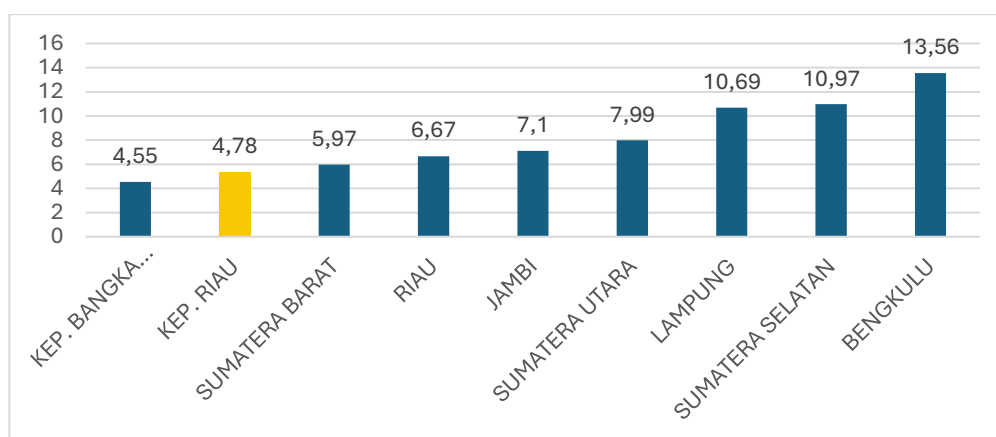


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.45 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024 (%)

3) Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebesar 4,78%. Dibandingkan dengan provinsi lain diwilayah Sumatera, kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Bangka Belitung.



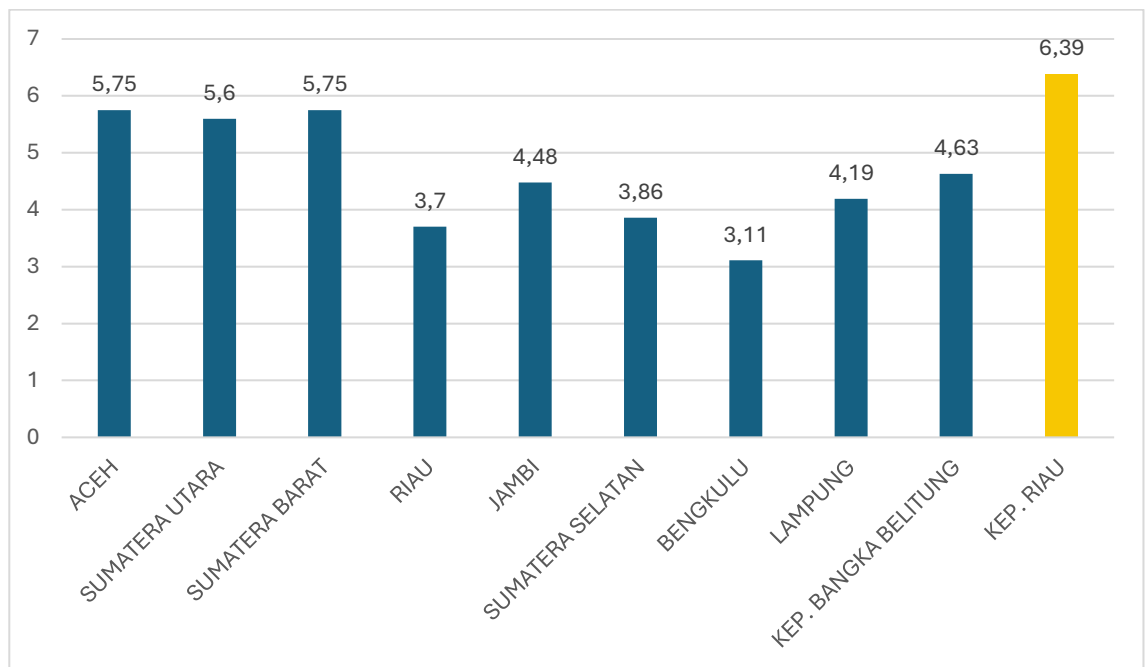
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.46 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2024



Dari berbagai kebijakan yang ada, upaya perwujudan kesejahteraan sosial memiliki konvergensi yang cukup tinggi utamanya pada program kemiskinan, bersifat lintas sektor dalam implementasinya. Akurasi data dan desain penentuan program, serta penentuan sasaran penerima manfaat sangatlah penting. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat permasalahan menyangkut penggunaan basis data penerima manfaat dari program penghapusan kemiskinan yang menyebabkan upaya intervensi tidak dapat berhasil optimal. Pemerintah perlu memetakan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan beberapa alternatif intervensi yakni: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat (bantuan sosial dan subsidi serta penyelenggaraan jaminan sosial yang merata; (2) Meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat (pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta akses pekerjaan); (3) Meminimalisasi kantong kemiskinan (peningkatan akses layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, konvergensi anggaran, konsolidasi program, dan peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan).

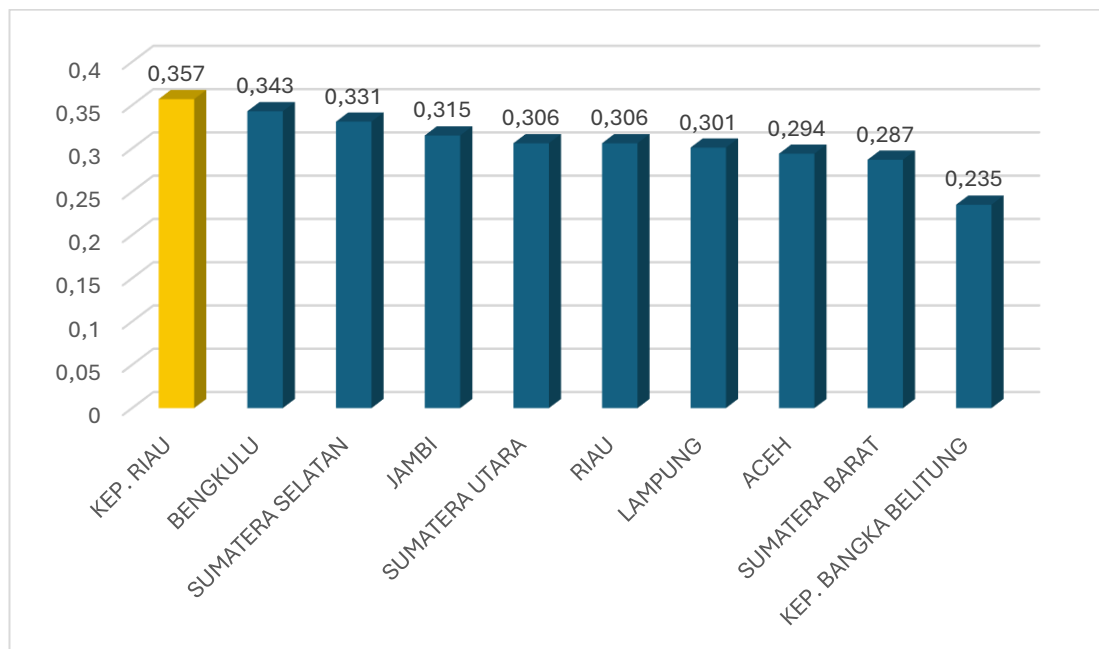
Pengangguran juga masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. TPT Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,38 persen. Dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumatera, TPT Provinsi Kepulauan Riau merupakan tertinggi.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.47 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024

Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2024 sebesar 0,357. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,017 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,340. Indeks Gini sebesar 0,357 ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kepri masih berada dalam kategori sedang. Posisi relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi. Gambaran posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera terlihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Gambar 2.48 Posisi Relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024

4) **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal**

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar

instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (*multilevel governance*) dapat diinisiasi dengan *joint outcome* sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kepulauan Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan *e-government* di Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem *e-government* pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

5) Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal

Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan pedoman sekaligus panutan dan pegangan hidup bermasyarakat. Kondisi pembangunan pada periode sebelumnya masih menunjukkan bahwa pelestarian budaya terutama Budaya Melayu sebagai akar nilai Masyarakat Kepulauan Riau belum optimal diimplementasikan. Oleh karena itu, pada periode pembangunan kedepan penguatan budaya lokal menjadi salah satu isu yang perlu

mendapatkan perhatian. Penguatan budaya lokal mencakup pelestarian budaya yang *tangible* (terlihat) dan *intangible* (tidak terlihat) seperti karya Bahasa/sastra Melayu, pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.

Perlu upaya aktif dari seluruh pihak untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran terhadap pemajuan kebudayaan terutama dalam aspek internalisasi nilai-nilai atau falsafah budaya Melayu dalam keseharian Masyarakat hingga pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya solusi untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Melayu agar tidak musnah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat hendaknya berorientasi pada pemajuan kebudayaan.

6) Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup: (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah; (2) Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak); dan (3) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

7) Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi



alternatif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kepulauan Riau. Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan energi ramah lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalisasi seiring dengan adanya peningkatan eksploitasi laut di masa yang akan datang.



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

3.1.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2030; berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024; memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah:

KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di jelaskan sebagai berikut:

MAJU, artinya

Kondisi capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik dan berkualitas dengan menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan. Maju ditandai dengan menguatnya arah pembangunan



human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan, energi baru dan terbarukan (EBT), ekonomi sirkular, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

MAKMUR, artinya

Makmur dimaknai dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kestabilan ekonomi dan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Dalam mencapai masyarakat yang makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu.

MERATA, artinya

Masyarakat Kepulauan Riau dapat menikmati hasil pembangunan melalui pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, namun juga daerah lainnya yang tertinggal. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga semua lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

3.1.2 Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk

kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

Membangun infrastruktur dan transportasi publik dalam menguatkan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; air baku; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, serta peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.

3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter

Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi

manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya melayu dan nasional. Dalam kaitan ini juga dilakukan penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup yang pada akhirnya meningkatkan resiliensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan



Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, (2) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (4) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing, (5) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (6) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (7) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Rasio Gini, dan (3) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, dengan indikator sasaran (1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Indeks Ekonomi Biru Indonesia, (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan (9) Tingkat Kemiskinan.

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan (2) Meningkatnya konektivitas transportasi publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Infrastruktur dengan indikator sasaran (1) Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, (2) Konsumsi Listrik per Kapita dan (3) Rasio Konektivitas.

3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter

Misi ini memiliki tujuan Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas pendidikan, (3) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak (4) Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Modal Manusia, dengan indikator sasaran (1) Usia Harapan Hidup, (2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan Gender, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Pemuda, dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga.

4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan serta Daya Saing Daerah, (4) Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN, (5) Meningkatnya transformasi digital daerah, dan (6) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasaran (1) Indeks Pelayanan Publik, (2) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, (3) Predikat SAKIP, (4) Opini BPK atas Laporan Keuangan, (5) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, (6) Level Maturitas SPIP, (7) Indeks Daya Saing Daerah, (8) Indeks Profesionalitas ASN, (9) Indeks Transformasi Digital Nasional, dan (10) Indeks Demokrasi Provinsi.



5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini memiliki tujuan (1) Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah dengan sasaran (1) Meningkatnya penguatan pemajuan kebudayaan melayu, (2) Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama, (3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan (4) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Indeks Harmoni, dan (2) Indeks Ekonomi Hijau Daerah dengan indikator sasaran (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan, (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan (4) Indeks Risiko Bencana.



**Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
KEPULAUAN RIAU, MAJU, MAKMUR DAN MERATA									
1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah									
1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.24-7.14	5.46-7.38	5.67-7.62	5.89-7.86	6.10-8.10	6.19-8.20	6.19-8.20
		Rasio Gini (Indeks)	0.370-0.382	0.359-0.371	0.348-0.360	0.337-0.347	0.316-0.336	0.316-0.336	0.316-0.336
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	170.63-179..20	180.77-191.90	192.06-203.60	204.64-217.30	218.55-266.00	218.55-266.00	218.55-266.00
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52	2,52



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,42	0,556	0,691	0,827	0,962	1,098	1,098
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41.22-41.70	41.71-42.19	42.20-42.68	42.69-43.17	43.18-43.66	43.18-43.66	43.18-43.66
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	71,28	72,46	73,65	74,83	76,02	77,2	77,2
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.89-6.31	6.29-6.22	6.21-6.14	6.13-6.06	6.06-5.57	6.06-5.57	6.06-5.57
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	38,54	39,12	39,7	40,3	40,9	41,16	41,16
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	66,79	67,29	67,79	68,29	68,79	69,29	69,29



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,56	44,66	44,76	44,86	44,96	45,06	45,06
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4.48-4.28	4.17-3.77	3.87-3.27	3.56-2.76	3.55-2.26	3.55-2.26	3.55-2.26
2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah									
2.1	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Indeks Infrastruktur (Indeks)	64,3	65,24	66,14	67,03	67,93	68,8	68,8
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	51,44	52,65	54,4	56,14	57,87	59,56	59,56
		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	2,947	3,065	3,188	3,315	3,448	3,586	3,586



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2.12	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,69	0,72	0,76	0,8	0,81	0,85	0,85
3 Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter									
3.1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0.60-0.62	0.61-0.63	0.62-0.64	0.63-0.65	0.64-0.66	0.64-0.66	0.64-0.66
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,32	75,58	75,84	76,1	76,36	76,63	76,63
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,8	14,35	13,9	13,45	13	12,55	12,55
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	10,9	11,05	11,19	11,34	11,48	11,63	11,63
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,28	13,32	13,38	13,44	13,5	13,56	13,56



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.331-0.328	0.327-0.322	0.321-0.316	0.315-0.310	0.309-0.304	0.303-0.298	0.303-0.298
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	70,28	71,78	73,28	74,78	76,28	77,78	77,78
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	71,35	71,85	72,35	72,85	73,35	73,85	73,85
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,354	0,355	0,356	0,357	0,358	0,359	0,359
4	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan								
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	A-	A-	A-	A-	A	A	A



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,3	4,33	4,37	4,4	4,44	4,47	4,47
4.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	61,31	68,46	73,15	77,3	79,55	81,15	81,15
4.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	A	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	46,32	47,43	47,61	47,92	49,64	49,68	49,68
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,4	3,48	3,56	3,64	3,72	3,8	3,8
4.1.4	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81,65	81,74	81,83	81,92	82,01	82,01	82,01
4.1.5	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	50,8	51,23	51,67	52,1	52,53	52,96	52,96
4.1.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,67	77,68	77,69	77,7	77,71	77,72	77,72
5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan								
5.1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Harmoni (Indeks)	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5.1.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	61,07	61,68	62,3	62,9	63,55	64,2	64,2
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84.32-84.46	84.37-84.51	84.42-84.56	84.47-84.61	84.52-84.66	84.52-84.66	84.52-84.66
5.2	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	49,18	49,87	50,45	50,95	51,34	51,9	51,9
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46	75,67	75,88	76,09	76,3	76,52	76,52
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	109	108	106,5	106	105	104	104

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029, dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

A. Arah Kebijakan RPJMD Tahap I (2025-2029) dalam RPJPD

Pembangunan tahap pertama merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan sistem pemerintahan yang profesional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahap ini:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk membentuk manusia produktif.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas, dan (2) Integrasi Destinasi Batam dan Bintan dan Penguatan Identitas *Key Tourism Area* (KTA).
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, (2) Kebijakan pembangunan berbasis bukti, (3) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, (4) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan (5) membentuk kelembagaan yang efisien, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan *agile*.

4. **Mewujudkan supremasi hukum**, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas supremasi hukum, demokrasi lokal yang substansial dan kondusivitas keamanan.
5. **Mewujudkan ketahanan sosial** budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (4) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
6. **Mewujudkan pembangunan kewilayahan** yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*, dengan arah kebijakan meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim.
7. **Mewujudkan sarana dan prasarana** yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan aksesibilitas masyarakat.
8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan** daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode I.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan



penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 3.2 Strategi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Akselerasi daya saing pariwisata	Pengembangan daya saing pariwisata	Penguatan daya saing pariwisata	Pemantapan daya saing pariwisata	Perwujudan daya saing pariwisata
			Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi	Akselerasi perbaikan kualitas kelembagaan koperasi	Pengembangan kualitas kelembagaan koperasi	Penguatan kualitas kelembagaan koperasi	Pemantapan kualitas kelembagaan koperasi	Perwujudan kelembagaan koperasi berkualitas
				Akselerasi penumbuhkan dan pemberdayaan UKM	Pengembangan keberdayaan UKM	Penguatan pemberdayaan UKM	Pemantapan pe keberdayaan UKM	Perwujudan keberdayaan UKM
			Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Akselerasi daya saing produk industri	Pengembangan daya saing produk industri	Penguatan daya saing produk industri	Pemantapan daya saing produk industri	Perwujudan daya saing produk industri
				Akselerasi daya saing produk perdagangan	Pengembangan daya saing produk perdagangan	Penguatan daya saing produk perdagangan	Pemantapan daya saing produk perdagangan	Perwujudan daya saing produk perdagangan
			Meningkatnya kualitas tenaga	Akselerasi pelatihan dan	Pengembangan pelatihan dan	Penguatan pelatihan dan	Pemantapan pelatihan dan	Perwujudan pencari kerja



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
			kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	sertifikasi bagi pencari kerja	sertifikasi bagi pencari kerja	sertifikasi bagi pencari kerja	sertifikasi bagi pencari kerja	yang berkompeten
				Akselerasi perlindungan tenaga kerja	Pengembangan dalam pemenuhan tenaga kerja	Penguatan perlindungan tenaga kerja	Pemantapan perlindungan tenaga kerja	Perwujudan perlindungan tenaga kerja yang berkualitas
				Akselerasi Penyelarasan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selaras dengan Kebutuhan Industri	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan yang selaras dengan Kebutuhan Industri	Pemantapan Pendidikan dan Pelatihan yang selaras dengan Kebutuhan Industri	Perwujudan keselarasan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Akselerasi produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Pengembangan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Penguatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Pemantapan kualitas produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Perwujudan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang berkualitas
				Akselerasi ketahanan pangan berkelanjutan	Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan	Penguatan ketahanan pangan berkelanjutan	Pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan	Perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
			Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Akselerasi layanan perizinan penanaman modal berkualitas	Pengembangan layanan perizinan penanaman modal berkualitas	Penguatan layanan perizinan penanaman modal berkualitas	Pemantapan layanan perizinan penanaman modal berkualitas	Perwujudan layanan perizinan penanaman modal berkualitas
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Akselerasi Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Pengembangan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Penguatan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Pemantapan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Perwujudan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran
				Akselerasi Pembentukan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat	Pengembangan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat	Penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat	Pemantapan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat	Perwujudan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat yang berdaya saing
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Akselerasi pembangunan sarana prasarana air baku, sistem drainase, irigasi, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan	Pengembangan sarana prasarana air baku, sistem drainase, irigasi, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan	Penguatan pembangunan sarana prasarana air baku, sistem drainase, irigasi, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan	Pemantapan sarana prasarana air baku, sistem drainase, irigasi, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan	Perwujudan sarana prasarana air baku, sistem drainase, irigasi, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
				Akselerasi Penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas, terjangkau, dan penataan kawasan kumuh	Pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas, terjangkau, dan penataan kawasan kumuh	Penguatan Penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas, terjangkau, dan penataan kawasan kumuh	Pemantapan perumahan dan permukiman yang berkualitas, terjangkau, dan penataan kawasan kumuh	Perwujudan perumahan dan permukiman yang berkualitas, terjangkau, dan penataan kawasan kumuh
				Akselerasi penyediaan jaringan listrik secara merata antar pulau	Pengembangan jaringan listrik secara merata antar pulau	Penguatan jaringan listrik secara merata antar pulau	Pemantapan kualitas jaringan listrik secara merata antar pulau	Perwujudan jaringan listrik secara merata antar pulau
			Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Akselerasi penyediaan jaringan transportasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah	Pengembangan jaringan transportasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah	Penguatan jaringan transportasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah	Pemantapan jaringan transportasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah	Perwujudan jaringan transportasi yang merata untuk menunjang konektivitas antar wilayah
3	Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Akselerasi kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan dan	Pengembangan pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan dan penyediaan	Penguatan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan dan	Pemantapan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan dan	Perwujudan pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan dan penyediaan sarana-prasarana



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
	Saing dan Berkarakter			penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
				Akselerasi pencegahan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita	Pengembangan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita	Penguatan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita	Pemantapan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita	Perwujudan pengurangan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Akselerasi pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif	Pengembangan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif	Penguatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif	Pemantapan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif	Perwujudan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif
			Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Akselerasi pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Pengembangan upaya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Penguatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Pemantapan kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Perwujudan keberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
			Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Akselerasi peningkatan prestasi olahraga dan kualitas pemuda	Pengembangan prestasi olahraga dan kualitas pemuda	Penguatan prestasi olahraga dan kualitas pemuda	Pemantapan prestasi olahraga dan kualitas pemuda	Perwujudan daya saing prestasi olahraga dan kualitas pemuda
4	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Akselerasi pelayanan publik yang responsif dan berkualitas	Pengembangan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas	Penguatan sistem pelayanan publik yang responsif dan berkualitas	Pemantapan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas	Perwujudan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Akselerasi penciptaan ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pengembangan upaya penciptaan ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemantapan ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Perwujudan ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas	Akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pengembangan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				Akselerasi pengelolaan	Pengembangan kualitas	Penguatan kualitas	Pemantapan kualitas	Perwujudan pengelolaan



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
			pengawasan serta Daya Saing Daerah	keuangan dan aset daerah berkualitas	pengelolaan keuangan dan aset daerah	pengelolaan keuangan dan aset daerah	pengelolaan keuangan dan aset daerah	keuangan dan aset daerah yang berkualitas
				Akselerasi peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pengembangan sistem pengawasan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pemantapan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Perwujudan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Akselerasi peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara serta penataan kepegawaian sesuai dengan kompetensi.	Pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara serta penataan kepegawaian sesuai dengan kompetensi.	Penguatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara serta penataan kepegawaian sesuai dengan kompetensi.	Pemantapan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara serta penataan kepegawaian sesuai dengan kompetensi.	Perwujudan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang professional serta penataan kepegawaian yang sesuai dengan kompetensi.
				Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis digital dan integrasi data secara	Pengembangan sistem pemerintahan modern berbasis digital dan	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis digital dan	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis digital dan	Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis digital yang berkualitas dan
			Meningkatnya transformasi digital daerah					



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
				menyeluruh, baik antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota	integrasi data secara menyeluruh, baik antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota	integrasi data secara menyeluruh, baik antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota	integrasi data secara menyeluruh, baik antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota	integrasi data secara menyeluruh, baik antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota
			Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Akselerasi penciptaan kehidupan masyarakat yang demokratis	Pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis	Penguatan kualitas kehidupan masyarakat yang demokratis	Pemantapan kualitas kehidupan masyarakat yang demokratis	Perwujudan kehidupan masyarakat yang demokratis
5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu	Akselerasi pelestarian warisan budaya melayu	Pengembangan upaya pelestarian warisan budaya melayu	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya melayu	Pemantapan upaya pelestarian warisan budaya melayu	Perwujudan kelestarian warisan budaya melayu
			Meningkatnya toleransi kerukunan umat Bergama	Akselerasi peningkatan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat	Pengembangan upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat	Pemantapan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat	Perwujudan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
		Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Akselerasi pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pengembangan upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Penguatan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemantapan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Perwujudan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Akselerasi pencegahan dan penanggulangan bencana berkualitas	Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana berkualitas	Penguatan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana berkualitas	Pemantapan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana berkualitas	Perwujudan kualitas sistem pencegahan dan penanggulangan bencana

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing
				Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis
				Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
				Pemanfaatan budaya lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata
				Pengembangan wisata bahari dan potensi lainnya antara lain wisata religi dan wisata di Pulau Penyengat yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk menciptakan (<i>multiplier effect</i>) bagi ekonomi daerah
				Peningkatan investasi sektor pariwisata, khususnya wisata bahari, melalui skema pembiayaan inovatif (<i>blended finance</i>) dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan manfaat ekonomi lokal
				Pengembangan sektor pariwisata berbasis ekonomi hijau (<i>eco-tourism</i>) dan geopark yang menerapkan prinsip Blue-Green- Circular Economy;
				Peningkatan infrastruktur, ekonomi kreatif, serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
				Pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata secara merata akan mengoptimalkan ketersediaan aset, meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya logistik dan transportasi, serta memperkuat konektivitas antar wilayah
			Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi	Perluasan penerima manfaat pengembangan koperasi
				Pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah
				Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
			Meningkatnya pertumbuhan sektor	Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
				Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
				Penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar
				Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			perindustrian dan perdagangan	Pengembangan produk IKM, industri hijau, dan industri halal
				Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital
				Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor
				Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
				Meningkatkan pertumbuhan perekonomian syariah
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja
				Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, dan meningkatkan kualitas sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan
				Memperkuat kerja sama <i>triple helix</i> (pemerintah – akademisi - industri) dalam revitalisasi kurikulum pendidikan keterampilan dan vokasi, penyusunan program pelatihan dan sertifikasi
				Penguatan vokasi, serta penguatan <i>link and match</i> industri
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
				Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri berbasis maritim, peningkatan kualitas mutu dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan
				Peningkatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
				Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produktivitas
				Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan
				Peningkatan budaya dalam pemanfaatan Pangan Lokal
				Pengembangan <i>Smart Fishing</i> dan sistem budidaya berkelanjutan
				Penyediaan jaminan sistem perlindungan petani dan nelayan
				Penguatan ketahanan pangan dan pertanian modern melalui peningkatan hilirisasi sektor pangan lokal dan penguatan logistik daerah



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
				Pengaktifan kembali cetak sawah di lokasi-lokasi potensial dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional
				Optimalisasi lahan yang telah tersedia, baik melalui ekstensifikasi (perluasan lahan) maupun intensifikasi (peningkatan produktivitas)
			Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi
				Peningkatan promosi dan kualitas layanan investasi
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat miskin dan pencegahan terjadinya kemiskinan baru
				Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial
				Peningkatan pemberdayaan ekonomi di desa, perbaikan sistem pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
				Melaksanakan program sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan;
				Menyusun program dan kegiatan berdasarkan pendanaan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tentang Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan;
				Mendukung integrasi dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
				Menambahkan dan mendukung program strategis nasional terbaru yaitu Sekolah Rakyat (SR) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menyasar siswa dari kategori miskin ekstrem (Desil 1 dan 2);
				Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang periodenya disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029;



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
				Menyusun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; dan
				Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan melibatkan lintas OPD dan swasta.
				Reformasi Perlindungan Sosial melalui Penyediaan data kemiskinan, jaminan sosial masyarakat, dan reformasi bantuan sosial digital.
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
				Pemenuhan air bersih dan sanitasi untuk rumah tangga
				Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah
				Peningkatan layanan infrastruktur persampahan
				Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah
				Penataan kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi
				Penyediaan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), pelabuhan internasional, dan Kawasan Ekonomi Khusus
			Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sistem transportasi
3	Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan
				Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan
				Peningkatan promosi dan upaya preventif kesehatan
				Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Dokter
				Pembangunan sarana prasarana pendidikan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	yang Berdaya Saing dan Berkarakter		Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan budaya literasi masyarakat Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Penguatan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri
			Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak
			Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Peningkatan sarana prasarana dan pembinaan prestasi olah raga Pengembangan kewirausahaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
4	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan serta Daya Saing Daerah	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional
			Meningkatnya transformasi digital daerah	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Meningkatnya Perkembangan	Peningkatan pembinaan kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Demokrasi Pemerintahan	
5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu	Peningkatan pelestarian warisan budaya untuk mewujudkan ketahanan budaya melayu
			Meningkatnya toleransi kerukunan umat Bergama	Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
		Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan Ekonomi Hijau dan pembangunan Rendah Karbon melalui penerapan energi bersih, pengelolaan limbah terpadu, dan pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hijau
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana

C. Pentahapan Pembangunan Tahunan

Tema pembangunan daerah tahun 2026-2030 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Tahunan

Penjabaran arah kebijakan dalam rangka penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan perencanaan tahunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 mengambil tema Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia, didukung kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel. Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan
- Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana



- c. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

2. Tahun 2027

Pembangunan tahun 2027 mengambil tema Pengembangan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, didukung pelayanan publik yang bermutu. Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.
- b. Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

3. Tahun 2028

Pembangunan tahun 2028 mengambil tema Penguatan potensi perekonomian daerah dan daya saing sumber daya manusia, didukung tata Kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan
- b. Penguatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

4. Tahun 2029

Pembangunan tahun 2029 mengambil tema Pemantapan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang unggul, didukung infrastruktur wilayah yang berkualitas. Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pemantapan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan
- b. Pemantapan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana
- c. Pemantapan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

5. Tahun 2030

Pembangunan tahun 2030 mengambil tema Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta sumber daya manusia yang produktif dan berbudaya. Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Perwujudan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
- b. Perwujudan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana
- c. Perwujudan Sumber Daya Manusia, yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan program prioritas pembangunan daerah. Penentuan program prioritas daerah juga mengarah pada implementasi berbagai program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan tahun 2025-2030.



A. Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, menggunakan nomenklatur program yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara detail rincian kegiatan dan sub kegiatan akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Daftar program prioritas pembangunan daerah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEPULAUAN RIAU, MAJU, MAKMUR DAN MERATA				
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah			
1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
			Rasio Gini (Indeks)	
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Meningkatnya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-el (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
2.1	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit		Indeks Infrastruktur (Indeks)	
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik		Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	
			Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	
		Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	
2.12	Meningkatnya konektivitas transportasi publik		Rasio Konektivitas (Rasio)	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	
3 Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter				
3.1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Modal Manusia (Indeks)	
3.1.1			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%) Persentase Puskesmas terakreditasi (%) Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat) Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%) Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	
			Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	
			Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	
			Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	
			Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	
			Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	
			Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	
			Hipertensi dalam pengendalian (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	
			Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (%) Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai) Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%) Rasio peserta didik per kelas (Rasio) Persentase Konten Pendidikan (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	
			Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	
4	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan			
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
			Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
			Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	
			Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	
			Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	
			Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	
			Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%) Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%)) Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah		Predikat SAKIP (Predikat) Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) Level Maturitas SPIP (Level)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	
			Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual Risk) Melalui Penerapan Manajemen Risiko (%)	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	
			Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	
			Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	
			Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	
			Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	
4.1.4	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	
			Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (%)	
			Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	
			Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	
			Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%) Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%) Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%) Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.1.5	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah		Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
4.1.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan		Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
5	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan			
5.1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju		Indeks Harmoni (Indeks)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%) Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009) (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan (Indeks)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.2	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
		Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN



NO.	TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	
			Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	
			Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	



B. Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan tahun 2025-2030 meliputi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan.
2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah.
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing.
5. Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
6. Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat.

Rencana Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan tahun 2025-2030 beserta nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.5 Rencana Implementasi Program Kepala Daerah Tahun 2025-2030

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan			
A	Pertanian dan Perkebunan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan
-	Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
-	Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Penataan Prasarana Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
-	Distribusi bibit pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Penataan Prasarana Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
-	Bantuan permodalan bagi pelaku pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Penataan Prasarana Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
-	Pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Penataan Prasarana Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
-	Jaminan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Penataan Prasarana Pertanian		
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	
B	Perikanan dan Kelautan				
-	Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
-	Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
-	Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
				Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
-	Penyiapan SDM Kemaritiman	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
-	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
-	Memfasilitasi kemudahan regulasi kemaritiman.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
			Fasilitasi Penyusunan Perundang undangan		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum pengaturan		
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota		
-	Industri perkapalan.	PROGRAM PENGELOAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)		
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
C	Pariwisata Bahari				Dinas Pariwisata



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
-	Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
				Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
-	Mendorong event pariwisata tematik bahari	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
-	Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
-	Promosi dan kerjasama internasional	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
				Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)				
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		
				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan		
-	Pembangunan Infrastruktur pendukung industri pengolahan limbah				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.				
A	Pembangunan Kawasan FTZ, KEK, ekonomi biru Natuna Anambas				
-	Mendorong implementasi FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang menyeluruh	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Dinas Penanaman Modal PTSP,
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
-	Mendorong pertumbuhan KEK baru				



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
-	Menjaga kondusifitas pembangunan kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
				Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
-	Penguatan nilai tambah ekonomi biru di Natuna, Anambas dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
				Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
B	Diversifikasi Ekonomi				
-	Pembangunan industri pengolahan ikan dan industri pengolahan rumput laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
				Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
-	Pengembangan industrialisasi perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
			Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
-	Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Dinas Pariwisata
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
			Pengembangan Sistem Pemasaran		
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
-	Akselerasi pengembangan industri halal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
C	Tenaga Kerja				



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Link and match Pendidikan dan Industri	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
-	Jaminan sosial bagi tenaga informal	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)		
				Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)/Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
-	Penciptaan lapangan kerja baru	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
-	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
-	Perluasan area kompetensi teknis yang difasilitasi BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
D	Investasi				Dinas Penanaman Modal PTSP,
-	Insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah & retribusi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Penetapan Pemberian Fasilitas		
				Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas		
				Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
-	Promosi dan kerjasama	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
E	UMKM				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
-	Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen	Program Pengembangan UMKM			
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
-	Memperluas pelatihan, bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
-	Memperluas Pemberian bantuan modal usaha UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
				Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	
		Program Pengembangan UMKM			
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Pengembangan Usaha Kecil	
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Memperluas digitalisasi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
				Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
				Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	
				Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
-	Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
		Program Pengembangan UMKM		
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
-	Memperluas pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
-	Pengembangan sentra ekonomi baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
F	Ekonomi Kreatif				
-	Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Dinas Pariwisata
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
				Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
				Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
				Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
-	Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
				Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
G	Peningkatan PAD				
-	Intensifikasi dan ekstenstifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pendapatan Daerah
			Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Penagihan Pajak Daerah	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
-	Optimalisasi pengelolaan PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
-	Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
-	Reformasi administrasi system intensif perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
-	Penguatan sosialisasi dan komunikasi terkait regulasi intensif fiskal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
-	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
-	Penguatan tata kelola BLUD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKAD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah				
A	Pembangunan Infrastruktur				
-	Percepatan pembangunan jembatan Batam - Bintan (Babin)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
				Pembangunan Jembatan	
-	KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
				Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
				Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		
				Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
	- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Urusan Penyelenggaraan PSU		
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
	- Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, roro, barang dan bangkar muat).	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Dinas Perhubungan



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	
-	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pulau/wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
			Pembangunan Jalan, Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Flyover, Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
-	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
-	Pembangunan infrastruktur energi Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		
				Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	
B	Konektivitas (transportasi antar pulau, konektivitas udara, konektivitas laut, rute				
-	Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk menperlancar arus orang dan barang	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Dinas Perhubungan
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		
-	Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		
-	PeningkatanTransportasi konektivitas udara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	
-	Perbaiki sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk antar kabupaten/kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	
C	Pertambangan				
-	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
-	Mendorong perlibatan masyarakat dalam industri Pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		
				Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
-	Percepatan hilirisasi alumina	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		
				Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
-	Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		
				Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
-	Mempercepat realisasi participating interest (BUMD Pertambangan)	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
			Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
			Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)			
-	Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
-	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Pengelolaan Risiko Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	
E	Energi Terbarukan			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
-	Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
			Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	
-	Mendorong inovasi energi terbarukan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		
			Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	
			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	
			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	
			Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	
			Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	
-	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
			Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
			Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
			Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	
F	Ekonomi Kreatif			
	Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Infratraktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri			
	- Produksi talenta digital			
4	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing			
A	Sarana dan Prasarana Pendidikan			
	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA, SMK dan SLB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Pembangunan Ruang Laboratorium	
-	Menambah unit sekolah baru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Pembangunan Ruang Laboratorium	
-	Pengembangan sekolah vokasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
-	Memperluas jaringan internet di sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
B	Layanan Pendidikan				
-	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
-	Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
-	Memperluas penerima manfaat seragam gratis	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
-	Memperluas penerima manfaat SPP Gratis	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
-	Memperluas penerima manfaat tranportasi pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
-	Memperkuat layanan literasi digital	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
-	Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus		
C	Tenaga Pendidik dan Kependidikan				
-	Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
-	Mendorong sertifikasi guru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
-	Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
-	Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
-	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
-	Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Pendidikan Khusus		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
D	Sarana dan Prasarana Kesehatan				
-	Menambah kapasitas sarana dan prasarana rumah singgah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Pengembangan Rumah Sakit	
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Pengembangan Rumah Sakit	
-	Percepatan pembangunan sosial care Kepri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Pengembangan Rumah Sakit	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
E	Layanan Kesehatan				Dinas Kesehatan
-	Memperluas penerima manfaat layanan rumah singgah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
-	Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
-	Memperkuat tata kelola layanan kesehatan RSUP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
-	Memperluas penerima manfaat Jamkesda	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
-	Menambah layanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
-	Digitalisasi layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
F	Tenaga Kesehatan				
-	Peningkatan kerja sama dengan fakultas kedokteran.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Dinas Kesehatan
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
-	Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
-	Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
-	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
G	Kesehatan Masyarakat				
-	Peningkatan gizi ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
-	Penurunan angka stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
-	Peningkatan sanitasi lingkungan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
H	Pendidikan Karakter (buidaya Melayu)				
-	Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			Sekretariat Daerah (Biro Kesra)
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
-	Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
I	Pemberdayaan Perempuan				
-	Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		
			Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Provinsi		
-	Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
-	Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		
				Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
				peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
-	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PEMEMUHAN HAK ANAK			
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
		PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
-	Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
				Pendampingan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
J	Kepemudaan				
-	Pengembangan minat dan bakat pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Dinas Pemuda dan Olahraga
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
-	Memperluas Pendampingan enterprenuer muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
5	Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi.				
A	Penguatan tata kelola dan kelembagaan manajemen ASN, kompetensi ASN, dan				



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
	manajemen talenta dan karier ASN				
-	Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Inspektorat dan Bappeda
			Pendampingan dan Asistensi		
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
-	Satu Data Kepri	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappeda
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Peningkatan kualitas statistik sektoral	
				Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	
-	Digitalisasi pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
			Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
-	Peningkatan Kapasitas Evaluasi dan Monitoring	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		BKD dan BPSDM
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Pengembangan Kompetensi ASN	
			Pengelola Assesmen Center	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
				Pembinaan Disiplin ASN	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
				Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi,dan Sumber Belajar	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
-	Pendirian Balai Diklat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BPSDM
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Mebel	
-	Pembangunan sarana dan prasana perkantoran modern	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
				Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
6	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat				
A	Pengembangan Budaya				
-	Keberlanjutan pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Dinas Kebudayaan
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakatnya Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		
-	Percepatan pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
				Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
				Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
				Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
-	Penguatan destinasi wisata budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
			Pengembangan Cagar Budaya		
-	Integrasi destinasi wisata Budaya dan sejarah	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi		
-	Pelaksanaan event wisata budaya dan sejarah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
-	Revitalisasi peninggalan budaya dan sejarah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)			(04)
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
B	Kerukunan Umat Beragama				
-	Harmonisasi antar umat beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			Kesbangpol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
-	Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
-	Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			Sekretariat Daerah (Biro Kesra)
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)	(03)		(04)
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
C	Sosial Kemasyaratan			
-	Insentif RT/RW, Opersional Posyandu, BPD, LPM	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
-	Memperluas penerima manfaat bantuan sosial, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelaku seni	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sekretariat Daerah (Biro Kesra)
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	

3.2.3 Arahan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kepulauan Riau dibagi menjadi lima Kawasan yaitu (1) Kawasan Pertumbuhan yang meliputi (a) Kawasan perkotaan Batam dan KPBPB Batam, (b) Kawasan perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Tanjungpinang, (c) Kawasan perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun, (2) Kawasan Komoditas Unggulan-ekonomi biru yang meliputi Natuna dan Anambas, (3) Kawasan swasembada pangan, air dan energi swasembada energi di Natuna, (4) Kawasan Afirmasi (a) Kepulauan Lingga percepatan pengentasan kemiskinan, (b) Kepulauan Natuna Anambas daerah terdepan dan pemerataan pembangunan, dan (5) Kawasan Konservasi/Rawan Bencana.

Tabel 3.6 Arahan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan RPJMN

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
(1)	(2)	(3)
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Batam & KPBPB Batam (A1), Kawasan Perkotaan Tanjungpinang & KPBPB Bintan (A2), dan Kawasan Perkotaan Tanjung balai Karimun & KPBPB Karimun (A3) • Kota Batam • Kota Tanjungpinang • Kab. Bintan • Kab. Karimun	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam-Bintan, antara lain melalui: - Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: industri semikonduktor, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara, industri transportasi laut & galangan kapal, hilirisasi

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
(1)	(2)	(3)
		bauksit, industri logam, besi, & baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal)
		Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil
		Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinggir-Jodoh
		Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity
		Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City
		Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Bintan Inti Industrial Estate, dan KI-KI lainnya di BBK
		Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
		Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Batam-Bintan (PHTC)
		Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Batam (PHTC)
		Pembangunan Closing Dam Piayu
		Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru
		Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center
		Pengembangan SPAM Regional Batam, SPAM Regional Bintan, dan SPAM Perkotaan Karimun
		Pengembangan Batam Urban & Industrial Sewerage System Development Project
		Pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang, yang terintegrasi dengan TOD
		Pembangunan TPST Regional Batam dan TPST Regional Bintan
		Pengembangan kawasan pariwisata Batam-Bintan (Pengembangan Kawasan MICE & Urban Tourism Batam Center, Pengembangan Kawasan Integrated Tourism Zone Lagoi, Revitalisasi

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
(1)	(2)	(3)
		Kawasan Budaya Pulau Penyengat dan Pengembangan Grey Tourism) Pengembangan Politeknik Negeri Batam menjadi universitas/institut teknologi bertaraf World Class Research University Berbasis Potensi Wilayah Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping-WNTS Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam (PHTC) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: - Kab. Karimun: Meral Barat, Tebing, Karimun - Kota Batam: Belakang Padang - Kab. Bintan: Bintan Utara, Telok Sebung, Gunung Kijang, Bintan Pesisir
C1	Kawasan Swasembada Energi Natuna • Kab. Natuna • Kab. Kepulauan Anambas	Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada West Natuna Basin (producing basin) Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada East Natuna Basin (discovery basin) Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada South Natuna Basin (unexplored basin)
D1	Kawasan Afirmasi Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lingga	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan Peningkatan ketahanan bencana Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar dan Trans Lingga & Singkep Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertambangan (bauxit), perikanan, dan perkebunan (kelapa) Hilirisasi bauxit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauxit, yaitu a.l. SGA, CGA, dan

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
(1)	(2)	(3)
		aluminium ingot, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit a.l. aluminium alloy, katalis alumina, komposit aluminium Pengembangan SPAM Perkotaan Dabo Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Dabo (PHTC) Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
D2	Kawasan Afirmasi Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Natuna • Kab. Kepulauan Anambas	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan Pengembangan SPAM Perkotaan Ranai dan SPAM Perkotaan Tarempa Peningkatan ketahanan bencana Pembangunan/Preservasi jalan Trans Natuna dan Anambas Penguatan Natuna dan Anambas sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan dan pariwisata bahari Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Ranai dan Tarempa (PHTC) Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa Pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Siantan Selatan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Natuna Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa Kepulauan Anambas

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
(1)	(2)	(3)
		Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Kep. Anambas: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Natuna-Anambas • Kab. Natuna • Kab. Kep. Anambas	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pering, Pelabuhan Perikanan Selatlampa, dan Pelabuhan Perikanan Tarempa Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas Pengelolaan & pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
E1	Kawasan Konservasi Geopark Natuna • Kab. Natuna	Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	• Kab. Anambas Kepulauan • Kab. Bintan • Kab. Karimun • Kab. Natuna • Kab. Lingga	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)

Berdasarkan kerangka pengembangan wilayah RPJPN 2025-2045 serta identifikasi yang telah dilakukan di peta jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau diangkat dengan tema “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Permata Biru Ekonomi menggambarkan potensi kekayaan maritim yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah laut yang besar. Gerbang Utara Indonesia menunjukkan potensi lokasi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai hub lalu lintas pelayaran dan penerbangan. Potensi-potensi tersebut dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi pertanian khususnya perikanan, pertambangan, industri, dan jasa termasuk pariwisata bernilai tambah tinggi. Hal tersebut perlu dioptimalkan dengan merajut keterkaitan aktivitas ekonomi intra gugusan pulau-pulau kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan dengan wilayah-wilayah sekitar terdekat termasuk wilayah perbatasan negara tetangga, sehingga membentuk rantai nilai yang bernilai tambah tinggi.

Dalam merajut aktivitas ekonomi di gugusan pulau-pulau kabupaten/kota dengan profil pembangunan yang sangat beragam, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan untuk transformasi ekonomi dapat dibagi dalam tiga klaster utama, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

a. Arah Kebijakan

Dalam rangka memajukan wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, agenda pembangunan kedepan perlu diawali dengan penguatan layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Untuk pengembangan sektor ekonomi, pengembangan potensi pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi pilar-pilar utama di wilayah Natuna – Kepulauan Anambas. Pariwisata alam memerlukan pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alam bawah laut, topografi wilayah, keanekaragaman hayati, serta keunikan budaya lokal. Kabupaten Natuna secara

khusus memiliki *geopark* Tanjung Datuk, yang potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu UNESCO *Global Geopark*. Sementara itu, wilayah Kepulauan Anambas memiliki potensi keindahan alam bawah laut dan gugusan-gugusan pulau yang dapat dimanfaatkan baik untuk pariwisata bahari maupun pariwisata premium dengan potensi pemanfaatan pesawat apung, seperti yang telah berlangsung di Pulau Bawah. Dalam mengoptimalkan potensi destinasi-destinasi pariwisata tersebut, fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan seperti akomodasi ramah lingkungan dan pusat informasi turis perlu dibangun, bersamaan dengan pelatihan bagi pemandu wisata lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyajikan pengalaman yang autentik kepada wisatawan, khususnya wisata bahari yang berkelanjutan.

Optimalisasi potensi ekonomi biru, sebagai pilar lainnya dari perekonomian wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, perlu diperkuat dari sisi hulu maupun hilir serta didukung oleh pengembangan riset terkait potensi ekonomi biru. Di sisi hulu, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta kegiatan pertambangan minyak dan gas serta mineral dan batubara perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi modern dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Hilirisasi produk-produk sektor primer tersebut menjadi kunci, di mana industri pengolahan ikan dan galangan kapal dapat didirikan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung ekonomi maritim. Industri teknologi tinggi, khususnya yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi gas alam, juga harus diperhatikan untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan produk dan wisata halal dapat menjadi peluang pasar baru yang menjanjikan, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipercepat peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi pariwisata, perikanan, dan industri kemaritiman.



Gambar 3.2 Klaster Natuna Anambas

Selain pengembangan ekonomi intra wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, posisi strategis Natuna – Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan, membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan. Optimalisasi potensi ini harus diiringi dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Target Kinerja Pembangunan

Berdasarkan arah pengembangan wilayah pada kluster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas ditetapkan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna –
Kepulauan Anambas**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Natuna							
	PDRB per kapita (Rp Juta)	87,48	89,23	91,24	93,25	95,26	97,27	99,28
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,04	4,90	4,74	4,58	4,42	4,26	4,10
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(3,57)	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
	Indeks Daya Saing Daerah	3,24	3,32	3,35	3,39	3,42	3,46	3,49
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,46	79,53	79,99	80,44	80,90	81,35	81,81
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,89	4,03	4,02	4,01	4,00	3,99	3,98
	Indeks Pembangunan Manusia	78,60	79,53	79,99	80,44	80,90	81,35	81,81
2	Kabupaten Kepulauan Anambas							
	PDRB per kapita (Rp Juta)	362,06	395,98	399,49	403,00	406,51	410,02	413,53
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,67	6,65-5,75	6,37-5,49	6,08-5,23	5,80-4,98	5,52-4,72	5,24-4,46
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(5,67)	0,91-1,21	1,08-1,43	1,25-1,66	1,42-1,88	1,59-2,11	1,76-2,33
	Indeks Daya Saing Daerah	2,97	2,70	2,80	2,89	2,99	3,08	3,18
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,32	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,38	2,19	2,16	2,14	2,11	2,08	2,06
	Indeks Pembangunan Manusia	70,93	74,43	74,81	75,19	75,57	75,94	76,32

c. Intervensi Program Unggulan

Untuk mendukung arah kebijakan dan target kinerja Pembangunan maka ditetapkan fokus intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.8 Intervensi Program Unggulan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan
A	Pertanian dan Perkebunan
-	Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)
B	Perikanan dan Kelautan
-	Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)
-	Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan
-	Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan
-	Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan
-	Penyiapan SDM Kemaritiman
-	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman
-	Memfasilitasi kemudahan regulasi kemaritiman.
C	Pariwisata Bahari
-	Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota
-	Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata
-	Mendorong event pariwisata tematik bahari
-	Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari
-	Promosi dan kerjasama internasional
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)
-	Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni
-	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.
A	Pembangunan Kawasan FTZ, KEK, ekonomi biru Natuna Anambas
-	Penguatan nilai tambah ekonomi biru di Natuna dan Anambas
B	Diversifikasi Ekonomi
-	Pengembangan industrialisasi perikanan

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)
C	Tenaga Kerja
-	Link and match Pendidikan dan Industri
-	Jaminan sosial bagi tenaga informal
-	Penciptaan lapangan kerja baru
-	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
D	UMKM
-	Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen
-	Memperluas pelatihan, bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar
-	Memperluas Pemberian bantuan modal usaha UMKM
-	Memperluas digitalisasi UMKM
-	Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM
-	Memperluas pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi
-	Pengembangan sentra ekonomi baru
E	Ekonomi Kreatif
-	Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi kreatif
-	Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah
A	Pembangunan Infrastruktur
-	KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)
-	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan.
-	Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, roro, barang dan bangkar muat).
-	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pulau/wilayah
-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru
-	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi
-	Pembangunan infrastruktur energi Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil
B	Konektivitas (transportasi antar pulau, konektivitas udara, konektivitas laut, rute
-	Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk menperlancar arus orang dan barang

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah
-	Peningkatan Transportasi konektivitas udara
-	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang
-	Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk antar kabupaten/kota
C	Pertambangan
-	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan
-	Mendorong melibatkan masyarakat dalam industri Pertambangan
-	Mempercepat realisasi participating interest
D	Energi Terbarukan
-	Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)
-	Mendorong inovasi energi terbarukan
-	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi
E	Ekonomi Kreatif
-	Infrastruktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri
-	Produksi talenta digital
4	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing
A	Sarana dan Prasarana Pendidikan
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA, SMK dan SLB
-	Menambah unit sekolah baru
-	Pengembangan sekolah vokasi
-	Memperluas jaringan internet di sekolah
B	Layanan Pendidikan
-	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
-	Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan
-	Memperluas penerima manfaat seragam gratis
-	Memperluas penerima manfaat SPP Gratis
-	Memperluas penerima manfaat transportasi pendidikan
-	Memperkuat layanan literasi digital
-	Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi
C	Tenaga Pendidik dan Kependidikan
-	Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah
-	Mendorong sertifikasi guru
-	Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru



NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
-	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah
-	Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar
-	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh
D	Sarana dan Prasarana Kesehatan
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
-	Percepatan pembangunan sosial <i>care</i> Kepri
E	Layanan Kesehatan
-	Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau
-	Memperluas penerima manfaat Jamkesda
-	Menambah layanan Kesehatan
F	Tenaga Kesehatan
-	Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar
-	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan.
G	Kesehatan Masyarakat
-	Peningkatan gizi ibu dan anak
-	Penurunan angka stunting
-	Peningkatan sanitasi lingkungan
H	Pendidikan Karakter (budaya Melayu)
-	Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut
-	Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu
I	Pemberdayaan Perempuan
-	Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga
-	Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita
-	Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
-	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
-	Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik
J	Kepemudaan
-	Pengembangan minat dan bakat pemuda
-	Memperluas Pendampingan enterprenuer muda
5	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat
A	Kerukunan Umat Beragama
-	Harmonisasi antar umat beragama

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama
B	Sosial Kemasyarakatan
-	Insentif RT/RW, Opersional Posyandu, BPD, LPM

2. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

a. Arahan Kebijakan

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor sekunder-tersier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu aspek yang sangat perlu ditekankan dari pengembangan industri di KPBPB adalah meningkatkan industri-industri yang mengolah produk akhir, tidak hanya sampai produk setengah jadi mengingat masih banyaknya aktivitas *industri maklon* (Industri maklon adalah industri pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain), di wilayah klaster ini yang menghambat pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan secara

keseluruhan. *Selain itu juga dikembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.*

Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Status KPBPB memang membuat rantai nilai produksi lebih terintegrasi dengan perdagangan luar negeri baik untuk suplai bahan baku maupun pemasaran produk. Namun demikian, peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya spillover effects dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB. Wilayah sekitar melalui IKM dan UMKM dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok, baik dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengolahan, maupun di bidang lain misalnya penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya untuk industri dan perumahan pekerja. Untuk menjamin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan memicu spillover effects, dibutuhkan pengembangan SDM yang kompeten melalui peningkatan pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) sesuai kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas IKM maupun UMKM di wilayah sekitar KPBPB.

Produktivitas IKM dan UMKM untuk dapat berkontribusi bagi industri pengolahan perlu dimulai dari adanya suplai bahan baku sektor primer yang baik. Sehingga, sektor pertanian arti luas tetap perlu dikembangkan di masa mendatang, misalnya dengan pembentukan sentra perikanan dan sentra pertanian, khususnya sagu di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang perlu diarahkan untuk berkontribusi mengingat adanya modal dasar komoditas perikanan dan pertanian.



Gambar 3.3 Kluster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Selain sebagai basis industri, kluster ini juga perlu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah beberapa segmen pariwisata. Kota Tanjungpinang perlu mengembangkan destinasi wisata sejarah dan religi khususnya di Pulau Penyengat, dimana perlu didukung oleh ketersediaan produk dari industri halal yang saat ini sedang berkembang misalnya di Kabupaten Bintan dan wisata kuliner yang berkembang di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pariwisata kesehatan juga perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan kedekatan dengan negara tetangga, khususnya juga untuk menangkap peluang pariwisata lansia (*grey tourism*) sebagai dampak dari penuaan populasi global serta mengurangi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri seperti ke Singapura dan Malaysia. Rencana pengembangan ini dapat dimulai dari KEK Pengembangan Kawasan Jasa Kesehatan Sekupang yang rencananya akan dibangun di Batam.

Selain itu, arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan ship-to-ship kapal-kapal internasional. Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan jasa-jasa tersebut agar mampu

berdaya saing dibandingkan negara lainnya yang telah memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka.

b. Target Kinerja Pembangunan

Berdasarkan arah pengembangan wilayah pada kluster wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang ditetapkan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9 Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Batam							
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	179,69-179,69	191,63-192,63	210,16-212,87	228,69-233,10	247,22-253,34	265,75-273,58	284,28-293,82
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,85	4,85-4,75	4,62-4,52	4,40-4,28	4,17-4,05	3,95-3,82	3,72-3,59
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,69	6,80-7,35	7,37-8,01	7,40-8,66	7,43-9,34	7,47-10,00	8,00-10,50
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,97	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,80	68,58	68,76	68,94	69,12	69,30	69,49
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,68	7,19	7,14	7,09	7,04	6,98	6,93
g.	Indeks Pembangunan Manusia	82,86	82,98	83,34	83,71	84,07	84,44	84,80
2	Kabupaten Bintan							
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	180,44	191,61	212,48	233,34	254,21	275,08	295,95
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,44	5,26	5,10	4,94	4,77	4,61	4,45
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,89	8,90	8,91	8,92	8,93	8,93	8,93



NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,59	3,62	3,67	3,72	3,77	3,82	3,87
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,66	77,14	77,30	77,46	77,62	77,78	77,94
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,53	4,50	4,47	4,44	4,41	4,38	4,35
g.	Indeks Pembangunan Manusia	76,18	77,50	77,88	78,26	78,64	79,02	79,40
3 Kabupaten Karimun								
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	69,61	72,50-75,10	74,73-77,85	76,95-80,59	79,18-83,34	81,40-86,08	83,63-88,83
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,50-4,50	5,24-4,29	4,99-4,08	4,73-3,87	4,47-3,66	4,22-3,46
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,45	5,50-6,50	5,55-6,55	5,60-6,60	5,65-6,65	5,70-6,70	5,75-6,75
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	3,77	3,80	3,82	3,85	3,87	3,89
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,35	73,78	73,95	74,12	74,29	74,46	74,80
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,52	5,50-5,48	5,49-5,47	5,77-5,46	5,76-5,39	5,74-5,32	5,73-5,25
g.	Indeks Pembangunan Manusia	74,28	75,70	75,93	76,15	76,38	76,60	76,83
4 Kota Tanjungpinang								
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	105,38	110,70	116,29	122,17	128,34	134,82	141,63
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,68	6,24	5,81	5,37	4,94	4,50	4,30
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,78	4,22-5,11	4,23-5,14	4,25-5,17	4,26-5,20	4,28-5,23	4,29-5,26

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,04	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,81	68,36	69,94	71,56	73,22	74,92	76,66
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	4,62	4,56	4,49	4,43	4,36	4,30
g.	Indeks Pembangunan Manusia	81,58	81,99	82,40	82,82	83,23	83,65	84,40

c. Intervensi Program Unggulan

Untuk mendukung arah kebijakan dan target kinerja Pembangunan maka ditetapkan fokus intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.10 Intervensi Program Unggulan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan
A	Pertanian dan Perkebunan
	- Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)
	- Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
	- Distribusi bibit pertanian dan perkebunan
	- Bantuan permodalan bagi pelaku pertanian dan perkebunan
	- Pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
	- Jaminan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian
B	Perikanan dan Kelautan
	- Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)
	- Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan
	- Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan
	- Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan
	- Penyiapan SDM Kemaritiman
	- Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman
	- Memfasilitasi kemudahan regulasi kemaritiman.

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Industri perkapalan.
C	Pariwisata Bahari
-	Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota
-	Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata
-	Mendorong event pariwisata tematik bahari
-	Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari
-	Promosi dan kerjasama internasional
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
-	Pembangunan Infrastruktur pendukung industri pengolah limbah
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.
A	Pembangunan Kawasan FTZ, KEK, ekonomi biru Natuna Anambas
-	Mendorong implementasi FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang menyeluruh
-	Mendorong pertumbuhan KEK baru
-	Menjaga kondusifitas pembangunan kawasan
B	Diversifikasi Ekonomi
-	Pembangunan industri pengolahan ikan dan industri pengolahan rumput laut
-	Pengembangan industrialisasi perikanan
-	Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)
-	Akselerasi pengembangan industri halal
C	Tenaga Kerja
-	Link and match Pendidikan dan Industri
-	Jaminan sosial bagi tenaga informal
-	Penciptaan lapangan kerja baru
-	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
-	Perluasan area kompetensi teknis yang difasilitasi BLK
D	Investasi
-	Insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah & retribusi daerah
-	Promosi dan kerjasama
E	UMKM
-	Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen
-	Memperluas pelatihan, bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar
-	Memperluas Pemberian bantuan modal usaha UMKM
-	Memperluas digitalisasi UMKM

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM
-	Memperluas pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi
-	Pengembangan sentra ekonomi baru
F	Ekonomi Kreatif
-	Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi kreatif
-	Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah
A	Pembangunan Infrastruktur
-	Percepatan pembangunan jembatan Batam - Bintan (Babin)
-	KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)
-	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan.
-	Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, ro-ro, barang dan bangkar muat).
-	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pulau/wilayah
-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru
-	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi
-	Pembangunan infrastruktur energi Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil
B	Konektivitas (transportasi antar pulau, konektivitas udara, konektivitas laut, rute
-	Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk menperlancar arus orang dan barang
-	Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah
-	Peningkatan Transportasi konektivitas udara
-	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang
-	Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahalannya pengiriman produk antar kabupaten/kota
C	Pertambangan
-	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan
-	Mendorong perlibatan masyarakat dalam industri Pertambangan
-	Percepatan hilirisasi alumina
-	Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)
-	Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
E	Energi Terbarukan
-	Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)
-	Mendorong inovasi energi terbarukan
-	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi
F	Ekonomi Kreatif
-	Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional
-	Infratraktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri
-	Produksi talenta digital
4	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing
A	Sarana dan Prasarana Pendidikan
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA, SMK dan SLB
-	Menambah unit sekolah baru
-	Pengembangan sekolah vokasi
-	Memperluas jaringan internet di sekolah
B	Layanan Pendidikan
-	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
-	Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan
-	Memperluas penerima manfaat seragam gratis
-	Memperluas penerima manfaat SPP Gratis
-	Memperluas penerima manfaat transportasi pendidikan
-	Memperkuat layanan literasi digital
-	Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi
C	Tenaga Pendidik dan Kependidikan
-	Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah
-	Mendorong sertifikasi guru
-	Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru
-	Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
-	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah
-	Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar
-	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh
D	Sarana dan Prasarana Kesehatan
-	Menambah kapasitas sarana dan prasarana rumah singgah

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
-	Percepatan pembangunan sosial <i>care</i> Kepri
E	Layanan Kesehatan
-	Memperluas penerima manfaat layanan rumah singgah
-	Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau
-	Memperkuat tata kelola layanan kesehatan RSUP
-	Memperluas penerima manfaat Jamkesda
-	Menambah layanan Kesehatan
-	Digitalisasi layanan kesehatan
F	Tenaga Kesehatan
-	Peningkatan kerja sama dengan fakultas kedokteran.
-	Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan
-	Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar
-	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan.
G	Kesehatan Masyarakat
-	Peningkatan gizi ibu dan anak
-	Penurunan angka stunting
-	Peningkatan sanitasi lingkungan
H	Pendidikan Karakter (budaya Melayu)
-	Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut
-	Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu
I	Pemberdayaan Perempuan
-	Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga
-	Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita
-	Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
-	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
-	Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik
J	Kepemudaan
-	Pengembangan minat dan bakat pemuda
-	Memperluas Pendampingan enterprenuer muda
5	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat
A	Pengembangan Budaya
-	Keberlanjutan pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu
-	Percepatan pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat
-	Penguatan destinasi wisata budaya
-	Integrasi destinasi wisata Budaya dan sejarah

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Pelaksanaan event wisata budaya dan sejarah
-	Revitalisasi peninggalan budaya dan sejarah
B	Kerukunan Umat Beragama
-	Harmonisasi antar umat beragama
-	Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin
-	Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama
C	Sosial Kemasyaratan
-	Insentif RT/RW, Opersional Posyandu, BPD, LPM

3. Klaster wilayah Lingga

a. Arah Kebijakan

Pemajuan wilayah Lingga secara umum pada tahap awal perlu dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar termasuk perumahan, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Memasuki era disrupsi digital, penyediaan infrastruktur digital juga menjadi sangat penting terutama bagi wilayah Lingga yang masih memiliki jumlah desa terbanyak dengan jangkauan sinyal rendah diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan beberapa desa belum terjangkau sinyal internet sama sekali.

Setelah akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur terpenuhi, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu diciptakan di wilayah Kabupaten Lingga, mengingat kontribusi PDRB Lingga yang masih sangat kecil terhadap PDRB Kepulauan Riau. Pengembangan sektor ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi keunggulan wilayah Lingga yaitu pengembangan ekonomi biru dan pariwisata alam. Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Lingga dapat dimulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sentra pangan. Hal ini sejalan dengan adanya potensi perkebunan seperti perkebunan lada, pala, kelapa, hilirisasi sagu, serta karet. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga dapat difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kangkung, bayam, durian, mangga, pisang, dan

cabai rawit. Selain itu, sektor perikanan juga dapat dikembangkan di Kabupaten Lingga, khususnya perikanan budidaya dan komoditas rumput laut.



Gambar 3.4 Klaster Lingga

Pariwisata juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Lingga, sejalan dengan kayanya keindahan alam terutama pantai dan bawah laut, serta adanya peninggalan sejarah sebagai Bunda Tanah Melayu, yaitu pusat Kerajaan Riau-Lingga di Kecamatan Daik. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi pendorong perekonomian melalui penguatan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), serta dibentuknya paket-paket wisata yang mengintegrasikan antar destinasi pariwisata di wilayah Lingga.

Untuk dapat menjamin berlangsungnya penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi (khususnya SMK) di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, tantangan konektivitas menjadi isu yang perlu segera ditangani. Akses menuju Kabupaten Lingga dari Pulau Batam memerlukan

waktu tempuh yang lama dan berbiaya mahal dengan akses utama melalui jalur laut. Kedepannya, dapat dikembangkan opsi-opsi alternatif seperti pesawat apung khususnya untuk menarik minat wisatawan.

Pemetaan profil tiga klaster tersebut akan dideskripsikan lebih detail melalui kebijakan jangka pendek, menengah, maupun panjang yang akan diulas lebih lanjut dalam peta jalan ini. Arah kebijakan tersebut akan disusun melalui tiga struktur utama, yaitu:

- a. Strategi transformasi ekonomi jangka menengah-panjang, yang merupakan upaya-upaya jangka menengah-panjang (jangka waktu pelaksanaan 5-15 tahun) yang akan membawa perubahan struktur ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, dan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program *quick wins* sebagai dasarnya;
- b. Agenda transformasi super prioritas (*game changers*), sebagai agenda-agenda pembangunan yang sangat perlu diutamakan dalam membawa perubahan mendasar bagi proses transformasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. Upaya transformasi jangka pendek (*quick wins*), sebagai program-program utama dalam mencapai agenda *game changers*, disusun dalam bentuk strategi jangka pendek (jangka waktu pelaksanaan 5 tahun) yang menghasilkan dampak signifikan, sebagai fondasi menuju tahapan transformasi jangka menengah-panjang.

b. Target Kinerja Pembangunan

Berdasarkan arah pengembangan wilayah pada kluster wilayah Lingga ditetapkan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Lingga							
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	54,94-54,94	55,21-55,67	56,60-57,00	57,99-58,32	59,38-59,65	60,77-60,98	62,17-62,31

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,99	9,00-8,50	8,77-8,25	8,53-7,99	8,30-7,74	8,06-7,48	7,83-7,23
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,42	5,12	5,20	5,28	5,36	5,43	5,51
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,55	3,65	3,72	3,79	3,85	3,92	3,99
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,64	78,60	78,77	78,94	79,11	79,28	79,46
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38	3,42-3,32	3,41-3,31	3,40-3,29	3,38-3,28	3,37-3,27	3,36-3,25
g.	Indeks Pembangunan Manusia	68,19	73,20	73,48	73,76	74,04	74,32	74,60

c. Intervensi Program Unggulan

Untuk mendukung arah kebijakan dan target kinerja Pembangunan maka ditetapkan fokus intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.12 Intervensi Program Unggulan Klaster Wilayah Lingga

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan
A	Pertanian dan Perkebunan
	- Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)
	- Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
	- Distribusi bibit pertanian dan perkebunan
	- Bantuan permodalan bagi pelaku pertanian dan perkebunan
	- Pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
	- Jaminan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian
B	Perikanan dan Kelautan
	- Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)
	- Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan
	- Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan
	- Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan
	- Penyiapan SDM Kemaritiman

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman
-	Memfasilitasi kemudahan regulasi kemaritiman.
C	Pariwisata Bahari
-	Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota
-	Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata
-	Mendorong event pariwisata tematik bahari
-	Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari
-	Promosi dan kerjasama internasional
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.
A	Diversifikasi Ekonomi
-	Pengembangan industrialisasi perikanan
-	Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)
B	Tenaga Kerja
-	Link and match Pendidikan dan Industri
-	Jaminan sosial bagi tenaga informal
-	Penciptaan lapangan kerja baru
-	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
-	Perluasan area kompetensi teknis yang difasilitasi BLK
C	UMKM
-	Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen
-	Memperluas pelatihan, bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar
-	Memperluas Pemberian bantuan modal usaha UMKM
-	Memperluas digitalisasi UMKM
-	Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM
-	Memperluas pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi
-	Pengembangan sentra ekonomi baru
D	Ekonomi Kreatif
-	Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi kreatif
-	Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah
A	Pembangunan Infrastruktur
-	KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, roro, barang dan bangkar muat).
-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru
-	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi
-	Pembangunan infrastruktur energi Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil
B	Konektivitas (transportasi antar pulau, konektivitas udara, konektivitas laut, rute
-	Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk menperlancar arus orang dan barang
-	Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah
-	PeningkatanTransportasi konektivitas udara
-	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang
-	Perbaiki sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk antar kabupaten/kota
C	Pertambangan
-	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan
-	Mendorong perlibatan masyarakat dalam industri Pertambangan
-	Percepatan hilirisasi alumina
-	Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral
D	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan tidak layak huni, IPAL)
-	Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni
-	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi,dan longsor
-	Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
E	Energi Terbarukan
-	Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)
-	Mendorong inovasi energi terbarukan
-	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi
F	Ekonomi Kreatif
-	Infratraktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri
-	Produksi talenta digital
4	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing
A	Sarana dan Prasarana Pendidikan
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA,SMK dan SLB

NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Menambah unit sekolah baru
-	Pengembangan sekolah vokasi
-	Memperluas jaringan internet di sekolah
B	Layanan Pendidikan
-	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
-	Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan
-	Memperluas penerima manfaat seragam gratis
-	Memperluas penerima manfaat SPP Gratis
-	Memperluas penerima manfaat transportasi pendidikan
-	Memperkuat layanan literasi digital
-	Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi
C	Tenaga Pendidik dan Kependidikan
-	Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah
-	Mendorong sertifikasi guru
-	Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru
-	Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
-	Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah
-	Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar
-	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh
D	Sarana dan Prasarana Kesehatan
-	Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
E	Layanan Kesehatan
-	Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau
-	Memperluas penerima manfaat Jamkesda
-	Menambah layanan Kesehatan
F	Tenaga Kesehatan
-	Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan
-	Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar
-	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan.
G	Kesehatan Masyarakat
-	Peningkatan gizi ibu dan anak
-	Penurunan angka stunting
-	Peningkatan sanitasi lingkungan
H	Pendidikan Karakter (budaya Melayu)
-	Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut
-	Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu
I	Pemberdayaan Perempuan



NO	HIGHLIGHT PROGRAM UNGGULAN
(1)	(2)
-	Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga
-	Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita
-	Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
-	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
-	Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik
J	Kepemudaan
-	Pengembangan minat dan bakat pemuda
-	Memperluas Pendampingan enterprenuer muda
5	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat
A	Pengembangan Budaya
-	Penguatan destinasi wisata budaya
-	Integrasi destinasi wisata Budaya dan sejarah
-	Pelaksanaan event wisata budaya dan sejarah
-	Revitalisasi peninggalan budaya dan sejarah
B	Kerukunan Umat Beragama
-	Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama
C	Sosial Kemasyaratan
-	Insentif RT/RW, Opersional Posyandu, BPD, LPM



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, pencapaian Standar Pelayanan Minimal maupun program yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana program perangkat daerah disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran perangkat daerah, program kepala daerah, arahan pemerintah pusat maupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD, dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026-2030 diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Program Pengembangan Kurikulum
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2. Kesehatan

Program yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengembangan Perumahan
- c. Program Kawasan Permukiman
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Program Penanggulangan Bencana



- d. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pemberdayaan Sosial
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

7. Tenaga kerja

Program yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja
- e. Program Hubungan Industrial
- f. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- g. Program Perlindungan Khusus Anak

9. Pangan

Program yang dilaksanakan pada urusan pangan yaitu sebagai berikut:



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

10. Pertanian

Program yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

11. Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil



- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penataan Desa
- c. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

15. Perhubungan

Program yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran

16. Komunikasi dan Informatika

Program yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- h. Program Pengembangan UMKM

18. Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



20. Statistik

Program yang dilaksanakan pada urusan Statistik yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

21. Persandian

Program yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

22. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengembangan Kebudayaan
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- d. Program Pembinaan Sejarah
- e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- f. Program Pengelolaan Permuseuman

23. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

24. Kearsipan

Program yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

25. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

26. Pariwisata

Program yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

27. Pertanian

Program yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

28. Kehutanan

Program yang dilaksanakan pada urusan Kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Hutan
- c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- e. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut:



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- c. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- d. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- e. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

30. Perdagangan

Program yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- e. Program Pengembangan Ekspor
- f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- g. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

31. Perindustrian

Program yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

32. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

33. Sekretariat Daerah

Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penataan Organisasi
- c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- d. Program Kesejahteraan Rakyat



- e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- f. Program Perekonomian dan Pembangunan
- g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

34. Sekretariat DPRD

Program yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

35. Perencanaan

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

36. Keuangan

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

37. Kepegawaian

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Kepegawaian Daerah

38. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

39. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Program Riset dan Inovasi Daerah

40. Pengelolaan Perbatasan

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pengelolaan Perbatasan

41. Pengelolaan Penghubung

Program yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan penghubung yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Penghubung

42. Inpektorat Daerah

Program yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

43. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.051.417.018.718,830		1.140.042.706.707,730		1.142.807.799.079,030		1.149.232.531.876,030		1.168.266.597.096,030	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					660.625.344.733,830		682.357.666.041,000		685.100.624.331,000		688.067.001.706,000		689.901.066.926,000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	-	80,46	80,46	660.625.344.733,830	80,47	682.357.666.041,000	80,47	685.100.624.331,000	80,48	688.067.001.706,000	80,48	689.901.066.926,000	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	86	87		88		89		90		90		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					389.741.673.985,000		452.885.040.666,730		452.907.174.748,030		456.365.530.170,030		473.565.530.170,030	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%)	108,45	100	100	389.741.673.985,000	100	452.885.040.666,730	100	452.907.174.748,030	100	456.365.530.170,030	100	473.565.530.170,030	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (%)	117,98	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)	87,94	88,44	88,94		89,44		89,94		90,44		90,94		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (%)	0,014	0,013	0,012		0,011		0,01		0,009		0,008		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	26,55	36	36		36		36		36		36		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Konten Pendidikan (%)	0	20	25		30		35		40		45		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	64,32	65,23	65,46		65,69		65,92		66,15		66,38		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	59,81	60,84	61,87		62,90		63,93		64,96		65,99		1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					650.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	-	6,94	10,42	650.000.000,000	13,89	800.000.000,000	17,36	800.000.000,000	20,83	800.000.000,000	24,31	800.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					300.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	627,38	627,99	628,49	300.000.000,000	628,60	3.500.000.000,000	628,70	3.500.000.000,000	628,80	3.500.000.000,000	628,90	3.500.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					100.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					520.108.745.258,140		513.580.051.685,110		501.700.955.091,110		508.395.072.502,110		536.165.202.862,110	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					385.795.304.706,830		409.058.530.153,770		410.458.388.800,770		413.941.875.890,770		437.806.279.852,770	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	385.795.304.706,830	BB	409.058.530.153,770	BB	410.458.388.800,770	BB	413.941.875.890,770	BB	437.806.279.852,770	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	75	80	80		82		85		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,23	91,40	91,60		91,80		92		92,90		92,20		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B		B		BB		BB		BB		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,14	91,50	91,85		92		92,25		92,65		93		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B		B		BB		BB		BB		1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	83	83		84		84		85		85		1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	98,57	98,60	98,65		98,70		98,75		98,80		98,85		1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					120.791.061.314,690		90.539.930.619,340		78.715.066.994,340		83.840.061.034,340		86.927.746.114,340	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	92	92,50	93	120.791.061.314,690	93,50	90.539.930.619,340	94	78.715.066.994,340	94,50	83.840.061.034,340	95	86.927.746.114,340	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	7,4	11	10		9		8		7		6,5		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	6,3	6,1	5,9		5,7		5,5		5,3		5,1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	53,79	55	55		60		60		65		65		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,34	0,33	0,33		0,33		0,32		0,32		0,32		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	6	6	7		7		7		7		7		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	11,8	12	15		18		20		22		25		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	89,26	90	91		92		93		94		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	96	97	98,90		99,20		99,30		99,40		99,50		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,98	1,98	1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98	98		98		98		98		98		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	0	0	1		1		2		2		3		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	88,90	89		89,20		89,30		89,50		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama	Utama	Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit	Satelit	Satelit		Satelit		Satelit		Satelit		Satelit		1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,84	88,90	89		89,20		89,30		89,50		90		1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					11.751.722.000,620		12.459.870.931,000		11.164.716.556,000		9.306.054.387,000		10.274.047.874,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,27	4,28	4,28	11.751.722.000,620	4,29	12.459.870.931,000	4,29	11.164.716.556,000	4,30	9.306.054.387,000	4,30	10.274.047.874,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	80	80	85		87		89		91		93		1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	50	55	60		65		70		75		80		1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
														1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					190.757.236,000		561.656.548,000		481.002.614,000		419.344.129,000		252.785.847,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	88	89	90	190.757.236,000	91	561.656.548,000	92	481.002.614,000	93	419.344.129,000	94	252.785.847,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.579.900.000,000		960.063.433,000		881.780.126,000		887.737.061,000		904.343.174,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29	14,29	1.579.900.000,000	28,57	960.063.433,000	42,86	881.780.126,000	42,86	887.737.061,000	57,14	904.343.174,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	0	14,29	14,29		28,57		42,86		42,86		57,14		1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					340.581.197.661,850		226.840.931.696,520		77.440.931.696,520		72.440.931.696,520		168.606.539.443,520	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35.026.925.661,850		35.540.931.696,520		34.540.931.696,520		34.540.931.696,520		35.540.931.696,520	
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	33.676.925.661,850	BB	33.540.931.696,520	BB	33.540.931.696,520	BB	33.540.931.696,520	BB	33.540.931.696,520	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	84,53	84,53	85,38		86,23		87,09		87,96		88,64		1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,78	88,80	88,80		88,83		88,85		88,87		88,90		1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	1.000.000.000,000	BB	1.000.000.000,000	BB	500.000.000,000	BB	500.000.000,000	BB	1.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,78	88,80	88,80		88,83		88,85		88,87		88,90		1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KONSTRUKSI DAN PERALATAN
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	350.000.000,000	BB	1.000.000.000,000	BB	500.000.000,000	BB	500.000.000,000	BB	1.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.870.000.000,000		4.870.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		10.000.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,098	0,103	0,113	4.870.000.000,000	0,128	4.870.000.000,000	0,153	2.000.000.000,000	0,178	2.000.000.000,000	0,203	10.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	10,26	10,26	24,49		27,55		30,52		33,40		36,21		1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	60,76	76,84	79,70		82,48		85,19		87,87		90,37		1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		11.000.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	33,51	50,35	51,8	1.100.000.000,000	53,25	1.100.000.000,000	54,7	2.000.000.000,000	56,15	2.000.000.000,000	57,6	11.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,000		0,000		200.000.000,000		200.000.000,000		1.500.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan persampahan regional	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota (%)	0	0	0	0,000	0	0,000	25	200.000.000,000	25	200.000.000,000	50	1.500.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					300.000.000,000		300.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		4.500.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,6	7,76	8,92	300.000.000,000	10,08	300.000.000,000	11,24	500.000.000,000	12,4	500.000.000,000	13,50	4.500.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.130.000.000,000		1.130.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	0	0	21,43	1.130.000.000,000	14,29	1.130.000.000,000	21,4	300.000.000,000	21,4	300.000.000,000	21,4	300.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					120.950.000.000,000		80.850.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		15.000.000.000,000	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	29,63	37,04	120.950.000.000,000	7,41	80.850.000.000,000	7,41	5.000.000.000,000	7,41	5.000.000.000,000	11	15.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					57.650.000.000,000		71.200.000.000,000		5.000.000.000,000		5.000.000.000,000		10.100.000.000,000	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	27,27	27,27	57.650.000.000,000	9,09	71.200.000.000,000	9,09	5.000.000.000,000	9,09	5.000.000.000,000	18,18	10.100.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03. 0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.2.10.0.00.03. 0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					118.154.272.000,000		30.450.000.000,000		26.900.000.000,000		21.900.000.000,000		79.265.607.747,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	80,87	81,10	82,18	118.154.272.000,000	82,29	30.450.000.000,000	82,40	26.900.000.000,000	82,51	21.900.000.000,000	82,81	79.265.607.747,000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	0	6,17	7,4		6,16		6,15		7,16		7,16		1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					700.000.000,000		700.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	6,4	8	8	700.000.000,000	8	700.000.000,000	8	500.000.000,000	8	500.000.000,000	8	700.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					700.000.000,000		700.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		700.000.000,000	
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,63	70	70	700.000.000,000	72	700.000.000,000	75	500.000.000,000	80	500.000.000,000	80	700.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
														1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					130.801.770.830,150		46.218.625.999,000		46.218.625.999,000		41.218.625.999,000		56.218.625.999,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.073.625.999,820		20.530.000.000,000		20.529.625.999,000		20.530.000.000,000		20.530.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	17.073.625.999,820	A	20.530.000.000,000	A	20.529.625.999,000	A	20.530.000.000,000	A	20.530.000.000,000	1.04.0.00.0.00.04. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	77,39	79,50		81,74		83,91		86,09		87,39		1.04.0.00.0.00.04. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,72	84,98	85,00		85,10		85,15		85,20		85,25		1.04.0.00.0.00.04. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					220.000.000,000		3.239.000.000,000		3.239.000.000,000		3.239.000.000,000		4.239.000.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	3.239.000.000,000	100	3.239.000.000,000	100	3.239.000.000,000	100	4.239.000.000,000	1.04.0.00.0.00.04. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.04. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					12.915.459.116,070		7.700.000.000,000		7.750.000.000,000		7.700.000.000,000		7.750.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 â€“ 15 Ha yang ditangani (%)	0	1,83	5,50	12.915.459.116,070	9,17	7.700.000.000,000	12,83	7.750.000.000,000	16,50	7.700.000.000,000	20,16	7.750.000.000,000	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	21	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					100.592.685.714,260		14.749.625.999,000		14.700.000.000,000		9.749.625.999,000		23.699.625.999,000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	52,66	53,00	53,25	100.592.685.714,260	53,50	14.749.625.999,000	53,75	14.700.000.000,000	54,00	9.749.625.999,000	54,25	23.699.625.999,000	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					38.021.825.042,660		39.082.992.587,000		39.731.945.251,000		41.731.945.251,000		49.731.945.251,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					33.263.775.042,660		31.901.919.055,000		32.386.919.055,000		32.856.919.055,000		36.859.309.898,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	23.929.723.602,140	BB	22.531.303.952,000	BB	22.531.303.952,000	BB	22.531.303.952,000	BB	25.531.303.952,000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,06	84,43	84,71		85,10		85,36		86,31		86,52		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	78,16	77,61	79,19		80,88		82,35		84,12		85,26		1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	9.334.051.440,520	BB	9.370.615.103,000	BB	9.855.615.103,000	A	10.325.615.103,000	A	11.328.005.946,000	1.05.0.00.0.00.04. 0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86	87	88		89		90		91		92		1.05.0.00.0.00.04. 0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,75	87,75	88,00		89,50		90,00		90,25		91,50		1.05.0.00.0.00.04. 0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.174.050.000,000		1.762.635.353,000		1.762.635.353,000		1.762.635.353,000		3.762.635.353,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	2.174.050.000,000	100	1.762.635.353,000	100	1.762.635.353,000	100	1.762.635.353,000	100	3.762.635.353,000	1.05.0.00.0.00.05. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	1,62	2,17	2,71		3,25		3,79		4,33		4,87		1.05.0.00.0.00.05. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	57,73	64,55	71,36		79,55		89,55		93,18		100,00		1.05.0.00.0.00.05. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%)	50	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.05. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ([%])	N/A	73,49	74,36		75,23		76,10		76,97		77,84		1.05.0.00.0.00.05. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.000.000.000,000		3.608.438.179,000		3.772.390.843,000		5.302.390.843,000		7.300.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	2,69	2,70	2,72	2.000.000.000,000	2,76	3.608.438.179,000	2,80	3.772.390.843,000	2,84	5.302.390.843,000	2,88	7.300.000.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,27	0,28	0,29		0,31		0,33		0,36		0,38		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,53	0,54	0,55		0,58		0,61		0,63		0,68		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					584.000.000,000		1.810.000.000,000		1.810.000.000,000		1.810.000.000,000		1.810.000.000,000	
Meningkatnya Pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)		14,29	28,57	584.000.000,000	42,86	1.810.000.000,000	57,14	1.810.000.000,000	71,43	1.810.000.000,000	85,71	1.810.000.000,000	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.759.420.426,900		20.000.000.000,000		23.000.000.000,000		25.000.000.000,000		31.071.364.426,900	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.324.766.426,900		14.487.031.387,000		14.487.031.387,000		14.517.031.387,000		14.517.031.386,900	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	13.890.770.426,900	BB	14.000.264.427,000	BB	14.000.264.427,000	BB	14.000.264.427,000	BB	14.000.264.426,900	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,30	83,30	83,30		83,30		83,30		83,30		83,30		1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,43	83,43	83,43	433.996.000,000	83,43	486.766.960,000	83,43	486.766.960,000	83,43	516.766.960,000	83,43	516.766.960,000	1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					368.532.000,000		1.070.600.000,000		1.990.200.000,000		2.110.200.000,000		3.294.985.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	30,59	31,37	1,57	368.532.000,000	42,35	1.070.600.000,000	42,35	1.990.200.000,000	42,35	2.110.200.000,000	42,35	3.294.985.000,000	1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	8,93	0,89	2,38		2,38		2,38		2,38		2,38		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (%)	-	-	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.512.690.000,000		2.135.383.480,000		2.442.383.480,000		2.827.899.480,000		4.597.415.480,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	651.192.000,000	100	1.160.000.000,000	100	1.377.000.000,000	100	1.762.516.000,000	100	3.437.032.000,000	1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kebutuhan Dasarnya (%)													
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	-	-	100	861.498.000,000	100	975.383.480,000	100	1.065.383.480,000	100	1.065.383.480,000	100	1.160.383.480,000	1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	-	-	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.173.032.000,000		1.889.985.133,000		3.271.385.133,000		4.162.869.133,000		6.676.932.560,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	16,15	4,34	0,40	1.173.032.000,000	3,22	1.889.985.133,000	3,65	3.271.385.133,000	4,03	4.162.869.133,000	3,89	6.676.932.560,000	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	0,26	0,17	0,01		0,13		0,16		0,19		0,19		1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.365.400.000,000		392.000.000,000		784.000.000,000		1.357.000.000,000		1.960.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.365.400.000,000	100	392.000.000,000	100	784.000.000,000	100	1.357.000.000,000	100	1.960.000.000,000	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					15.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	11,11	11,11	11,11	15.000.000,000	11,11	25.000.000,000	11,11	25.000.000,000	11,11	25.000.000,000	11,11	25.000.000,000	1.06.0.00.0.00.06. 0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					42.804.684.641,430		37.312.324.761,000		37.282.324.761,000		39.771.872.530,000		45.171.872.530,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.702.056.872,430		30.744.776.961,000		31.031.776.961,000		31.154.776.961,000		31.154.776.961,000	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	31.702.056.872,430	BB	30.744.776.961,000	BB	31.031.776.961,000	A	31.154.776.961,000	A	31.154.776.961,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	0	0	79,19		79,25		79,33		79,46		79,55		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	0	86,45		86,57		86,68		86,73		87,10		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,28	86,45	86,57		86,68		86,73		87,10		87,10		2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,28	8,31	86,45		86,57		86,68		86,73		87,10		2.07.3.32.0.00.07. 0002 - UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,28	86,31	86,45		86,57		86,68		86,73		87,10		2.07.3.32.0.00.07. 0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.000.000,000		115.000.000,000		50.000.000,000		165.000.000,000		115.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (%)	50	50	50	90.000.000,000	62,50	115.000.000,000	65,50	50.000.000,000	75	165.000.000,000	75	115.000.000,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					8.542.627.738,000		3.994.547.769,000		3.647.547.769,000		5.844.095.538,000		11.294.095.538,000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	50,80	66,67	71,79	8.542.627.738,000	73,82	3.994.547.769,000	74,43	3.647.547.769,000	75,00	5.844.095.538,000	75,00	11.294.095.538,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	50,80	66,67	71,79		73,82		74,43		75,00		75,00		2.07.3.32.0.00.07. 0002 - UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
														2.07.3.32.0.00.07. 0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					480.000.031,000		693.000.031,000		713.000.031,000		713.000.031,000		713.000.031,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	79,35	64	79,45	480.000.031,000	79,66	693.000.031,000	79,72	713.000.031,000	79,95	713.000.031,000	80,12	713.000.031,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	-	73,94	73,96		73,99		74,01		74,26		74,54		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	-	46	47,95		49,90		51,85		53,80		55,75		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.040.000.000,000		815.000.000,000		790.000.000,000		815.000.000,000		815.000.000,000	
Meningkatnya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	40,56	50	54	1.040.000.000,000	55	815.000.000,000	55,98	790.000.000,000	57	815.000.000,000	60	815.000.000,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					950.000.000,000		950.000.000,000		1.050.000.000,000		1.080.000.000,000		1.080.000.000,000	
Terlindunginya hak- hak pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	0	51,98	52,28	950.000.000,000	52,58	950.000.000,000	52,88	1.050.000.000,000	53,13	1.080.000.000,000	53,48	1.080.000.000,000	2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase kasusketenagakerjaa n yang tertangani (%)	60,27	77,00	77,50		77,50		77,50		77,50		77,50		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	21,18	14,80	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		2.07.3.32.0.00.07. 0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	51,98	52,28		52,58		52,88		53,18		53,48		2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Persentase kasusketenagakerjaa n yang tertangani (%)	60,27	77,00	77,50		77,50		77,50		77,50		77,50		2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	21,18	14,80	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		2.07.3.32.0.00.07. 0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
														2.07.3.32.0.00.07. 0002 - UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	51,98	52,28		52,58		52,88		53,18		53,48		2.07.3.32.0.00.07. 0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kabupaten Karimun
	Persentase kasusketenagakerjaa n yang tertangani (%)	60,27	77,00	77,50		77,50		77,50		77,50		77,50		2.07.3.32.0.00.07. 0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	21,18	14,80	15,80		16,00		16,25		16,30		16,30		2.07.3.32.0.00.07. 0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					23.554.698.023,600		23.006.145.635,600		23.437.071.659,600		23.848.506.943,600		25.480.456.580,600	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.127.447.635,600		20.198.146.235,600		20.249.072.259,600		20.300.507.543,600		20.352.457.180,600	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	79,57	77,00	77,15	19.669.447.635,600	77,30	19.673.146.235,600	77,45	19.714.072.259,600	77,60	19.755.507.543,600	77,75	19.807.457.180,600	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	76,65	76,80		77,00		77,20		77,50		78,00		2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93,00	93,25	458.000.000,000	93,55	525.000.000,000	93,80	535.000.000,000	94,00	545.000.000,000	94,00	545.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.104.556.581,000		1.470.000.000,000		1.605.000.000,000		1.650.000.000,000		2.320.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	11,82	12,41	13,03	2.104.556.581,000	13,05	1.470.000.000,000	13,07	1.605.000.000,000	13,09	1.650.000.000,000	13,09	2.320.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,80	53,86	54,48		55,09		55,70		56,31		65,5		2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					473.326.806,000		429.171.500,000		504.171.500,000		589.171.500,000		839.171.500,000	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	43,70	43,51	43,33	250.750.000,000	42,31	250.852.100,000	41,34	325.852.100,000	40,38	410.852.100,000	40,38	660.852.100,000	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	93,43	95	96	222.576.806,000	97	178.319.400,000	98	178.319.400,000	99	178.319.400,000	99	178.319.400,000	2.08.2.14.0.00.08. 0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					292.020.195,000		280.000.000,000		345.000.000,000		430.000.000,000		780.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	71,41	72,18	72,44	292.020.195,000	72,7	280.000.000,000	72,96	345.000.000,000	73,22	430.000.000,000	73,48	780.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000,000		20.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan (%)	46,51	51,16	55,81	20.000.000,000	60,46	20.000.000,000	65,11	30.000.000,000	69,79	40.000.000,000	69,79	80.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					152.465.806,000		220.000.000,000		265.000.000,000		350.000.000,000		500.000.000,000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	71,43	71,43	85,71	152.465.806,000	85,71	220.000.000,000	85,71	265.000.000,000	85,71	350.000.000,000	85,71	500.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					384.881.000,000		388.827.900,000		438.827.900,000		488.827.900,000		608.827.900,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	6,15	6,03	5,91	244.770.000,000	5,79	270.507.900,000	5,68	320.507.900,000	5,56	370.507.900,000	5,56	490.507.900,000	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	94	95	96	140.111.000,000	97	118.320.000,000	98	118.320.000,000	99	118.320.000,000	99	118.320.000,000	2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					28.265.589.154,650		25.630.104.038,650		26.967.958.137,650		27.328.469.366,650		28.518.628.166,650	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.699.787.177,650		23.933.801.911,650		24.659.881.240,650		24.665.358.044,650		24.970.438.448,650	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	89,35	82,15	83,19	24.699.787.177,650	83,27	23.933.801.911,650	83,33	24.659.881.240,650	83,41	24.665.358.044,650	83,45	24.970.438.448,650	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A		A		A		A		A		2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,8	85	85		86		87		88		89		2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.27.0.00.09. 0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.768.403.602,000		1.003.903.752,000		1.471.470.952,000		1.733.903.752,000		2.337.233.636,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	88,76	89,3	90,1	2.768.403.602,000	90,18	1.003.903.752,000	90,28	1.471.470.952,000	90,36	1.733.903.752,000	90,44	2.337.233.636,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					307.398.375,000		292.398.375,000		292.398.375,000		385.000.000,000		560.956.082,000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	7,9	≥10	≥10	307.398.375,000	≥10	292.398.375,000	≥10	292.398.375,000	≥10	385.000.000,000	≥10	560.956.082,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					490.000.000,000		400.000.000,000		544.207.570,000		544.207.570,000		650.000.000,000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93,57	83	84	490.000.000,000	85	400.000.000,000	86	544.207.570,000	87	544.207.570,000	85	650.000.000,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPENTINGAN UMUM														
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum (%)	0	0	45	1.100.000.000,000	20,53	1.100.000.000,000	20,53	1.000.000.000,000	6,88	1.000.000.000,000	6,88	1.000.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0,000		0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (%)	0	0	0	0,000	25	0,000	25	100.000.000,000	25	100.000.000,000	25	100.000.000,000	1.03.2.10.0.00.03. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					37.319.497.484,660		36.156.414.207,330		36.656.414.207,330		36.656.414.207,330		39.069.114.207,330	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35.277.497.484,660		35.009.114.207,330		35.009.114.207,330		35.009.114.207,330		35.279.114.207,330	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	35.066.058.506,660	BB	34.734.114.207,330	BB	34.734.114.207,330	BB	34.734.114.207,330	BB	35.004.114.207,330	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	80,29	80,43		80,47		80,51		80,51		80,51		2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,82	84,25	84,44		84,65		84,87		85,08		85,30		2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,45	211.438.978,000	84,65	275.000.000,000	84,87	275.000.000,000	85,07	275.000.000,000	85,30	275.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					85.000.000,000		140.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		770.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	140.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	770.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000,000		495.000.000,000		695.000.000,000		695.000.000,000		1.025.000.000,000	
Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	2,54	3,76	5,03	500.000.000,000	6,30	495.000.000,000	7,57	695.000.000,000	8,84	695.000.000,000	10,11	1.025.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	46,67	46,67	53,33		60,00		73,33		86,67		100		2.11.3.28.0.00.10. 0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					50.000.000,000		85.000.000,000		85.000.000,000		85.000.000,000		305.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	0	0,495	0,505	50.000.000,000	0,515	85.000.000,000	0,525	85.000.000,000	0,535	85.000.000,000	0,545	305.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000,000		50.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (%)	50,00	50,00	53,57	100.000.000,000	57,14	50.000.000,000	67,86	100.000.000,000	78,57	100.000.000,000	100	300.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					120.000.000,000		85.000.000,000		135.000.000,000		135.000.000,000		245.000.000,000	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha (%)	12,20	21,95	32,93	120.000.000,000	32,93	85.000.000,000	53,66	135.000.000,000	53,66	135.000.000,000	100,00	245.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					70.000.000,000		45.000.000,000		45.000.000,000		45.000.000,000		210.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup (%)	6,19	6,19	6,64	70.000.000,000	6,64	45.000.000,000	7,08	45.000.000,000	7,52	45.000.000,000	7,52	210.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					52.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	53,19	57,45	59,57	52.000.000,000	68,09	50.000.000,000	78,72	50.000.000,000	91,49	50.000.000,000	100	150.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					115.000.000,000		87.300.000,000		137.300.000,000		137.300.000,000		153.000.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)	9,76	9,76	12,20	115.000.000,000	14,63	87.300.000,000	17,07	137.300.000,000	21,95	137.300.000,000	24,39	153.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					950.000.000,000		110.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000		632.000.000,000	
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (%)	11,68	12,00	15,90	950.000.000,000	19,80	110.000.000,000	23,70	160.000.000,000	27,60	160.000.000,000	31,50	632.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	84,76	85,00	85,75		86,50		87,25		88,00		88,75		2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					370.000.000,000		1.070.000.000,000		1.270.000.000,000		1.366.000.000,000		2.016.000.000,000	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					165.000.000,000		465.000.000,000		540.000.000,000		556.000.000,000		856.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	99,76	99,77	99,77	165.000.000,000	99,78	465.000.000,000	99,79	540.000.000,000	99,80	556.000.000,000	99,80	856.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KTP-el (%)	62,83	62,95	63		64		65		66		67		2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					100.000.000,000		300.000.000,000		390.000.000,000		420.000.000,000		570.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	300.000.000,000	100	390.000.000,000	100	420.000.000,000	100	570.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					95.000.000,000		295.000.000,000		315.000.000,000		365.000.000,000		565.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi (%)	36,36	36,36	38,64	95.000.000,000	40,91	295.000.000,000	43,18	315.000.000,000	45,45	365.000.000,000	50	565.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					10.000.000,000		10.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					16.258.957.340,870		15.678.322.340,870		16.534.692.804,000		16.882.322.340,870		17.732.322.340,870	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.448.322.340,870		13.398.322.340,870		13.398.692.804,000		13.471.192.804,870		13.471.192.804,870	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,71	87,85	88,95	13.448.322.340,870	89,15	13.398.322.340,870	89,35	13.398.692.804,000	89,75	13.471.192.804,870	90,92	13.471.192.804,870	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	0	88,26	90		93		95		98		100		2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					65.000.000,000		120.000.000,000		170.000.000,000		214.629.536,000		314.629.536,000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar (Desa)	110	10	15	65.000.000,000	15	120.000.000,000	20	170.000.000,000	20	214.629.536,000	25	314.629.536,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					133.500.000,000		195.000.000,000		285.500.000,000		316.000.000,000		511.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya (%)	49,45	50,55	52,36	133.500.000,000	54,18	195.000.000,000	56,73	285.500.000,000	59,27	316.000.000,000	61,82	511.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					211.500.000,000		435.000.000,000		655.500.000,000		755.500.000,000		1.010.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	39,82	41,64	47,39	211.500.000,000	51,03	435.000.000,000	63,15	655.500.000,000	76,48	755.500.000,000	100	1.010.500.000,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sinil



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.400.635.000,000		1.530.000.000,000		2.025.000.000,000		2.125.000.000,000		2.425.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	0,31	5,72	11,14	2.400.635.000,000	16,55	1.530.000.000,000	21,97	2.025.000.000,000	27,38	2.125.000.000,000	32,80	2.425.000.000,000	2.12.2.13.0.00.11. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					817.465.806,000		810.000.000,000		930.000.000,000		1.070.000.000,000		1.490.000.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					50.000.000,000		50.000.000,000		70.000.000,000		110.000.000,000		140.000.000,000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	68,70	69,25	69,50	50.000.000,000	70	50.000.000,000	70,95	70.000.000,000	72,10	110.000.000,000	72,10	140.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	11,10	10,80	10,50		10,20		9,90		9,60		9,60		2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					160.000.000,000		160.000.000,000		220.000.000,000		280.000.000,000		420.000.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,1	11,75	11,25	160.000.000,000	10,75	160.000.000,000	10,25	220.000.000,000	10	280.000.000,000	9,75	420.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	79,69	81,19	82,69		84,19		85,69		87,19		88,69		2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	56,1	57,20	58,40		59,70		61,10		62,55		64,00		2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					607.465.806,000		600.000.000,000		640.000.000,000		680.000.000,000		930.000.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	66	67	68	607.465.806,000	69	600.000.000,000	70	640.000.000,000	71	680.000.000,000	71	930.000.000,000	2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	31,61	33,11	34,61		36,11		37,61		39,11		40,61		2.08.2.14.0.00.08. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					37.999.267.478,080		36.575.042.930,420		36.575.042.930,420		36.575.042.930,420		41.575.042.930,420	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.994.267.478,080		20.925.042.930,420		20.925.042.930,420		20.925.042.930,420		20.925.042.930,420	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	20.994.267.478,080	BB	20.925.042.930,420	BB	20.925.042.930,420	BB	20.925.042.930,420	BB	20.925.042.930,420	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	80,73	81,00	81,50		82,00		82,50		83,00		83,00		2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,55	78,07	79,53		80,99		81,36		81,72		82,00		2.15.0.00.0.00.01. 0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN					750.000.000,000		1.375.000.000,000		1.700.000.000,000		2.025.000.000,000		2.025.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ANGKUTAN JALAN (LLA)														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan (%)	58,30	58,85	62,84	750.000.000,000	69,40	1.375.000.000,000	78,17	1.700.000.000,000	89,12	2.025.000.000,000	100	2.025.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					16.255.000.000,000		14.275.000.000,000		13.950.000.000,000		13.625.000.000,000		18.625.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50	16.255.000.000,000	56,00	14.275.000.000,000	59,50	13.950.000.000,000	63,00	13.625.000.000,000	63,00	18.625.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50		56,00		59,50		63,00		63,00		2.15.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50		56,00		59,50		63,00		63,00		2.15.0.00.0.00.01. 0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50		56,00		59,50		63,00		63,00		2.15.0.00.0.00.01. 0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														dan Kabupaten Bintan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50		56,00		59,50		63,00		63,00		2.15.0.00.0.00.01. 0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan (%)	49,00	52,50	52,50		56,00		59,50		63,00		63,00		2.15.0.00.0.00.01. 0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	76,92	84,62	84,62		88,46		92,31		96,15		96,15		2.15.0.00.0.00.01. 0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					31.747.387.753,660		29.272.572.944,000		29.222.572.944,000		34.012.572.944,000		33.962.572.944,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19.961.267.243,660		17.146.201.858,000		16.936.201.858,000		17.556.201.858,000		17.256.201.858,000	
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	19.961.267.243,660	BB	17.146.201.858,000	BB	16.936.201.858,000	BB	17.556.201.858,000	BB	17.256.201.858,000	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	0	75	76		77		78		79		80		2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,67	81	82		83		84		85		86		2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.474.140.000,000		6.899.825.344,000		6.949.825.344,000		10.056.371.086,000		10.056.371.086,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Komunikasi pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	0	71	72	5.474.140.000,000	73	6.899.825.344,000	74	6.949.825.344,000	75	10.056.371.086,000	76	10.056.371.086,000	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	58,88	66	70		75		80		85		90		2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.311.980.510,000		5.226.545.742,000		5.336.545.742,000		6.400.000.000,000		6.650.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6,66	6,80	6,85	6.311.980.510,000	6,90	5.226.545.742,000	6,95	5.336.545.742,000	7,00	6.400.000.000,000	7,05	6.650.000.000,000	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					48.435.423.164,120		33.186.716.576,520		33.323.205.190,520		34.961.058.691,520		38.600.290.728,520	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					15.095.849.430,000		13.710.349.558,520		13.710.349.558,520		13.710.349.558,520		13.710.349.558,520	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	15.095.849.430,000	BB	13.710.349.558,520	BB	13.710.349.558,520	BB	13.710.349.558,520	BB	13.710.349.558,520	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,90	80,99	81,26		81,48		81,67		81,89		82,08		2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,22	83,22	83,32		83,42		83,52		83,62		83,72		2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					220.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		200.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	18,68	18,46	18,88	220.000.000,000	19,30	120.000.000,000	19,73	120.000.000,000	20,19	200.000.000,000	20,70	300.000.000,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					525.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		200.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	7,27	5,44	5,82	525.000.000,000	6,20	120.000.000,000	6,59	120.000.000,000	6,99	200.000.000,000	7,39	300.000.000,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					250.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (%)	9,18	8,74	9,16	250.000.000,000	9,58	60.000.000,000	10,02	60.000.000,000	10,45	100.000.000,000	10,90	150.000.000,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					510.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		170.000.000,000		200.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	24,90	28,80	30,50	510.000.000,000	32,22	120.000.000,000	33,96	120.000.000,000	35,72	170.000.000,000	37,50	200.000.000,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					7.430.000.000,020		670.000.000,000		720.000.000,000		970.000.000,000		1.370.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	47,08	37,18	39,89	7.430.000.000,020	42,64	670.000.000,000	45,43	720.000.000,000	47,76	970.000.000,000	50,12	1.370.000.000,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					15.291.689.209,100		12.181.245.000,000		12.257.733.614,000		12.907.733.614,000		14.407.733.614,000	
Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,11	3,31	3,60	15.291.689.209,100	3,89	12.181.245.000,000	4,18	12.257.733.614,000	4,47	12.907.733.614,000	4,76	14.407.733.614,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	-	14,95	15,15		15,35		15,55		15,75		15,95		2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					9.112.884.525,000		6.205.122.018,000		6.215.122.018,000		6.702.975.519,000		8.162.207.556,000	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	26,82	34,89	35,19	9.112.884.525,000	35,49	6.205.122.018,000	35,79	6.215.122.018,000	36,09	6.702.975.519,000	36,39	8.162.207.556,000	2.17.0.00.0.00.14. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					17.569.415.709,280		18.133.226.623,000		19.118.873.421,000		20.043.837.421,000		21.093.873.421,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.519.415.709,280		16.188.226.623,000		16.873.873.421,000		17.173.837.421,000		17.973.873.421,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	15.519.415.709,280	BB	16.188.226.623,000	BB	16.873.873.421,000	BB	17.173.837.421,000	BB	17.973.873.421,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	-	86,03	86,36		86,69		87,02		87,35		87,68		2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,48	3,74	4,00		4,26		4,52		4,80		4,80		2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					530.000.000,000		250.000.000,000		350.000.000,000		240.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	100	100	16	530.000.000,000	16	250.000.000,000	16	350.000.000,000	16	240.000.000,000	20	250.000.000,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,000		560.000.000,000		630.000.000,000		650.000.000,000		800.000.000,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	100	16	16	250.000.000,000	16	560.000.000,000	16	630.000.000,000	16	650.000.000,000	20	800.000.000,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					820.000.000,000		625.000.000,000		725.000.000,000		1.200.000.000,000		1.350.000.000,000	
Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP (%)	100	16	16	820.000.000,000	16	625.000.000,000	16	725.000.000,000	16	1.200.000.000,000	20	1.350.000.000,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					330.000.000,000		360.000.000,000		390.000.000,000		530.000.000,000		500.000.000,000	
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	100	16	16	330.000.000,000	16	360.000.000,000	16	390.000.000,000	16	530.000.000,000	20	500.000.000,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					120.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		250.000.000,000		220.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dokumen)	5	16	16	120.000.000,000	16	150.000.000,000	16	150.000.000,000	16	250.000.000,000	20	220.000.000,000	2.18.0.00.0.00.15. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					42.102.489.592,860		36.845.518.709,000		36.845.518.709,000		41.045.518.709,000		41.045.518.709,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.494.487.163,000		16.087.392.709,000		16.087.392.709,000		16.087.392.709,000		16.087.392.709,000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	16.494.487.163,000	BB	16.087.392.709,000	BB	16.087.392.709,000	BB	16.087.392.709,000	BB	16.087.392.709,000	2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	76	76	77		78		79		80		81		2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	80	80		85		86		87		88		2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.028.849.999,860		6.650.000.000,000		6.650.000.000,000		10.300.000.000,000		10.300.000.000,000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	0,38	1,47	1,89	2.028.849.999,860	2,31	6.650.000.000,000	2,80	6.650.000.000,000	3,23	10.300.000.000,000	3,65	10.300.000.000,000	2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	0,17	0,21	0,23		0,24		0,27		0,30		0,32		2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					22.379.152.430,000		13.108.126.000,000		13.108.126.000,000		13.658.126.000,000		13.658.126.000,000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	0,76	0,61	0,76	22.379.152.430,000	0,90	13.108.126.000,000	0,98	13.108.126.000,000	0,99	13.658.126.000,000	1,01	13.658.126.000,000	2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	2,69	4,20	7,98		9,49		13,28		14,79		16,30		2.19.0.00.0.00.16. 0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.200.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan (%)	9,63	14,85	18,97	1.200.000.000,000	21,68	1.000.000.000,000	22,28	1.000.000.000,000	22,34	1.000.000.000,000	22,40	1.000.000.000,000	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					250.000.000,000		525.000.000,000		525.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					250.000.000,000		525.000.000,000		525.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,61	2,70	2,80	250.000.000,000	2,85	525.000.000,000	2,90	525.000.000,000	2,95	700.000.000,000	3,00	700.000.000,000	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					300.000.000,000		510.000.000,000		560.000.000,000		595.000.000,000		645.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					300.000.000,000		510.000.000,000		560.000.000,000		595.000.000,000		645.000.000,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	64,34	40	46	300.000.000,000	50	510.000.000,000	54	560.000.000,000	58	595.000.000,000	62	645.000.000,000	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					17.479.167.808,780		18.512.121.289,000		20.512.121.289,000		22.037.727.353,000		25.537.727.353,000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.692.736.808,780		15.092.121.289,000		14.112.121.289,000		14.627.727.353,000		18.127.727.353,000	
Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	13.692.736.808,780	BB	15.092.121.289,000	BB	14.112.121.289,000	BB	14.627.727.353,000	BB	18.127.727.353,000	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86	86	86,5		87		88		88		88		2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,3	88,3	88,3		88,3		88,3		88,3		88,3		2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.305.000.000,000		1.810.000.000,000		2.625.000.000,000		2.760.000.000,000		2.760.000.000,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	23,60	25,84	28,09	1.305.000.000,000	30,34	1.810.000.000,000	32,58	2.625.000.000,000	34,83	2.760.000.000,000	37,08	2.760.000.000,000	2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	1,66	1,69	1,73		1,77		1,81		1,85		1,89		2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	6,93	7,30	7,66		8,03		8,39		9,12		9,85		2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.331.431.000,000		875.000.000,000		1.535.000.000,000		1.585.000.000,000		1.585.000.000,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (%)	0,13	0,15	0,18	1.331.431.000,000	0,21	875.000.000,000	0,24	1.535.000.000,000	0,27	1.585.000.000,000	0,3	1.585.000.000,000	2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					105.000.000,000		250.000.000,000		450.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah (%)	0	0	13,33	105.000.000,000	26,67	250.000.000,000	40	450.000.000,000	53,33	550.000.000,000	66,67	550.000.000,000	2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se- Tingkat SLTA/ sederajat tentang sejarah lokal ()	0	0,29	0,59		0,88		1,17		1,47		1,76		2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					845.000.000,000		335.000.000,000		990.000.000,000		1.465.000.000,000		1.465.000.000,000	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	5,90	6,94	8,33	845.000.000,000	9,72	335.000.000,000	11,11	990.000.000,000	12,50	1.465.000.000,000	13,89	1.465.000.000,000	2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Ditetapkan (Persentase)													
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	41,76	45,53	49,31		53,08		56,85		60,63		64,40		2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan (%)	16,58	17,26	17,34		18,61		19,29		19,97		20,65		2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					200.000.000,000		150.000.000,000		800.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun (%)	9,25	11,14	13,03	200.000.000,000	14,92	150.000.000,000	16,81	800.000.000,000	18,70	1.050.000.000,000	20,59	1.050.000.000,000	2.22.0.00.0.00.17. 0000 - Dinas Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					23.135.535.576,980		23.464.272.684,980		23.414.168.483,980		23.399.461.190,980		24.974.856.824,980	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.866.545.576,980		21.314.847.630,980		21.189.897.784,980		21.164.897.784,980		22.169.897.784,980	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	20.866.545.576,980	BB	21.314.847.630,980	BB	21.189.897.784,980	BB	21.164.897.784,980	A	22.169.897.784,980	2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	78,01	78,31		78,46		78,61		78,76		78,91		2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,15	88,25	88,35		88,45		88,55		88,65		88,75		2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,50	81,00	81,25		81,50		81,75		82,00		82,25		2.23.2.24.0.00.18. 0001 - UPT Perpustakaan Muhammad Sani



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2.053.990.000,000		1.879.425.054,000		1.899.270.699,000		1.909.563.406,000		2.304.959.040,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	73,69	74,69	75,69	2.053.990.000,000	76,69	1.879.425.054,000	77,69	1.899.270.699,000	78,69	1.909.563.406,000	79,69	2.304.959.040,000	2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan (Orang)	50.607	50.700	50.800		50.900		51.000		51.100		51.200		2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam (Orang)	3.288	4.004	4.154		4.304		4.454		4.604		4.754		2.23.2.24.0.00.18. 0001 - UPT Perpustakaan Muhammad Sani
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					215.000.000,000		270.000.000,000		325.000.000,000		325.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	10	12	14	215.000.000,000	16	270.000.000,000	18	325.000.000,000	20	325.000.000,000	22	500.000.000,000	2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					600.000.000,000		929.705.000,000		990.000.000,000		1.015.000.000,000		1.450.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					600.000.000,000		650.000.000,000		735.000.000,000		735.000.000,000		1.150.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps(40 dan 59 U 43/2009) (%)	20,34	22,63	26,32	600.000.000,000	28,18	650.000.000,000	30,65	735.000.000,000	33,73	735.000.000,000	37,00	1.150.000.000,000	2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0,000		279.705.000,000		255.000.000,000		280.000.000,000		300.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	18,33	16,67	19,17	0,000	21,67	279.705.000,000	24,17	255.000.000,000	26,67	280.000.000,000	29,17	300.000.000,000	2.23.2.24.0.00.18. 0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					64.940.964.439,690		68.634.691.002,360		63.634.691.002,360		63.634.691.002,360		73.634.691.002,360	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					41.848.240.259,690		41.848.830.987,360		41.918.669.822,360		41.969.376.822,360		42.859.390.987,360	
Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	41.848.240.259,690	BB	41.848.830.987,360	BB	41.918.669.822,360	BB	41.969.376.822,360	BB	42.859.390.987,360	3.25.0.00.0.00.19. 0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,13	80,20	80,53		80,84		80,99		81,30		81,45		3.25.0.00.0.00.19. 0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,79	85,81	85,83		85,85		85,87		85,89		86,01		3.25.0.00.0.00.19. 0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19. 0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19. 0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19. 0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0006 - UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0007 - UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0008 - UPTD Balai Benih Ikan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	80		80		80		80		80		3.25.0.00.0.00.19.0009 - UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					250.000.000,000		1.000.000.000,000		909.844.664,000		1.429.844.664,000		1.500.000.000,000	
Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	90	92	250.000.000,000	94	1.000.000.000,000	98	909.844.664,000	98	1.429.844.664,000	98	1.500.000.000,000	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	0	90		92		94		98		98		3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	0	90		92		94		98		98		3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	0	90		92		94		98		98		3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
														3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	87,81	90		92		94		98		98		3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	75	87,81	90		92		94		98		98		3.25.0.00.0.00.19.0009 - UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					13.901.168.276,000		14.831.904.651,000		12.851.829.651,000		12.501.904.651,000		14.831.904.651,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	35.255,75	31.528.197	316230,66	13.901.168.276,000	317179,36	14.831.904.651,000	318130,89	12.851.829.651,000	319085,29	12.501.904.651,000	320042,54	14.831.904.651,000	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		319.085,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		319.085,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		31.908,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		319.085,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		319.085,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	335.255,75	315.281,97	316.230,67		317.179,36		318.130,90		319.085,29		320.042,54		3.25.0.00.0.00.19.0006 - UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7.631.555.904,000		8.243.395.364,000		5.609.346.865,000		5.278.564.865,000		10.243.395.364,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16	7.631.555.904,000	45.289,06	8.243.395.364,000	48.251,89	5.609.346.865,000	51.441,71	5.278.564.865,000	54.806,00	10.243.395.364,000	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898,00	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.898	39.899,26	42.508,16		45.289,06		48.251,89		51.441,71		54.806,00		3.25.0.00.0.00.19.0008 - UPTD Balai Benih Ikan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					910.000.000,000		1.569.560.000,000		1.600.000.000,000		1.610.000.000,000		1.700.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan,kelestaria n laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	95	90	90	910.000.000,000	90	1.569.560.000,000	90	1.600.000.000,000	90	1.610.000.000,000	90	1.700.000.000,000	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	90	90		90		90		90		90		3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	90	90		90		90		90		90		3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	90	90		90		90		90		90		3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	90	90		90		90		90		90		3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	90	90		90		90		90		90		3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					400.000.000,000		1.141.000.000,000		745.000.000,000		845.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	68,17	40,61	41,37	400.000.000,000	42,13	1.141.000.000,000	42,90	745.000.000,000	43,65	845.000.000,000	44,41	2.500.000.000,000	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	19.692,58	13.400	13.500		13.600		13.700		13.800		13.900		3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.969,58	13.400	13.500		13.600		13.700		13.800		13.900		3.25.0.00.0.00.19.0007 - UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					24.166.938.329,940		25.555.446.601,940		27.555.446.601,940		29.555.446.601,940		35.555.446.601,940	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.626.938.329,940		15.555.446.601,940		15.555.446.601,940		15.555.446.601,940		15.555.446.601,940	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	15.626.938.329,940	BB	15.555.446.601,940	BB	15.555.446.601,940	BB	15.555.446.601,940	BB	15.555.446.601,940	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0,00	83,46	83,58		83,58		83,68		83,68		83,80		3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,86	88,90	88,95		89,00		89,15		89,30		89,50		3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					660.000.000,000		1.150.000.000,000		700.000.000,000		600.000.000,000		2.200.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,89	1,90	1,95	660.000.000,000	2,00	1.150.000.000,000	2,05	700.000.000,000	2,10	600.000.000,000	2,15	2.200.000.000,000	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,64	1,65	1,70		1,75		1,80		1,85		1,90		3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					6.464.000.000,000		4.935.000.000,000		6.535.000.000,000		9.975.000.000,000		13.075.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	1.667,1	2.497,8	2.722,6	6.464.000.000,000	2.947,4	4.935.000.000,000	3.172,2	6.535.000.000,000	3.397,0	9.975.000.000,000	3.621,8	13.075.000.000,000	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.491.947	3.500.45 0	3.512.500		3.525.75 0		3.539.85 0		3.565.55 0		3.606.15 1		3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					800.000.000,000		2.100.000.000,000		2.900.000.000,000		1.300.000.000,000		2.550.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	2,22	4,65	6,54	800.000.000,000	8,42	2.100.000.000,000	10,31	2.900.000.000,000	12,19	1.300.000.000,000	14,08	2.550.000.000,000	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					616.000.000,000		1.815.000.000,000		1.865.000.000,000		2.125.000.000,000		2.175.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,61	9,61	11,61	616.000.000,000	13,61	1.815.000.000,000	15,61	1.865.000.000,000	17,61	2.125.000.000,000	19,61	2.175.000.000,000	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					11.528.590.186,000		7.004.351.638,000		7.666.776.638,000		8.806.547.300,000		14.116.673.209,000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.425.072.000,000		1.708.000.000,000		2.123.000.000,000		2.506.487.000,000		4.735.987.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	17.251,66	17.510,4	19.960,1	2.425.072.000,000	22.783,1 7	1.708.000.000,000	26.004,1 9	2.123.000.000,000	29.663,7 6	2.506.487.000,000	33.814,0 8	4.735.987.000,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	27.788,8	28.205,6 3	28.628,71		29.058,1 4		29.494,0 1		29.936,4 2		30.385,4 7		2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	28.856,8	29.722,5	30.614,18		31.532,6		32.478,5 8		33.452,9 4		34.456,5 3		2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Ternak (Ton)	18.823,34	19.034,5 5	19.247,61		19.464,8 4		19.682,3 1		19.903,2 5		20.128,3 2		2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.27.0.00.09. 0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.572.956.586,000		1.676.414.938,000		1.908.839.938,000		2.448.705.300,000		5.107.259.300,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	199	82	82	4.572.956.586,000	82	1.676.414.938,000	85	1.908.839.938,000	90	2.448.705.300,000	90	5.107.259.300,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
														2.09.3.27.0.00.09. 0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					700.000.000,000		1.189.936.700,000		1.204.936.700,000		1.321.355.000,000		1.438.362.455,000	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	na	64	65	700.000.000,000	66	1.189.936.700,000	67	1.204.936.700,000	68	1.321.355.000,000	69	1.438.362.455,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.09.3.27.0.00.09. 0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					302.928.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		505.064.454,000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	4.898	42	435	302.928.000,000	45	200.000.000,000	45	200.000.000,000	45	200.000.000,000	45	505.064.454,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (%)	na	739	746		748		748		748		748		2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
														2.09.3.27.0.00.09. 0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.527.633.600,000		2.230.000.000,000		2.230.000.000,000		2.330.000.000,000		2.330.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	50	52	54	3.527.633.600,000	56	2.230.000.000,000	58	2.230.000.000,000	60	2.330.000.000,000	62	2.330.000.000,000	2.09.3.27.0.00.09. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN					2.319.789.000,000		3.401.700.000,000		3.401.700.000,000		3.401.700.000,000		6.989.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG KEHUTANAN														
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.013.000.000,000		1.229.000.000,000		1.229.000.000,000		1.229.000.000,000		1.229.000.000,000	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,44	1.013.000.000,000	84,63	1.229.000.000,000	84,86	1.229.000.000,000	85,08	1.229.000.000,000	85,30	1.229.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0002 - UPTD KPHP Unit I Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,44		84,65		84,87		85,08		85,30		2.11.3.28.0.00.10. 0003 - UPTD KPHP Unit II Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,44		84,64		84,86		85,08		85,30		2.11.3.28.0.00.10. 0004 - UPTD KPHP Unit III Lingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,44		84,64		84,86		85,07		85,30		2.11.3.28.0.00.10. 0005 - UPTD KPHP Unit IV Bintan- Tanjungpinang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,44		84,64		84,87		85,08		85,30		2.11.3.28.0.00.10. 0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	84,43		84,64		84,88		85,07		85,29		2.11.3.28.0.00.10. 0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					926.789.000,000		1.807.700.000,000		1.807.700.000,000		1.807.700.000,000		5.185.000.000,000	
Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	100	100	100	926.789.000,000	100	1.807.700.000,000	100	1.807.700.000,000	100	1.807.700.000,000	100	5.185.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	20,00	22,50	24,00		25,50		27,50		29,50		32,50		2.11.3.28.0.00.10. 0002 - UPTD KPHP Unit I Karimun
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	16,67	17,00	21,67		29,00		32,00		33,83		34,90		2.11.3.28.0.00.10. 0003 - UPTD KPHP Unit II Batam
	Persentase area yang dilindungi dari	9,78	11,22	14,98		19,00		21,00		28,11		32,78		2.11.3.28.0.00.10. 0004 - UPTD



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perambahan dan penebangan liar (%)													KPHP Unit III Lingga
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	13,00	17,66	21,80		26,24		27,92		29,44		33,32		2.11.3.28.0.00.10.0005 - UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	13,33	15,56	18,89		23,33		27,11		28,11		31,69		2.11.3.28.0.00.10.0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	17,75	22,80	28,60		31,75		35,25		36,95		39,88		2.11.3.28.0.00.10.0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					140.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	140.000.000,000	100	80.000.000,000	100	80.000.000,000	100	80.000.000,000	100	80.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					190.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		385.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	1,116	1,175	1,185	190.000.000,000	1,192	175.000.000,000	1,196	175.000.000,000	1,197	175.000.000,000	1,201	385.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					50.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000	
Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik (%)	1,71	1,71	2,56	50.000.000,000	2,56	110.000.000,000	4,27	110.000.000,000	5,98	110.000.000,000	6,84	110.000.000,000	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					21.108.976.313,420		22.282.561.315,000		24.282.561.315,000		26.282.561.315,000		34.282.561.313,000	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.528.361.313,420		14.370.100.000,000		14.927.665.009,000		15.185.000.000,000		15.185.000.000,000	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	14.528.361.313,420	BB	14.370.100.000,000	BB	14.927.665.009,000	BB	15.185.000.000,000	BB	15.185.000.000,000	3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	85,73	87	87,5		88,2		88,7		89,5		90		3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,35	87,55	87,65		87,75		87,76		87,78		87,8		3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					300.000.000,000		1.096.830.000,000		1.220.000.000,000		1.400.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (%)	13,64	18,18	27,27	300.000.000,000	68,18	1.096.830.000,000	81,82	1.220.000.000,000	90,91	1.400.000.000,000	95,45	2.000.000.000,000	3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					1.055.800.000,000		1.400.000.000,000		1.750.000.000,000		2.025.000.000,000		2.725.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (%)	55	57	59	1.055.800.000,000	62	1.400.000.000,000	64	1.750.000.000,000	66	2.025.000.000,000	68	2.725.000.000,000	3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					2.320.000.000,000		2.442.420.979,000		2.917.448.153,000		3.516.256.528,000		6.566.256.526,000	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15,43	15,9	16,5	2.320.000.000,000	17,1	2.442.420.979,000	18,3	2.917.448.153,000	19,5	3.516.256.528,000	20,2	6.566.256.526,000	3.29.0.00.0.00.20. 0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	136	135,7	135,4		135,2		135		134,7		134,4		3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N					2.904.815.000,000		2.973.210.336,000		3.467.448.153,000		4.156.304.787,000		7.806.304.787,000	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	98,19	98,80	99,20	2.904.815.000,000	99,30	2.973.210.336,000	99,40	3.467.448.153,000	99,50	4.156.304.787,000	99,55	7.806.304.787,000	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					21.433.474.991,000		23.173.786.431,000		23.721.119.071,000		23.768.925.037,000		28.817.209.063,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.293.474.991,000		16.473.786.431,000		17.021.119.071,000		17.068.925.037,000		22.117.209.063,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	85,89	86,75	86,85	18.293.474.991,000	86,85	16.473.786.431,000	86,9	17.021.119.071,000	86,9	17.068.925.037,000	87	22.117.209.063,000	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,71	86,81	86,93		87,02		87,14		87,26		87,31		3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	0	100	100	100.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					600.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	1,64	2,03	2,11	600.000.000,000	2,24	300.000.000,000	2,38	300.000.000,000	2,50	300.000.000,000	2,64	300.000.000,000	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
yang efisien, merata dan terintegrasi														
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					252.251.000,000		2.400.000.000,000		2.400.000.000,000		2.400.000.000,000		2.400.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	5,65	5,64	5,63	252.251.000,000	5,62	2.400.000.000,000	5,61	2.400.000.000,000	5,6	2.400.000.000,000	5,58	2.400.000.000,000	3.30.331.0.00.21. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					700.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor (%)	100	100	100	700.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	3.30.331.0.00.21. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.100.000.000,000		1.800.000.000,000		1.800.000.000,000		1.800.000.000,000		1.800.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	61,5	61-80	61-80	1.100.000.000,000	61-80	1.800.000.000,000	81-100	1.800.000.000,000	81-100	1.800.000.000,000	81-100	1.800.000.000,000	3.30.331.0.00.21. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					387.749.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000		900.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	20	30	35	387.749.000,000	40	900.000.000,000	45	900.000.000,000	50	900.000.000,000	55	900.000.000,000	3.30.331.0.00.21. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					8.986.400.000,000		4.100.000.000,000		4.100.000.000,000		4.100.000.000,000		4.100.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					8.686.400.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	6,64	7	7	8.686.400.000,000	7	3.500.000.000,000	7	3.500.000.000,000	7	3.500.000.000,000	7	3.500.000.000,000	3.30.331.0.00.21. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	84,92	2,81	2,92		3,03		3,14		3,25		3,36		3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					100.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	0,2	0,85	100.000.000,000	2,95	400.000.000,000	5,05	400.000.000,000	7,15	400.000.000,000	9,26	400.000.000,000	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					200.000.000,000		645.000.000,000		675.000.000,000		820.000.000,000		820.000.000,000	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					60.000.000,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (%)	25	-	33,3	60.000.000,000	33,3	0,000	33,3	0,000	33,3	0,000	33,3	0,000	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,000		470.000.000,000		470.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (%)	21,23	40,2	45,9	100.000.000,000	45,9	470.000.000,000	45,9	470.000.000,000	45,9	500.000.000,000	45,9	500.000.000,000	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					40.000.000,000		175.000.000,000		205.000.000,000		320.000.000,000		320.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (%)	6,25	-	31,25	40.000.000,000	31,25	175.000.000,000	31,25	205.000.000,000	31,25	320.000.000,000	31,25	320.000.000,000	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
														2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					298.452.906.865,420		269.712.880.283,000		276.712.880.284,000		273.712.880.283,000		308.712.880.283,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					213.038.678.668,420		202.534.274.961,000		209.534.274.962,000		206.488.274.961,000		239.898.274.961,000	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73	198.037.245.042,090	75	186.895.411.303,000	79	193.895.411.304,000	81	190.895.411.303,000	81,50	219.895.411.303,000	4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A		A		A		A		A		4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	1.515.000.000,000	A	1.700.000.000,000	A	1.700.000.000,000	A	1.700.000.000,000	A	1.700.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Provinsi Kepulauan Riau														
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22. 0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22. 0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	1.938.526.203,000	A	2.098.000.000,000	A	2.098.000.000,000	A	2.097.000.000,000	A	2.597.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22. 0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22. 0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	1.042.649.166,000	A	1.000.000.000,000	A	1.000.000.000,000	A	1.000.000.000,000	BB	1.000.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0003 - Biro Organisasi
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	71	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22. 0003 - Biro Organisasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22. 0003 - Biro Organisasi



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73	1.200.000.000,000	75	1.371.468.078,000	79	1.371.468.078,000	81	1.371.468.078,000	81,50	1.371.468.078,000	4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A		A		A		A		A		4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	852.314.677,330	A	1.000.000.000,000	A	1.000.000.000,000	A	1.000.000.000,000	A	1.000.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaun Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	1.458.548.000,000	A	1.825.000.000,000	A	1.825.000.000,000	A	1.780.000.000,000	A	2.190.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/Jasa



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	6.994.395.580,000	A	6.644.395.580,000	A	6.644.395.580,000	A	6.644.395.580,000	A	10.144.395.580,000	4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	71	72	73		75		79		81		81,50		4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,65	84,90	85,15		85,50		85,85		86,25		86,25		4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.000.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	1,75	2,17	2,17	1.000.000.000,000	2,18	1.500.000.000,000	2,20	1.500.000.000,000	2,25	1.500.000.000,000	2,25	2.000.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	38,2	39,2	40,4		41,6		42,8		43,5		43,5		4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	-	79,07	83,72		88,37		93,02		100		100		4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	11,77	11,89	11,90		12,02		12,10		12,20		12,30		4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.285.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor LPPD (Skor)	0	2,53	2,55	1.285.000.000,000	2,59	1.500.000.000,000	2,60	1.500.000.000,000	2,65	1.500.000.000,000	2,75	2.000.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	0	80	85		88		90		95		100		4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					80.442.754.400,000		60.901.605.322,000		60.901.605.322,000		60.901.605.322,000		60.901.605.322,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	0	0	91	80.442.754.400,000	91,5	60.901.605.322,000	92,4	60.901.605.322,000	93,5	60.901.605.322,000	94	60.901.605.322,000	4.01.2.21.2.20.22. 0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					1.200.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)	95	95	96	1.200.000.000,000	97	1.500.000.000,000	98	1.500.000.000,000	99	1.500.000.000,000	100	2.000.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0001 - Biro Hukum
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					693.440.297,000		780.000.000,000		785.000.000,000		783.000.000,000		783.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan (Persentase)	90	100	100	693.440.297,000	100	780.000.000,000	100	785.000.000,000	100	783.000.000,000	100	783.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					575.000.000,000		675.000.000,000		675.000.000,000		720.000.000,000		810.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	575.000.000,000	Sangat Baik	675.000.000,000	Sangat Baik	675.000.000,000	Sangat Baik	720.000.000,000	Sangat Baik	810.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0008 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					218.033.500,000		322.000.000,000		317.000.000,000		320.000.000,000		320.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	95	100	100	218.033.500,000	100	322.000.000,000	100	317.000.000,000	100	320.000.000,000	100	320.000.000,000	4.01.2.21.2.20.22. 0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					118.241.334.861,970		128.241.334.861,000		128.241.334.861,000		133.241.334.861,000		158.241.334.861,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					76.111.334.861,970		77.932.172.044,000		77.932.172.044,000		79.364.345.644,000		83.825.223.376,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	76.111.334.861,970	BB	77.932.172.044,000	BB	77.932.172.044,000	BB	79.364.345.644,000	BB	83.825.223.376,000	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	76	78	80		80		80		80		80		4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	82,27	83,00	83,05		84,00		84,05		85,00		85,00		4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					42.130.000.000,000		50.309.162.817,000		50.309.162.817,000		53.876.989.217,000		74.416.111.485,000	
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	42.130.000.000,000	100	50.309.162.817,000	100	50.309.162.817,000	100	53.876.989.217,000	100	74.416.111.485,000	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					33.827.541.514,940		35.457.153.370,940		35.584.050.217,250		35.560.080.662,580		39.844.085.181,970	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.446.169.976,130		28.672.435.716,140		28.902.983.554,250		29.518.774.204,580		31.550.214.726,970	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	A	A	27.446.169.976,130	A	28.672.435.716,140	A	28.902.983.554,250	A	29.518.774.204,580	A	31.550.214.726,970	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,093	90,50	91,00		91,50		92,00		92,50		93,00		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	78,23	78,48	78,98		79,48		79,98		80,48		80,98		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.150.000.000,000		3.177.327.000,000		2.325.000.000,000		1.997.694.000,000		3.950.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Program RPJMD (Predikat)	ST	ST	ST	3.150.000.000,000	-	3.177.327.000,000	-	2.325.000.000,000	-	1.997.694.000,000	-	3.950.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi (%)	100	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	60	80	80		80		90		90		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	0	71,42	73,47		75,51		77,55		79,59		81,63		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko (%)	0	16,67	14,29		11,9		9,52		7,14		4,76		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					3.231.371.538,810		3.607.390.654,800		4.356.066.663,000		4.043.612.458,000		4.343.870.455,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	100	100	3.231.371.538,810	0	3.607.390.654,800	0	4.356.066.663,000	0	4.043.612.458,000	0	4.343.870.455,000	5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	76,19	80,95		85,71		90,48		95,24		100		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	45,94	47,97	46,94		47,44		47,94		48,44		48,94		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	72,29	77,11		81,93		86,75		92,77		100		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	0	58,82		70,59		82,35		94,12		100		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24. 0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	46,83	48,08	47,83		48,33		48,83		49,33		49,83		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	0	18,64	18,64		20,34		20,34		22,03		22,03		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	20	20		30		30		40		40		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilavahan (%)	0	100	100		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	45	46,89	46		46,5		47		47,5		48		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	52	52		52		63		63		63		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	86	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					722.169.474.996,420		724.835.470.443,530		727.437.577.429,090		722.963.556.161,090		741.796.259.998,090	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					131.885.929.413,420		137.110.679.791,530		137.264.657.128,090		135.264.657.128,090		143.264.657.128,090	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	41.718.056.688,770	BB	43.417.807.066,880	BB	43.571.784.403,440	BB	41.571.784.403,440	BB	44.571.784.403,440	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	83,11	83,31		83,51		83,81		84,68		84,68		5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,05	89,25		89,50		89,75		90		90,05		5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,05	89,25		89,50		89,75		90		90,05		5.02.0.00.0.00.25.0001 - UPT Dana Bergulir
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,05	89,25		89,50		89,75		90		90,05		5.02.0.00.0.00.25.0002 - UPT Pemberdayaan



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														dan Pemanfaatan Aset
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	90.167.872.724,650	BB	93.692.872.724,650	BB	93.692.872.724,650	A	93.692.872.724,650	A	98.692.872.724,650	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	84	85		86		87		88		89		5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (%)	10,30	9,93	12,83		13,10		13,29		18,09		17,16		5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	74,25	75,00	76,15		77,23		78,80		79,63		80,55		5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,99	89,42	91,29		91,85		92,48		93,81		95,18		5.02.0.00.0.00.26.0001 - UPT PPD Batam Centre
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,01	97,12	97,32		97,58		97,76		97,79		97,95		5.02.0.00.0.00.26.0002 - UPT PPD Tanjungpinang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,33	83,93	85,47		88,73		90,76		91,35		94,27		5.02.0.00.0.00.26.0003 - UPT PPD Bintan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	96,74	96,98	97,08		97,19		97,79		98,03		98,22		5.02.0.00.0.00.26.0004 - UPT PPD Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,47	83,79	84,3		85,26		86,52		87,58		88,24		5.02.0.00.0.00.26.0005 - UPT PPD Lingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,95	83,89	85,18		86,24		86,64		87,72		88,45		5.02.0.00.0.00.26.0006 - UPT PPD Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	77,71	79,73	81,82		83,06		84,53		86,48		88,28		5.02.0.00.0.00.26.0007 - UPT PPD Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,91	87,1	87,35		88,36		89,95		90,15		91,08		5.02.0.00.0.00.26.0008 - UPT PPD Batu Aji
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,99	94,15	94,22		94,38		94,51		94,85		95,1		5.02.0.00.0.00.26.0009 - UPT PPD Kijang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,04	82,85	83,05		83,8		84,48		86,88		88,48		5.02.0.00.0.00.26.0010 - UPT PPD Tanjung Batu



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					577.108.545.583,000		570.384.790.652,000		572.832.920.301,000		570.358.899.033,000		574.941.602.870,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	100	100	100	576.718.545.583,000	100	570.384.790.652,000	100	572.832.920.301,000	100	570.358.899.033,000	100	574.941.602.870,000	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	91,51	91,68	91,96		92,22		92,47		92,71		92,94		5.02.0.00.0.00.25. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25. 0001 - UPT Dana Bergulir
														5.02.0.00.0.00.25. 0002 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan (%)	87,84	91,00	92,00	390.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5.02.0.00.0.00.26. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
														5.02.0.00.0.00.26. 0001 - UPT PPD Batam Centre
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.540.000.000,000		2.340.000.000,000		2.340.000.000,000		2.340.000.000,000		3.590.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0	3	3	1.540.000.000,000	3	2.340.000.000,000	3	2.340.000.000,000	3	2.340.000.000,000	3	3.590.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
														5.02.0.00.0.00.25. 0001 - UPT Dana Bergulir
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					11.635.000.000,000		15.000.000.000,000		15.000.000.000,000		15.000.000.000,000		20.000.000.000,000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	11.635.000.000,000	100	15.000.000.000,000	100	15.000.000.000,000	100	15.000.000.000,000	100	20.000.000.000,000	5.02.0.00.0.00.26. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	8,96	-8,03	-3,41		1,44		2,02		2,23		2,32		5.02.0.00.0.00.26. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	20	20	35		50		70		85		100		5.02.0.00.0.00.26. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	27	27	27		28		28		29		30		5.02.0.00.0.00.26. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	14,42	-2,53	-2,41		1,87		2,87		3,20		3,33		5.02.0.00.0.00.26. 0001 - UPT PPD Batam Centre
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	12,11	-19	-0,25		1,81		3,20		3,66		3,83		5.02.0.00.0.00.26. 0002 - UPT PPD Tanjungpinang
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	20,30	-7,65	-1,83		1,86		2,93		3,28		3,42		5.02.0.00.0.00.26. 0003 - UPT PPD Bintan
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	6	-20,79	-0,41		1,82		3,18		3,63		3,79		5.02.0.00.0.00.26. 0004 - UPT PPD Karimun
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	5,25	-30,60	0,38		1,83		3,21		3,67		3,84		5.02.0.00.0.00.26. 0005 - UPT PPD Lingga
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	23,22	-6,55	-0,26		1,83		3,14		3,58		3,74		5.02.0.00.0.00.26. 0006 - UPT PPD Natuna
	Persentase pertumbuhan Realisasi Paiak Daerah (%)	30,25	-23,14	-3,09		1,89		2,75		3,03		3,14		5.02.0.00.0.00.26. 0007 - UPT PPD Anambas



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	20,01	-8,30	3,89		1,71		3,81		4,48		4,71		5.02.0.00.0.00.26.0008 - UPT PPD Batu Aji
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	10,58	-15,37	4,52		1,73		3,81		4,48		4,72		5.02.0.00.0.00.26.0009 - UPT PPD Kijang
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	2,75	-27,50	4,63		1,73		3,81		4,49		4,72		5.02.0.00.0.00.26.0010 - UPT PPD Tanjung Batu
5.03 - KEPEGAWAIAN					23.798.473.587,560		28.924.689.768,890		24.424.689.768,890		24.924.689.768,890		27.424.689.768,890	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.848.473.587,560		25.849.689.768,890		20.849.689.768,890		20.849.689.768,890		20.999.689.768,890	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	A	A	20.848.473.587,560	A	25.849.689.768,890	A	20.849.689.768,890	A	20.849.689.768,890	A	20.999.689.768,890	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	-	79,58	80,98		81,94		82,89		83,88		85,07		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,67	86,72	86,77		86,82		86,87		86,92		86,97		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,57	81,07	81,57		82,07		82,57		83,07		83,57		5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	-	78,50	82,17		82,83		86,00		86,66		87,33		5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.950.000.000,000		3.075.000.000,000		3.575.000.000,000		4.075.000.000,000		6.425.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	38,00	38,25	38,50	2.950.000.000,000	39,00	3.075.000.000,000	39,15	3.575.000.000,000	39,40	4.075.000.000,000	39,75	6.425.000.000,000	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	20,00	22,00	24,00		25,50		28,00		30,00		32,00		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	-	98,58	98,59		98,60		98,61		98,62		98,63		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (%)	-	99,50	99,65		99,70		99,75		99,80		99,85		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	-	5,15	5,28		5,46		5,64		5,81		5,99		5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (%)	-	8,31	18,90		22,18		24,74		28,98		29,76		5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					18.987.932.830,120		20.148.967.766,120		20.318.153.067,120		20.818.153.067,120		23.318.153.067,120	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.318.153.067,120		13.318.153.067,120		13.318.153.067,120		13.318.153.067,120		13.318.153.067,120	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	15.318.153.067,120	BB	13.318.153.067,120	BB	13.318.153.067,120	BB	13.318.153.067,120	A	13.318.153.067,120	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	84,68	85,18	85,68		86,18		86,68		87,18		87,68		5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,02	91,07	91,12		91,17		91,22		91,27		91,32		5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.669.779.763,000		6.830.814.699,000		7.000.000.000,000		7.500.000.000,000		10.000.000.000,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	-	12,72	40,72	3.669.779.763,000	54,69	6.830.814.699,000	65,49	7.000.000.000,000	80,60	7.500.000.000,000	100	10.000.000.000,000	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	-	42,39	49,57		50,23		50,89		51,55		51,55		5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	11,25	23,75		42,50		62,50		81,25		100		5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	-	34,78	37,82		39,07		42,41		44,08		44,08		5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.270.000.000,000		1.350.000.000,000		1.300.000.000,000		1.110.000.000,000		1.700.000.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					920.000.000,000		1.200.000.000,000		1.200.000.000,000		1.050.000.000,000		1.200.000.000,000	
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	920.000.000,000	-	1.200.000.000,000	-	1.200.000.000,000	-	1.050.000.000,000	-	1.200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)	70	75	80		85		90		95		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	70	75	75		80		80		85		85		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	20	20	20		20		20		20		20		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					350.000.000,000		150.000.000,000		100.000.000,000		60.000.000,000		500.000.000,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	100	100	100	350.000.000,000	0	150.000.000,000	0	100.000.000,000	0	60.000.000,000	0	500.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					10.631.223.955,860		10.200.979.516,000		10.200.979.516,000		10.711.028.492,000		15.711.028.492,800	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.431.223.955,860		9.752.979.516,000		9.742.979.516,000		10.253.028.492,000		13.253.028.492,800	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	8.431.223.955,860	B	9.752.979.516,000	B	9.742.979.516,000	B	10.253.028.492,000	B	13.253.028.492,800	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	82,37	82,87	83		83,5		84		84,5		85		5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81,5		82,5		83		84		85		5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					2.200.000.000,000		448.000.000,000		458.000.000,000		458.000.000,000		2.458.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	40	45	50	2.200.000.000,000	55	448.000.000,000	60	458.000.000,000	65	458.000.000,000	67	2.458.000.000,000	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	15,38	16,67	42,55		43,14		46,15		47,06		48,28		5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	24,83	27,59	34,48		37,93		41,38		43,45		44,83		5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					14.667.199.049,060		20.988.274.792,000		20.988.274.792,000		20.988.274.792,000		30.946.274.791,000	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.212.673.748,220		16.075.135.615,000		15.575.135.615,000		15.970.135.029,000		25.928.135.028,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	11.212.673.748,220	BB	16.075.135.615,000	BB	15.575.135.615,000	A	15.970.135.029,000	A	25.928.135.028,000	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	62,52	64,92		65,04		66,16		67,28		74,4		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,03	88,01	89		89,4		89,6		89,8		90		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					3.454.525.300,840		4.913.139.177,000		5.413.139.177,000		5.018.139.763,000		5.018.139.763,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	12	12	100	3.454.525.300,840	100	4.913.139.177,000	100	5.413.139.177,000	100	5.018.139.763,000	100	5.018.139.763,000	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	12	12	100		100		100		100		100		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	12	12	100		100		100		100		100		5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					46.407.847.383,350		55.195.249.127,000		55.195.249.127,000		55.195.249.127,000		60.195.249.127,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					41.207.400.289,350		43.929.849.911,000		43.929.849.911,000		43.106.469.911,000		48.929.849.911,000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	41.207.400.289,350	A	43.929.849.911,000	A	43.929.849.911,000	A	43.106.469.911,000	A	48.929.849.911,000	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,07	88,09	89		89,03		89,07		90		92		6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	85,65	85,76		85,88		86,00		86,12		86,24		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.223.230.040,000		7.379.144.000,000		7.379.144.000,000		8.202.524.000,000		7.379.144.000,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	79	85,29	88,24	3.223.230.040,000	91,17	7.379.144.000,000	91,17	7.379.144.000,000	91,17	8.202.524.000,000	91,17	7.379.144.000,000	6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	88	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	100	42,86	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.977.217.054,000		3.886.255.216,000		3.886.255.216,000		3.886.255.216,000		3.886.255.216,000	
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	0	1	1	1.977.217.054,000	1	3.886.255.216,000	1	3.886.255.216,000	1	3.886.255.216,000	1	3.886.255.216,000	6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	2	3	5		5		7		8		9		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat
	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	12	12	12		12		12		12		12		6.01.0.00.0.00.28. 0000 - Inspektorat



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	34	34	34		34		34		34		34		6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					54.135.815.448,330		50.125.777.184,000		80.125.777.185,000		223.125.777.184,000		55.125.777.184,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.989.857.226,780		18.092.752.546,000		19.226.276.906,000		20.182.354.735,000		20.002.602.152,000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	11.989.857.226,780	BB	18.092.752.546,000	BB	19.226.276.906,000	BB	20.182.354.735,000	BB	20.002.602.152,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,54	88,55	88,56		88,57		88,58		88,59		88,60		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,88	83,97	84,85		85,73		87,53		88,75		89,64		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.291.201.000,000		3.249.079.448,000		3.594.321.087,000		3.033.334.859,000		2.644.441.200,000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	100	100	3.291.201.000,000	100	3.249.079.448,000	100	3.594.321.087,000	100	3.033.334.859,000	100	2.644.441.200,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0	0,002	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN					14.070.933.852,610		6.314.166.997,000		26.710.028.653,000		146.812.672.805,000		6.787.573.330,000	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	11,11	33,33	38,89	14.070.933.852,610	44,44	6.314.166.997,000	50,00	26.710.028.653,000	55,56	146.812.672.805,000	61,11	6.787.573.330,000	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.944.274.173,260		1.971.554.093,000		2.105.196.435,000		2.109.479.283,000		1.886.850.247,000	
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan (%)	97	85	85	3.944.274.173,260	85,15	1.971.554.093,000	85,31	2.105.196.435,000	85,53	2.109.479.283,000	85,71	1.886.850.247,000	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					3.604.232.000,000		1.663.205.517,000		1.409.752.570,000		1.413.209.329,000		1.249.664.009,000	
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	100	100	3.604.232.000,000	100	1.663.205.517,000	100	1.409.752.570,000	100	1.413.209.329,000	100	1.249.664.009,000	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					17.235.317.195,680		18.835.018.583,000		27.080.201.534,000		49.574.726.173,000		22.554.646.246,000	
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100	100	100	17.235.317.195,680	100	18.835.018.583,000	100	27.080.201.534,000	100	49.574.726.173,000	100	22.554.646.246,000	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3.967.074.441.226,580		3.824.461.110.516,510		3.711.731.482.529,810		3.883.148.807.608,010		4.061.554.865.759,100	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penentuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang diseleksi dari indikator tujuan dan atau sasaran daerah. Sedangkan IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi.

IKU dan IKD ditargetkan mulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya. Target IKU daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5.46-7.38	5.67-7.62	5.89-7.86	6.10-8.10	6.19-8.20
2.	Indeks Infrastruktur	Indeks	65,24	66,14	67,03	67,93	68,80
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A-	A-	A-	A	A
4.	Indeks Harmoni	Indeks	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Bagus
5.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.61-0.63	0.62-0.64	0.63-0.65	0.64-0.66	0.64-0.66
6.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	49,87	50,45	50,95	51,34	51,90
7.	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0.359-0.371	0.348-0.360	0.337-0.347	0.316-0.336	0.316-0.336
8.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	180.77-191.90	192.06-203.60	204.64-217.30	218.55-266.00	218.55-266.00
9.	Tingkat Kemiskinan	%	4.17-3.77	3.87-3.27	3.56-2.76	3.55-2.26	3.55-2.26
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.29-6.22	6.21-6.14	6.13-6.06	6.06-5.57	6.06-5.57



Target IKD tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,24	109,00	108,00	106,50	106,00	105,00	104,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,05	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30	76,52
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,29	66,79	67,29	67,79	68,29	68,79	69,29
4	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	2.834	2,947	3,065	3,188	3,315	3,448	3,586
5	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	11,68	12,00	15,90	19,80	23,70	27,60	31,50
6	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	2,54	3,76	5,03	6,30	7,57	8,84	10,11
7	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	33,51	50,35	51,8	53,25	54,7	56,15	57,6
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,6	7,76	8,92	10,08	11,24	12,4	13,50
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	0	0,495	0,505	0,515	0,525	0,535	0,545



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
10	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	84,76	85,00	85,75	86,50	87,25	88,00	88,75
11	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	60,76	76,84	79,70	82,48	85,19	87,87	90,37
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,21	84.32-84.46	84.37-84.51	84.42-84.56	84.47-84.61	84.52-84.66	84.52-84.66
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	0	71,35	71,85	72,35	72,85	73,35	73,85
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339	0.331-0.328	0.327-0.322	0.321-0.316	0.315-0.310	0.309-0.304	0.303-0.298
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	59,80	61,07	61,68	62,30	62,90	63,55	64,20
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,12	75,32	75,58	75,84	76,10	76,36	76,63
6	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	10,50	10,90	11,05	11,19	11,34	11,48	11,63
7	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,353	0,354	0,355	0,356	0,357	0,358	0,359
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	15,00	14,80	14,35	13,90	13,45	13,00	12,55



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,27	13,28	13,32	13,38	13,44	13,50	13,56
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,28	70,28	71,78	73,28	74,78	76,28	77,78
11	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,57	9,31	9,05	8,78	8,52	8,26	8,00
12	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	46,78	47,5	48,21	48,92	49,64	50,35	51,07
13	Persentase Desa Mandiri	%	22,91	22,91	23,64	24,00	25,09	25,45	25,75
14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	92	90	88	86	84	80
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,38	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63	0,67
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	27,85	28,57	29,28	30	30,71	31,41	32,14



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
17	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	81	82	83	84	85	86	87
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	59,2	60,17	61,09	62,01	62,93	63,84	64,76
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	26,79	28,77	30,76	42,74	34,73	36,71	38,69
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	-	13,81	13,92	14,03	14,14	14,25	14,36
21	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	%	5,65	5,64	5,63	5,62	5,61	5,6	5,58
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	71,41	72,18	72,44	72,7	72,96	73,22	73,48



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
23	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	84,92	2,81	2,92	3,03	3,14	3,25	3,36
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	52,80	53,86	54,48	55,09	55,70	56,31	65,5
25	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	53,79	55	55	60	60	65	65
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98	98	98	98	98	98
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,90	2,00	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	35,45	38,54	39,12	39,7	40,3	40,9	41,6
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	41,04	41.22-41.70	41.71-42.19	42.20-42.68	42.69-43.17	43.18-43.66	43.18-43.66
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	44,46	44,56	44,66	44,76	44,86	44,96	45,06
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,1121	0,420	0,556	0,691	0,827	0,962	1,098
6	Rasio Konektivitas	Rasio	0,55	0,69	0,72	0,76	0,80	0,81	0,85



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	%	45,03	51,44	52,65	54,40	56,14	57,87	59,56
8	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	70,09	71,28	72,46	73,65	74,83	76,02	77,20
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	50,05	46,32	47,43	47,61	47,92	49,64	49,68
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,40	3,40	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80
11	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	57,19	59,72	60,72	63,72	66,72	69,72	72,72
13	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	4,62	4,65	4,66	4,83	5,11	5,52	6,12
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	-	26,36	28,05	29,74	31,43	33,12	34,81
15	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	-	68	69,10	70,20	71,30	72,40	73,50
16	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	-	0,00	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28
17	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB	%	0	2,65	2,68	2,71	2,74	2,77	2,80



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Ekonomi Kreatif Nasional								
18	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	0	1,61	1,62	1,64	1,65	1,67	1,68
19	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	30.544	34.871	35.396	35.921	36.446	36.971	37.496
20	Tingkat Inflasi	%	2,09	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
21	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	-	11.842.627,12	15.746.844,64	19.651.062,16	23.555.279,68	27.459.497,19	31.363.714,71
22	Total Kredit/PDRB	(%)	-	16,8	18,56	20,32	22,08	23,84	25,6
23	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,06	5,10	5,12	5,14	5,17	5,19	5,19
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	0	51,98	52,28	52,58	52,88	53,13	53,48
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	1.667,1	2.497,8	2.722,6	2.947,4	3.172,2	3.397,0	3.621,8
26	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	15,43	15,9	16,5	17,1	18,3	19,5	20,2
27	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,11	3,31	3,60	3,89	4,18	4,47	4,76
28	Intensitas energi primer	SBM/Milyar Rupiah	136	135,7	135,4	135,2	135	134,7	134,4
29	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	(%)	-	73,94	73,96	73,99	74,01	74,26	74,54



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi								
30	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	-	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75	15,95
31	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	46	47,95	49,90	51,85	53,80	55,75
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Indeks	0	50,80	51,23	51,67	52,10	52,53	52,96
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	81,65	81,74	81,83	81,92	82,01	82,01
3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	59,93	61,31	68,46	73,15	77,30	79,55	81,15
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,26	4,30	4,33	4,37	4,40	4,44	4,47
5	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	77,66	77,67	77,68	77,69	77,70	77,71	77,72
6	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
8	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,05	3,14	3,24	3,33	3,42	3,51	3,61
10	Persentase Potensi Konflik Yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71,66	71,80	72,02	72,30	72,55	72,60	73,00
12	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	-	1,61	1,79	1,97	2,15	2,33	2,51
14	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
15	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6,66	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00	7,05
16	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan	%	50	100	100	100	100	100	100
17	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	N/A	73,49	74,36	75,23	76,10	76,97	77,84
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	627,38	627,99	628,49	628,60	628,70	628,80	628,90
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	108,45	100	100	100	100	100	100
3	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	117,98	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	-	80,46	80,46	80,47	80,47	80,48	80,48
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86	87	88	89	90	90
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	87,94	88,44	88,94	89,44	89,94	90,44	90,94
9	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	Angka	0,014	0,013	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008
10	Rasio peserta didik per kelas	Rasio	26,55	36	36	36	36	36	36
11	Persentase Konten Pendidikan	%	0	20	25	30	35	40	45



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
12	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	Nilai	64,32	65,23	65,46	65,69	65,92	66,15	66,38
13	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	Nilai	59,81	60,84	61,87	62,90	63,93	64,96	65,99
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	82,18	100	100	100	100	100	100
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	85,56	100	100	100	100	100	100
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	88	89	90	91	92	93	94
2	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	80	80	85	87	89	91	93
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader	%	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86	57,14



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Posyandu Madya minimal 10%								
5	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30	4,30
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
7	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
8	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Peringkat	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit	Satelit
9	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	92	92,50	93	93,50	94	94,50	95
10	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	50	55	60	65	70	75	80
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,14	91,50	91,85	92	92,25	92,65	93
12	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	82	85	90	90



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
13	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	7,4	11	10	9	8	7	6,5
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB
15	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83	83	84	84	85	85
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,57	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,23	91,40	91,60	91,80	92	92,90	92,20
19	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi								
21	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
22	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	6	6	7	7	7	7	7
23	Hipertensi dalam pengendalian	%	11,8	12	15	18	20	22	25
24	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	89,26	90	91	92	93	94	95
25	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	98,90	99,20	99,30	99,40	99,50
26	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
27	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	0	0	1	1	2	2	3
28	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	88,84	88,90	89	89,20	89,30	89,50	90
29	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	96,01	97,45	98,91	100,00	100,00	100,00	100,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,098	0,103	0,113	0,128	0,153	0,178	0,203
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	6,4	8	8	8	8	8	8
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	27,27	27,27	9,09	9,09	9,09	18,18
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan	%	100	29,63	37,04	7,41	7,41	7,41	11



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Strategis Daerah Provinsi								
8	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	0	0	21,43	14,29	21,4	21,4	21,4
9	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	66,63	70	70	72	75	80	80
10	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	25	25	50
11	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	80,87	81,10	82,18	82,29	82,40	82,51	82,81
12	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	84,53	84,53	85,38	86,23	87,09	87,96	88,64
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,78	88,80	88,80	88,83	88,85	88,87	88,90
14	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	10,26	10,26	24,49	27,55	30,52	33,40	36,21
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,78	88,80	88,80	88,83	88,85	88,87	88,90
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
2	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 â€” 15 Ha yang ditangani	%	0	1,83	5,50	9,17	12,83	16,50	20,16
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	52,66	53,00	53,25	53,50	53,75	54,00	54,25
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	77,39	79,50	81,74	83,91	86,09	87,39
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit	21	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,72	84,98	85,00	85,10	85,15	85,20	85,25
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase		14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86	87	88	89	90	91	92
6	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,69	2,70	2,72	2,76	2,80	2,84	2,88
7	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	1,62	2,17	2,71	3,25	3,79	4,33	4,87
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,06	84,43	84,71	85,10	85,36	86,31	86,52
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78,16	77,61	79,19	80,88	82,35	84,12	85,26
10	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	%	57,73	64,55	71,36	79,55	89,55	93,18	100,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
11	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,75	87,75	88,00	89,50	90,00	90,25	91,50
13	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,53	0,54	0,55	0,58	0,61	0,63	0,68
14	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	71,43	100	100	100	100	100	100
15	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	66,67	68,00	69,36	70,75	72,17	73,61	75,08
16	Persentase penanganan pra bencana	%	57,14	58,28	59,45	60,64	61,85	63,09	64,35
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	30,59	31,37	1,57	42,35	42,35	42,35	42,35
2	Persentase Penerima Manfaat yang	%	16,15	4,34	0,40	3,22	3,65	4,03	3,89



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Terpenuhi Kebutuhan Dasar								
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43
8	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	dasarnya di dalam panti								
9	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	8,93	0,89	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
12	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	0,26	0,17	0,01	0,13	0,16	0,19	0,19
13	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan,	%	-	-	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial								
15	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,28	86,45	86,57	86,68	86,73	87,10	87,10
2	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	79,35	64	79,45	79,66	79,72	79,95	80,12
3	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan	%	50	50	50	62,50	65,50	75	75



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	(RTKD) yang berkualitas								
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,28	8,31	86,45	86,57	86,68	86,73	87,10
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,28	86,31	86,45	86,57	86,68	86,73	87,10
6	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	(%)	-	51,98	52,28	52,58	52,88	53,18	53,48
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	40,56	50	54	55	55,98	57	60
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50,80	66,67	71,79	73,82	74,43	75,00	75,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50,80	66,67	71,79	73,82	74,43	75,00	75,00
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
11	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	0	0	79,19	79,25	79,33	79,46	79,55
12	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	60,27	77,00	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
13	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	%	60,27	77,00	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
14	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani	%	60,27	77,00	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
15	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	21,18	14,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
16	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	21,18	14,80	15,80	16,00	16,25	16,30	16,30
17	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	21,18	14,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	0	86,45	86,57	86,68	86,73	87,10
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	205,9	210,02	214,22	218,50	222,87	227,33	231,88
20	Persentase Kabupaten/Kota yang	%	42,86	57,14	5,14	71,43	85,71	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	menyusun rencana tenaga kerja								
21	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,59	4,68	4,78	4,87	4,97	5,07	5,17
22	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	78,58	80,15	81,75	83,39	85,06	86,76	88,49
23	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	14,57	17,30	20,03	22,76	25,49	28,22	30,95
24	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	39,04	39,82	40,62	41,43	42,26	43,10	43,97
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	11,82	12,41	13,03	13,05	13,07	13,09	13,09
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	93,43	95	96	97	98	99	99
3	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan	%	46,51	51,16	55,81	60,46	65,11	69,79	69,79
4	Rasio Kekerasan Anak	Rasio	6,15	6,03	5,91	5,79	5,68	5,56	5,56
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	79,57	77,00	77,15	77,30	77,45	77,60	77,75
6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	94	95	96	97	98	99	99
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	43,70	43,51	43,33	42,31	41,34	40,38	40,38
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,75	93,00	93,25	93,55	93,80	94,00	94,00
9	Persentase Kabupaten/Kota yang	Persentase	71,43	71,43	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	mendapatkan Peringkat dalam KLA								
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	76,65	76,80	77,00	77,20	77,50	78,00
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,9	â‰¤10	â‰¤10	â‰¤10	â‰¤10	â‰¤10	â‰¤10
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88,76	89,3	90,1	90,18	90,28	90,36	90,44
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	93,57	83	84	85	86	87	85
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	89,35	82,15	83,19	83,27	83,33	83,41	83,45
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,8	85	85	86	87	88	89
7	Persentase Cadangan Pangan	%	72,15	73,59	75,06	76,57	78,10	79,66	81,25
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase luas lahan yang di bebaskan	%	0	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	untuk kepentingan umum								
2	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau	%	0	0	0	25	25	25	25
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	53,19	57,45	59,57	68,09	78,72	91,49	100
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	9,76	9,76	12,20	14,63	17,07	21,95	24,39
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,45	84,65	84,87	85,07	85,30



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	%	6,19	6,19	6,64	6,64	7,08	7,52	7,52
7	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha	%	12,20	21,95	32,93	32,93	53,66	53,66	100,00
8	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	%	50,00	50,00	53,57	57,14	67,86	78,57	100
9	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa	%	46,67	46,67	53,33	60,00	73,33	86,67	100
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	80,29	80,43	80,47	80,51	80,51	80,51
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,82	84,25	84,44	84,65	84,87	85,08	85,30
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	23,33	30,49	41,46	50,00	63,41	79,27	91,46



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL								
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	%	36,36	36,36	38,64	40,91	43,18	45,45	50
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99,76	99,77	99,77	99,78	99,79	99,80	99,80
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	62,83	62,95	63	64	65	66	67
7	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
8	Pemanfaatan data kependudukan	%	75	76,50	78,03	79,59	81,18	82,81	84,46
AM 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	%	49,45	50,55	52,36	54,18	56,73	59,27	61,82
2	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina	%	0,31	5,72	11,14	16,55	21,97	27,38	32,80
3	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	Desa	110	10	15	15	20	20	25
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	39,82	41,64	47,39	51,03	63,15	76,48	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,71	87,85	88,95	89,15	89,35	89,75	90,92
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	0	88,26	90	93	95	98	100
8	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,17	9,45	10,91	12,73	14,55	16,36	18,18
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	68,70	69,25	69,50	70	70,95	72,10	72,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	66	67	68	69	70	71	71
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,1	11,75	11,25	10,75	10,25	10	9,75
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	79,69	81,19	82,69	84,19	85,69	87,19	88,69
5	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	31,61	33,11	34,61	36,11	37,61	39,11	40,61
6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	%	11,10	10,80	10,50	10,20	9,90	9,60	9,60
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	%	56,1	57,20	58,40	59,70	61,10	62,55	64,00



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Prevalence Rate/mCPR)								
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	%	49,00	52,50	52,50	56,00	59,50	63,00	63,00
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	58,30	58,85	62,84	69,40	78,17	89,12	100
4	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	%	76,92	84,62	84,62	88,46	92,31	96,15	96,15
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	80,73	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,55	78,07	79,53	80,99	81,36	81,72	82,00
7	Kinerja lalu lintas provinsi	Rasio	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,28
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks	0	71	72	73	74	75	76



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	0	75	76	77	78	79	80
4	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Nilai	58,88	66	70	75	80	85	90
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,67	81	82	83	84	85	86
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40	83,33	86,11	88,89	91,67	94,44	94,44
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	25	26	28	30	32	35
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	30	35	40	42	44	46	48
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	24,90	28,80	30,50	32,22	33,96	35,72	37,50
2	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	26,82	34,89	35,19	35,49	35,79	36,09	36,39
3	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	47,08	37,18	39,89	42,64	45,43	47,76	50,12
4	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	7,27	5,44	5,82	6,20	6,59	6,99	7,39
5	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	18,68	18,46	18,88	19,30	19,73	20,19	20,70
6	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	9,18	8,74	9,16	9,58	10,02	10,45	10,90
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	82,90	80,99	81,26	81,48	81,67	81,89	82,08
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,22	83,22	83,32	83,42	83,52	83,62	83,72
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	16	16	16	16	16	20
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	%	100	16	16	16	16	16	20
4	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Dokumen	5	16	16	16	16	16	20
5	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	%	100	16	16	16	16	16	20
6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	%	100	100	16	16	16	16	20
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	-	86,03	86,36	86,69	87,02	87,35	87,68
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	3,74	4,00	4,26	4,52	4,80	4,80
9	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	134,4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Nilai	46,35	46,85	47,35	47,85	48,35	48,85	49,00



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Orang	5	6	7	8	9	9	9
3	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan	%	9,63	14,85	18,97	21,68	22,28	22,34	22,40
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	76	76	77	78	79	80	81
6	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	%	0,76	0,61	0,76	0,90	0,98	0,99	1,01
7	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	0,38	1,47	1,89	2,31	2,80	3,23	3,65
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	%	0,17	0,21	0,23	0,24	0,27	0,30	0,32
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	2,69	4,20	7,98	9,49	13,28	14,79	16,30
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	80	85	86	87	88
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,70	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	64,34	40	46	50	54	58	62
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64,34	40	46	50	54	58	62
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai	%	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)								
2	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	%	9,25	11,14	13,03	14,92	16,81	18,70	20,59
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	23,60	25,84	28,09	30,34	32,58	34,83	37,08
4	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah	%	0	0	13,33	26,67	40	53,33	66,67
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	5,90	6,94	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
7	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se- Tingkat SLTA/ sederajat tentang sejarah lokal		0	0,29	0,59	0,88	1,17	1,47	1,76
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86	86	86,5	87	88	88	88



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	41,76	45,53	49,31	53,08	56,85	60,63	64,40
10	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,66	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,89
11	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan	%	16,58	17,26	17,34	18,61	19,29	19,97	20,65
12	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	6,93	7,30	7,66	8,03	8,39	9,12	9,85
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,50	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73,69	74,69	75,69	76,69	77,69	78,69	79,69
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	10	12	14	16	18	20	22
5	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam	Orang	3.288	4.004	4.154	4.304	4.454	4.604	4.754
6	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	50.607	50.700	50.800	50.900	51.000	51.100	51.200
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	78,01	78,31	78,46	78,61	78,76	78,91
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,15	88,25	88,35	88,45	88,55	88,65	88,75
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	%	20,34	22,63	26,32	28,18	30,65	33,73	37,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	18,33	16,67	19,17	21,67	24,17	26,67	29,17
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	68,17	40,61	41,37	42,13	42,90	43,65	44,41
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.255,75	31.528.197	316230,66	317179,36	318130,89	319085,29	320042,54
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39.898	39.899,26	42.508,16	45.289,06	48.251,89	51.441,71	54.806,00
4	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	95	90	90	90	90	90	90
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
6	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	%	75	90	92	94	98	98	98



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,13	80,20	80,53	80,84	80,99	81,30	81,45
8	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	19.692,58	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,79	85,81	85,83	85,85	85,87	85,89	86,01
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	7,61	9,61	11,61	13,61	15,61	17,61	19,61
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,22	4,65	6,54	8,42	10,31	12,19	14,08
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1,89	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	3.491.947	3.500.450	3.512.500	3.525.750	3.539.850	3.565.550	3.606.151
6	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,64	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0,00	83,46	83,58	83,58	83,68	83,68	83,80
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,86	88,90	88,95	89,00	89,15	89,30	89,50
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	52,12	0,24	0,34	0,38	0,40	0,73	1,14
10	Tingkat hunian akomodasi	%	56,54	45,00	46,50	47,50	48,50	49,50	50,50
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,90	2,00	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52
12	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	8,9	49,83	9,00	8,26	7,63	7,09	6,62
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	17.251,66	17.510,4	19.960,1	22.783,17	26.004,19	29.663,76	33.814,08
2	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	50	52	54	56	58	60	62
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	Dokumen	na	64	65	66	67	68	69



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Menular Strategis (PHMS)								
4	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	4.898	42	435	45	45	45	45
5	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	Hektar	199	82	82	82	85	90	90
6	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	27.788,8	28.205,63	28.628,71	29.058,14	29.494,01	29.936,42	30.385,47
7	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	%	na	739	746	748	748	748	748
8	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	28.856,8	29.722,5	30.614,18	31.532,6	32.478,58	33.452,94	34.456,53
9	Produksi Ternak	Ton	18.823,34	19.034,55	19.247,61	19.464,84	19.682,31	19.903,25	20.128,32
10	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-33,48	5	5	5	5	5	5
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	23,34	23,81	24,28	24,77	25,26	25,77	26,28
BB	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,86	85,08	85,30



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,86	85,07	85,30
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,87	85,08	85,30
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,43	84,64	84,88	85,07	85,29
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	SBM/Milyar Rupiah	1,116	1,175	1,185	1,192	1,196	1,197	1,201
6	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	%	1,71	1,71	2,56	2,56	4,27	5,98	6,84
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,44	84,65	84,87	85,08	85,30
8	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	17,75	22,80	28,60	31,75	35,25	36,95	39,88
10	Persentase area yang dilindungi dari	%	13,33	15,56	18,89	23,33	27,11	28,11	31,69



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	perambahan dan penebangan liar								
11	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	13,00	17,66	21,80	26,24	27,92	29,44	33,32
12	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	9,78	11,22	14,98	19,00	21,00	28,11	32,78
13	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	16,67	17,00	21,67	29,00	32,00	33,83	34,90
14	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	20,00	22,50	24,00	25,50	27,50	29,50	32,50
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	84,25	84,44	84,63	84,86	85,08	85,30
17	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan	Ha	500,48	510,49	520,70	531,11	541,74	552,57	563,62



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	melalui Perhutanan Sosial								
BC	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	%	55	57	59	62	64	66	68
3	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	13,64	18,18	27,27	68,18	81,82	90,91	95,45
4	Rasio Elektrifikasi	%	98,19	98,80	99,20	99,30	99,40	99,50	99,55
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	85,73	87	87,5	88,2	88,7	89,5	90
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,35	87,55	87,65	87,75	87,76	87,78	87,8
BD	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	%	20	30	35	40	45	50	55
2	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	%	0	100	100	100	100	100	100



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	%	1,64	2,03	2,11	2,24	2,38	2,50	2,64
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,89	86,75	86,85	86,85	86,9	86,9	87
5	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Tertib Niaga	Indeks	61,5	61-80	61-80	61-80	81-100	81-100	81-100
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,71	86,81	86,93	87,02	87,14	87,26	87,31
9	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	74,75	76,25	77,77	79,33	80,91	82,53	84,18
10	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77
11	Tertib Usaha	%	0	83,13	84,79	86,49	88,22	89,98	91,78
12	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	81,5	83,13	84,79	86,49	88,22	89,98	91,78



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
14	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
BE	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
2	Persentase Fasilitas Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	0	0,2	0,85	2,95	5,05	7,15	9,26
3	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	6,64	7	7	7	7	7	7
4	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	4,9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100
BF	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	6,25	-	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
2	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	25	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
3	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	21,23	40,2	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
BG	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	0	0	91	91,5	92,4	93,5	94
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
5	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	Persentase	95	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
11	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan	Persentase	90	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan								
12	Skor LPPD	Skor	0	2,53	2,55	2,59	2,60	2,65	2,75
13	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	BB
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
16	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General	Skor	1,75	2,17	2,17	2,18	2,20	2,25	2,25
17	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan	Persentase	95	95	96	97	98	99	100
18	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
19	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	71	73	75	79	81	81,50
20	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
21	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
22	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi	Indeks	38,2	39,2	40,4	41,6	42,8	43,5	43,5
23	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
24	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	71	72	73	75	79	81	81,50
25	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	Persentase	0	80	85	88	90	95	100
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
28	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan	Persentase	-	79,07	83,72	88,37	93,02	100	100
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
32	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,65	84,90	85,15	85,50	85,85	86,25	86,25
35	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP	Nilai	11,77	11,89	11,90	12,02	12,10	12,20	12,30
BH	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
BI	5.01 - PERENCANAAN								
1	Capaian Kinerja Program RPJMD	Predikat	ST	ST	ST	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	A
3	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan	%	0	100	100	0	0	0	0



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	dan Pembangunan Manusia								
4	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	100	100	0	0	0	0
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,093	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00
6	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	%	100	100	100	0	0	0	0
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	78,23	78,48	78,98	79,48	79,98	80,48	80,98
8	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	%	60	80	80	80	90	90	100
9	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	100



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
10	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	%	0	71,42	73,47	75,51	77,55	79,59	81,63
11	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	45,94	47,97	46,94	47,44	47,94	48,44	48,94
12	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko	%	0	16,67	14,29	11,9	9,52	7,14	4,76
13	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	72,29	77,11	81,93	86,75	92,77	100
14	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	0	58,82	70,59	82,35	94,12	100



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko								
15	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	0	100	100	0	0	0	0
16	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	0	100	100	0	0	0	0
17	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	46,83	48,08	47,83	48,33	48,83	49,33	49,83



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
19	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	0	18,64	18,64	20,34	20,34	22,03	22,03
20	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	0	20	20	30	30	40	40
21	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100	100	0	0	0	0
22	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100	100	0	0	0	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
23	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100	100	100	100	100	100
24	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	45	46,89	46	46,5	47	47,5	48
25	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	52	52	52	63	63	63
26	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	0	86	100	100	100	100	100
BJ	5.02 - KEUANGAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	6	-20,79	-0,41	1,82	3,18	3,63	3,79
2	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	20,30	-7,65	-1,83	1,86	2,93	3,28	3,42
3	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	12,11	-19	-0,25	1,81	3,20	3,66	3,83
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,33	83,93	85,47	88,73	90,76	91,35	94,27
5	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	30,25	-23,14	-3,09	1,89	2,75	3,03	3,14
6	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	23,22	-6,55	-0,26	1,83	3,14	3,58	3,74
7	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	10,58	-15,37	4,52	1,73	3,81	4,48	4,72
8	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	5,25	-30,60	0,38	1,83	3,21	3,67	3,84
9	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	14,42	-2,53	-2,41	1,87	2,87	3,20	3,33



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
10	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	2,75	-27,50	4,63	1,73	3,81	4,49	4,72
11	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0	3	3	3	3	3	3
12	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	87,84	91,00	92,00	0	0	0	0
15	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,99	89,42	91,29	91,85	92,48	93,81	95,18
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,01	97,12	97,32	97,58	97,76	97,79	97,95



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
20	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	20,01	-8,30	3,89	1,71	3,81	4,48	4,71
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	96,74	96,98	97,08	97,19	97,79	98,03	98,22
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,47	83,79	84,3	85,26	86,52	87,58	88,24
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,95	83,89	85,18	86,24	86,64	87,72	88,45
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,71	79,73	81,82	83,06	84,53	86,48	88,28
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,99	94,15	94,22	94,38	94,51	94,85	95,1
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,91	87,1	87,35	88,36	89,95	90,15	91,08
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,04	82,85	83,05	83,8	84,48	86,88	88,48
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,531	89,05	89,25	89,50	89,75	90	90,05
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,531	89,05	89,25	89,50	89,75	90	90,05
30	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	8,96	-8,03	-3,41	1,44	2,02	2,23	2,32
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	84	85	86	87	88	89
32	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	%	91,51	91,68	91,96	92,22	92,47	92,71	92,94



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
33	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	83,11	83,31	83,51	83,81	84,68	84,68
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,531	89,05	89,25	89,50	89,75	90	90,05
36	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	%	10,30	9,93	12,83	13,10	13,29	18,09	17,16
37	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	27	27	27	28	28	29	30



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
38	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
39	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	74,25	75,00	76,15	77,23	78,80	79,63	80,55
40	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	%	20	20	35	50	70	85	100
BK	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	Nilai	38,00	38,25	38,50	39,00	39,15	39,40	39,75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,57	81,07	81,57	82,07	82,57	83,07	83,57
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	A
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	-	78,50	82,17	82,83	86,00	86,66	87,33
5	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	Nilai	20,00	22,00	24,00	25,50	28,00	30,00	32,00
6	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	-	79,58	80,98	81,94	82,89	83,88	85,07
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,67	86,72	86,77	86,82	86,87	86,92	86,97
8	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	-	98,58	98,59	98,60	98,61	98,62	98,63



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	%	-	99,50	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85
10	Persentase ASN yang dibina Karirnya	%	-	5,15	5,28	5,46	5,64	5,81	5,99
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,83	67,15	68,49	69,86	71,26	72,68	74,14
12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,88	37,25	37,62	38,00	38,38	38,76	39,15
13	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	87,28	88,15	89,03	89,92	90,82	91,73	92,65
BL	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	-	12,72	40,72	54,69	65,49	80,60	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	-	42,39	49,57	50,23	50,89	51,55	51,55
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	84,68	85,18	85,68	86,18	86,68	87,18	87,68
5	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	-	11,25	23,75	42,50	62,50	81,25	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,02	91,07	91,12	91,17	91,22	91,27	91,32
7	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	-	34,78	37,82	39,07	42,41	44,08	44,08
BM	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	0	0	0	0
2	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	%	70	75	80	85	90	95	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	0	0	100	100	100	100	100
4	Persentase Inovasi yang dilaporkan	%	70	75	75	80	80	85	85
5	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	Karya	20	20	20	20	20	20	20
BN	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	B
2	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	40	45	50	55	60	65	67
3	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	15,38	16,67	42,55	43,14	46,15	47,06	48,28
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	82,37	82,87	83	83,5	84	84,5	85



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	24,83	27,59	34,48	37,93	41,38	43,45	44,83
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	80	81,5	82,5	83	84	85
BO	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
2	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	%	12	12	100	100	100	100	100
3	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	%	12	12	100	100	100	100	100
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	62,52	64,92	65,04	66,16	67,28	74,4
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,03	88,01	89	89,4	89,6	89,8	90
6	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	%	12	12	100	100	100	100	100
BP	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas	%	79	85,29	88,24	91,17	91,17	91,17	91,17



**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI	Perangkat Daerah	0	1	1	1	1	1	1
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,07	88,09	89	89,03	89,07	90	92
5	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	12
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan	Rekomendasi	2	3	5	5	7	8	9
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0	85,65	85,76	85,88	86,00	86,12	86,24
9	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan	%	88	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Perencanaan dan Keuangan Daerah								
10	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	Perangkat Daerah	34	34	34	34	34	34	34
11	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	%	100	42,86	100	100	100	100	100
12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3
13	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3
BQ	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	%	11,11	33,33	38,89	44,44	50,00	55,56	61,11
2	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	97	85	85	85,15	85,31	85,53	85,71



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	%	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,88	83,97	84,85	85,73	87,53	88,75	89,64
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,54	88,55	88,56	88,57	88,58	88,59	88,60



BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. Agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut:

1. Gubernur Kepulauan Riau berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2030 wajib berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
3. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota agar mendukung pencapaian target-target dan rencana program sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
5. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka perlu dilakukan pengendalian risiko strategis pemerintah daerah untuk menunjang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



6. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
7. DPRD dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mengawal pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
8. Bappeda Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 minimal sebanyak 1 kali dalam lima tahun;

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi, mencakup sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko strategis pemerintah daerah.

Pengendalian risiko strategis pemerintah daerah yang kontinu dan partisipatif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dan target-target kinerja RPJMD, Badan Perencanaan



Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD minimal 1 kali dalam lima tahun.

5.3 Perubahan RPJMD

Dalam rangka penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, dapat dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Pedoman terkait perubahan RPJMD diatur sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
2. Perubahan terhadap target kinerja tahunan RPJMD dapat dilakukan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.4 Pedoman Transisi

Tahun 2030 merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2029. Dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan sekaligus mengisi kekosongan hukum, maka penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Di dalam RPJMD tahun 2025-2029 target kinerja telah disediakan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030. Namun demikian kinerja tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya.